

Editor :

Adi Fahrudin, PhD | Mohammad Reevany Bustami, PhD
Dr. Lusi Andriyani | Wanda Kiyah George Albert, PhD

NASIONALISME RAGAM DAN RASA



 **IDEN**
press yogyakarta

Editor :

**Adi Fahrudin, PhD | Mohammad Reevany Bustami, PhD
Dr. Lusi Andriyani | Wanda Kiyah George Albert, PhD**

NASIONALISME : RAGAM DAN RASA

NASIONALISME : RAGAM DAN RASA

Perpustakaan Nasional RI Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

NASIONALISME: RAGAM DAN RASA--Cet 1- Idea Press Yogyakarta,
Yogyakarta 2021 -- viii + 206 --hlm-15.5 x 23.5 cm
ISBN: 978-623-6074-15-2

1. Nasionalisme

2. Judul

@ Hak cipta Dilindungi oleh undang-undang
Memfotocopy atau memperbanyak dengan cara apapun sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa seizin penerbit, adalah tindakan tidak bermoral
dan melawan hukum.

NASIONALISME: RAGAM DAN RASA

Penulis: Mohammad Reevany Bustami, Rajih Arraki', Oktaviana Purnamasari,
Arya Zikri, Noergawanti Syafitri, Lusi Andriyani,
Wanda Kiyah George Albert, Adi Fahrudin, Husmiati, Sakroni,
Abu Huraerah, Meiti Subardhini, Dian Din Astuti Mulia,
Laila Meiliyandrie Indah Wardani, Istiana Hermawati, Wardo,
Tria Patrianti, Ida Hindarsah, Suryanto

Editor : Adi Fahrudin, PhD
Mohammad Reevany Bustami, PhD
Dr. Lusi Andriyani
Wanda Kiyah George Albert, PhD

Setting Layout: Agus S
Desain Cover: Ach. Mahfud
Cetakan Pertama: Mei 2021
Penerbit : Idea Press Yogyakarta

Diterbitkan oleh Penerbit IDEA Press Yogyakarta
Jl. Amarta Diro RT 58 Pendowoharjo Sewon Bantul Yogyakarta
Email: ideapres.now@gmail.com/ idea_press@yahoo.com

Anggota IKAPI DIY

Copyright @2021 Penulis
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
All right reserved.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Ilahi Robbi, buku dengan judul **Nasionalisme: Ragam dan Rasa** dapat disiapkan di pertengahan bulan Ramadan 1442H. Buku ini merupakan kumpulan makalah 10th *International Academia Roundtable Forum* yang diselenggarakan secara Webinar pada tanggal 31 Oktober 2020 dengan tema “*Nationalism in Many Faces*”. Bab-bab dalam buku ini dikumpulkan dan melalui proses seleksi yang ketat, review dan penyuntingan beberapa kali agar layak menjadi bahan bacaan dan memberikan informasi baru mengenai nasionalisme dalam spectrum yang luas dan menyeluruh.

Diskursus mengenai Nasionalisme sesungguhnya kini tidak lagi dibatasi pada persoalan rasa cinta tanah air saja. Dunia kini berubah dan perubahan tersebut turut mempengaruhi perspektif kita mengenai nasionalisme. Globalisasi telah memberi peluang kepada kita untuk memahami nasionalisme dalam konteks yang lebih luas dan tidak hanya dibatasi ‘border’ Negara. Dalam skala mikro, persoalan nasionalisme selalunya berputar pada isu domestic bagaimana membentuk karakter dan menumbuhkan rasa cinta tanah air, pengaruh budaya asing pada tingkah laku dan kepribadian anak, dan proses komunikasi dalam pembentukan kepribadian anak. Pada sisi lain, identitas dan kewarganegaraan global, masalah perkawinan antar Negara (*transnational marriage*), investasi asing, peranan generasi milineal, pengaruh influencer dan patriotism dan nasionalisme para veteran. Perwujudan rasa nasionalisme

kini sudah beraneka ragam mulai dari lagu, puisi, busana dan sebagainya. Intinya nasionalisme perlu dipahami tidak dalam sudut pandang yang sempit. Manifestasi nasionalisme dewasa ini bisa dalam berbagai ragam dan rasa. Oleh sebab itu selaku editor buku ini kami menyadari sebetulnya tidak mudah dan ringan melakukan editasi buku dengan topik-topik yang sangat variatif seperti ini, sementara itu pekerjaan menarik keterhubungan antara tema yang satu dengan tema yang lain pula memerlukan ketelitian dan diskusi yang cukup melelahkan.

Pemakalah pada webinar ke-10 cukup banyak namun dari sekian banyak pemakalah hanya separuh yang menyerahkan artikel lengkap sesuai batas waktu yang ditentukan. Buku nasionalisme ini dimaksudkan sebagai catatan kreatif diskusi mengenai nasionalisme dari anggota *International Academia Roundtable Forum (IARTF)* yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan profesi baik dari Indonesia maupun Malaysia. Kesadaran yang tinggi bahwa tugas semua disiplin ilmu dan profesi konsen pada upaya perubahan sosial yang dapat meningkatkan, mempertahankan dan memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia. Untuk itulah maka diseminasi pemikiran dan hasil penelitian dalam bentuk publikasi seperti ini sangat diperlukan agar diketahui oleh khalayak ramai.

Buku ini sudah barang tentu masih sangat jauh dari sempurna baik dari konten, struktur, komposisi dan pembahasan. Terlebih buku ini bukan pula sebuah buku pegangan melainkan sebuah buku bunga rampai. Namun demikian, kami berharap buku ini dapat menjadi bacaan dan rujukan bagi siapapun yang ingin tahu tentang nasionalisme. Insya Allah.

25 November 2020

Tim Editor



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
PROLOG	1
BAB 1	
NUSANTARASASI: TEORI DEKOLONISASI NEGARA DAN PENGUATAN NASIONALISME DI NUSANTARA Mohammad Reevany Bustami & Rajih Arraki'	15
BAB 2	
NASIONALISME DALAM KARYA SAJAK VIDEO NUSANTARA Oktaviana Purnamasari, Arya Zikri & Noergawanti Syafitri	37
BAB 3	
IDENTITAS DAN KEWARGANEGARAAN GLOBAL Lusi Andriyani.....	51
BAB 4	
<i>TRANSNATIONAL MARRIAGE</i> : KONSEP DAN ISU Wanda Kiyah George Albert & Adi Fahrudin	59
BAB 5	
GENERASI MUDA DAN NASIONALISME Husmiati.....	71

BAB 6	
NASIONALISME PADA GENERASI MILENIAL INDONESIA	
Sakroni	79
BAB 7	
GENERASI MILENIAL DI ERA SOCIETY 5.0	
DALAM BINGKAI NILAI-NILAI NASIONALISME	
Abu Huraerah.....	91
BAB 8	
PEMBENTUKAN KARAKTER NASIONALISME	
Meiti Subardhini	105
BAB 9	
STRATEGI PEMBENTUKAN IDENTITAS NASIONAL	
BHINEKA TUNGGAL IKA MELALUI INFLUENCER MILLENIAL	
Dian Din Astuti Mulia & Laila Meiliyandrie Indah Wardani	117
BAB 10	
NASIONALISME DAN NILAI KEPAHLAWANAN VETERAN	
PEJUANG	
Istiana Hermawati & Warto.....	125
BAB 11	
NASIONALISME: MENURUNKAN EMISI, MENYELAMATKAN	
BUMI	
Tria Patrianti	155
BAB 12	
KEWIRAUSAHAAN DAN NASIONALISME	
Ida Hindarsah.....	167
BAB 13	
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA: INVESTASI, NASIONALISME,	
DAN LINGKUNGAN	
Suryanto.....	185
BIODATA SINGKAT PENULIS	199

PROLOG

NASIONALISME: RAGAM DAN RASA

Nasionalisme merupakan suatu sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nasionalisme merupakan paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Pengertian itu terasa sangat sempit. Pada era globalisasi ini, nasionalisme harus diterjemahkan dan ditafsirkan dalam berbagai dimensi. Nasionalisme bisa dilihat dari berbagai ragam dan dimaknai dengan berbagai rasa. Oleh karena itu buku ini mencoba membahas ragam dan rasa nasionalisme. Bab dalam buku ini diawali oleh tulisan **Mohammad Reevany Butami, PhD** dan **Rajih Arraki'** yang membahas tentang nusantaraisasi. Menurut mereka, wilayah dalam Kepulauan Melayu Nusantara memang sudah terpisahkan oleh negara-negara akibat penjajahan dan proses kemerdekaan. Dalam artian, negara-negara tersebut memang ingin merdeka dan menjadi negara yang berdaulat karena penindasan yang dilakukan oleh penjajahan. Ketika mereka sudah merdeka, maka paling tidak penjajah tidak akan seenaknya menerobos teritori kenegaraan. Tumbuhlah rasa dan jiwa kepemilikan pada negara atau nasionalisme pada masyarakat di setiap negara yang tercakup dalam Kepulauan Melayu Nusantara. Walaupun begitu, diskursus mengenai nasionalisme juga perlu untuk didalami agar kita juga tahu asal muasal dari nasionalisme itu sendiri. Kalau dilihat dari kacamata perjuangan elit, sebenarnya ideologi nasionalisme



sebagian besar bersumber dari dunia Barat. Kaum elit pribumi (dalam hal ini adalah para pemuda terpelajar yang berkesempatan bersekolah dengan sistem kolonial di Hindia dan Negeri Belanda) mempelajari ideologi ini dan terdidik dengan pendidikan Barat. Meskipun nasionalisme berhasil terwujud dengan terbentuknya Indonesia contohnya sebagai negara-bangsa, masyarakat di dalamnya yang berbeda-beda tidaklah berubah. Nasionalisme ini memunculkan elemen-elemen pembuat identitas baru sebuah masyarakat. Setelah sekian lama, muncul gagasan dan konsep Nusantara yang maksudnya sama dengan menyatukan negara-negara di Kepulauan Melayu Nusantara yang telah terpisah-pisah dikarenakan penjajahan. Dengan kata lain, Nusantara juga bertujuan untuk membentuk Nusantara yang baru, progresif, dan mengembalikan dimensi dan ruang bersama “lagi”. Uni-Eropa (*European Union* atau EU) terbukti mampu untuk terintegrasi dengan mayoritas negara dalam wilayahnya dan bisa menjadi patokan atau standar pengintegrasian negara-negara, meskipun masih ada beberapa kekurangan. Meski kesepaduannya bisa dipertikaikan dan berterusan dalam proses berintegrasi, namun Uni-Eropa merupakan kekuatan terbesar ketiga dunia setelah US dan China. ASEAN (*Association of Southeast-Asian Nations*) belum sampai pada tahap ini. Terakhir menurut mereka bahwa nusantarasi bukan untuk membubarkan negara-negara yang sudah ada, tapi untuk bergerak bersama melakukan dekolonisasi dengan cara yang konstruktif. Masih terkait dengan nusantarasi, **Dr. Oktaviana Purnamasari, Arya Zikri dan Noergawanti Syafitri** menampilkan ragam lain dari nasionalisme dalam karya sajak video nusantara. Penanaman semangat nasionalisme penting dan dapat dilakukan dengan berbagai cara agar tidak terpengaruh kebudayaan asing yang negatif. Berkaitan dengan puisi atau sajak, telah lama sajak menjadi medium untuk menumbuhkan sikap nasionalisme. Tercatat sejak sebelum kemerdekaan, sajak-sajak tentang perjuangan telah banyak dikumandangkan. Sajak-sajak yang menggambarkan tentang semangat nasionalisme juga hadir dengan terbitnya koran Masyarakat Baru pada masa awal kemerdekaan di Kalimantan

Timur. Sajak-sajak tersebut terdokumentasikan dengan baik dan dari hasil analisis menunjukkan bahwa semangat nasionalisme yang terdapat dalam sajak-sajak koran Masyarakat Baru dapat ditemukan dalam beberapa tema yakni cinta tanah air, jati diri bangsa dan semangat perjuangan. Nasionalisme yang termuat dalam bentuk sajak terus berkembang hingga kini, lebih dari tujuh dasawarsa setelah Indonesia merdeka. Dalam konteks perkembangan teknologi yang sudah semakin pesat, karya sastra khususnya sajak tak lagi hanya dipublikasikan dalam medium koran atau surat kabar, majalah, buku dan media cetak lainnya namun juga dalam platform audio visual. Tak terkecuali sajak-sajak yang dapat dikembangkan sebagai sarana menumbuhkan semangat nasionalisme di kalangan anak-anak muda. Salah satu asosiasi yang peduli dengan karya sajak adalah NUSA (Nusantara International Heritage Association). NUSA merupakan asosiasi yang didirikan berdasarkan kesepakatan dari lima universitas, yakni CenPRIS-Universiti Sains Malaysia, Universiti Sultan Zainal Abidin, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta & Prince Songkla University Thailand. Berawal dari program yang diinisiasi oleh Nusantara Malay Archipelago Research CenPRIS USM, yakni Lomba Video Sajak Nusantara, akhirnya berkembang dengan mengajak beberapa universitas guna membentuk sebuah asosiasi yang berusaha melestarikan warisan budaya Nusantara. NUSA menyelenggarakan Lomba Video Sajak, dengan tema utama Nusantara. Sedangkan tema yang lebih spesifik adalah tentang Alam, Merdeka, Persaudaraan dan tema lain yang terkait. Karya-karya video sajak yang menjadi peserta lomba sarat dengan semangat melestarikan warisan budaya Nusantara, dan video pemenang lomba sajak Nusantara memiliki muatan semangat nasionalisme yang tinggi. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka menjadi menarik untuk dikaji mengenai pemaknaan semangat nasionalisme dalam karya video sajak yang menjadi pemenang pertama Lomba Video Sajak Nusantara dengan judul *Tak Sedarah Bersaudara*. Pemenang pertama tersebut adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang menjadi representasi



generasi muda dengan semangat menggaungkan rasa nasionalisme lewat sajak. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi makna Nasionalisme dalam karya sajak video Nusantara dengan judul *Tak Sedarah Bersaudara*. Hasil analisis teks menggunakan metode semiotika Roland Barthes maupun dari hasil wawancara untuk triangulasi dapat dikatakan bahwa karya sajak video Tak Sedarah Bersaudara mengandung semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap Nusantara. Poin penting lainnya adalah bahwa semangat nasionalisme dapat dibentuk melalui inisiasi pembuatan karya sajak dalam format audio video yang diminati generasi muda sehingga dapat menjadi jembatan untuk mencintai negerinya. Mencintai negeri sebagai wujud nasionalisme memerlukan strategi pembentukan identitas nasional. Setali dengan gagasan tersebut, kini gagasan tentang nasionalisme dan kewarganegaraan global semakin menyadari bahwa kehidupan sebagai Negara bangsa tidak bisa sendiri dan perlu adanya aliansi dan kerjasama. Menurut **Dr Lusi Andriyani** bahwa gagasan nasionalisme dan kewarganegaraan global merupakan bukti bahwa setiap individu yang bersingungan dan berinteraksi dengan lingkungan akan selalu mengalami perkembangan. Interaksi dengan lingkungan pula yang mendorong individu untuk mendapatkan peran masing-masing yang menempatkan gagasan menjadi bingkai pembentuk individu. Kondisi mikro inilah yang akan mempengaruhi pandangan Individu tentang nasionalisme dan kewarganegaraan global. Kewarganegaraan global lebih dilihat sebagai konsepsi moral yang ada di dunia modern yang menuntut setiap individu untuk menerima dan mengikuti perkembangan secara bertanggungjawab. Narasi nasionalisme dan kewarganegaraan global di era modern semakin membangun kesadaran global dan keterlibatan individu. Kondisi ini menegaskan tentang tanggung jawab individu dalam pembentukan kewarganegaraan global. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan komitmen politik yang kuat dari semua individu di seluruh dunia dalam mewujudkan kewarganegaraan yang inklusif dan menciptakan tatanan dunia yang lebih baik. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa transformasi sosial dan mobilitas

manusia dapat digambarkan dengan dari dinamika perubahan pola hidup baik dari sisi demografi, geografis, budaya dan kondisi sosial ekonomi di negara-negara maju yang membuka ruang dalam membentuk kewarganegaraan global. Hadirnya gagasan tentang nasionalisme dan kewarganegaraan global dalam perkembangannya menempatkan individu sebagai agen yang tetap berusaha untuk mempertahankan hubungan individu yang berbasis konstitusional. Hal ini semakin mendorong menguatnya nasionalisme. Hadirnya isu dan kajian kewarganegaraan global juga menjadi hal penting dalam penciptaan tatanan global yang lebih damai. Konsep kewarganegaraan global tidak terlepas dari produktivitas budaya dan kesadaran manusia dalam menyikapi perkembangan kehidupan saat ini. Hadirnya kewarganegaraan global juga tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kapitalisme dan demokrasi serta perkembangan masyarakat sipil yang responsif terhadap dunia yang menjadi bagian dari tatanan budaya. Masih terkait dengan kewarganegaraan global, kini isu perkawinan global juga merupakan trend yang sangat menarik untuk dikaji. **Wanda Kiyah George Albert, PhD** dan **Adi Fahrudin, PhD** dalam tulisan mereka menyoroti perihal peningkatan imigrasi internasional dan proses koneksi antar budaya di berbagai Negara pada umumnya membuat beberapa tantangan sosial yang penting bagi nasionalisme. Berbanding isu nasionalisme dan globalisasi, isu perkawinan antara Negara (*transnational marriage*) kurang mendapat perhatian. Perkawinan antara Negara yang mereka maksudkan adalah perkawinan antara dua anak manusia, lelaki dan perempuan berbeda kewarganegaraan. Meskipun isu ini bukan baru sama sekali dalam kajian ilmu sosial, namun fokus kajian lebih banyak membicarakan perkawinan diantara imigran dengan penduduk setempat suatu Negara. Padahal masih banyak jenis perkawinan antar Negara yang terjadi tidak semata karena berstatus sebagai imigran suatu Negara. Ada banyak pula fenomena perkawinan yang melibatkan hubungan perkenalan dan percintaan melalui media sosial, perkawinan sesama pekerja profesional yang bekerja dalam dan di luar perusahaan, perkawinan sesama mahasiswa dari



dua Negara berbeda yang sedang belajar di suatu Negara. Mereka juga berkesimpulan bahwa praktik perkahwinan berlainan negara sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat di seluruh dunia terutamanya di negara barat dan juga timur. Berdasarkan kepada kajian-kajian terdahulu, terdapat cabaran yang dialami oleh pasangan daripada pelbagai negara terutamanya dari segi isu yang melibatkan silang budaya di dalam perkahwinan seperti kesukaran untuk komunikasi, tahap sokongan sosial yang lebih rendah, kepuasan perkahwinan rendah, konflik budaya, kadar perceraian tinggi dan gangguan perkahwinan. Masih menyangkut nasionalisme generasi muda, **Husmiati Yusuf, PhD** menyatakan bahwa generasi muda dan nasionalisme mengandung arti yang dalam. Generasi muda adalah generasi penerus yang diharapkan dapat menggantikan generasi sekarang dalam mengurus negara dimasa yang akan datang. Generasi muda yang ada saat ini dipersiapkan untuk menjadi generasi menjaga negara Indonesia. Untuk itu perlu ditanamkan rasa nasionalisme, rasa cinta dan rasa memiliki Indonesia. Namun ketrampilan dan kemahiran dalam mengakses informasi dengan cepat merupakan ciri khas generasi muda saat ini. Mereka dengan mudah mengadopsi berbagai informasi dari internet. Sehingga seringkali terjadi mereka terlibat masalah dikarenakan ketidakmampuannya dalam menyaring informasi yang diterima. Bagaikan makan buah simalakama, menjadi tidak gagap teknologi sudah merupakan tuntutan dijamin sekarang, akan tetapi dengan teknologi juga menyebabkan seseorang mengalami masalah. Tidak jarang generasi muda ini menggadaikan nasionalismenya karena salah menyaring informasi ini. Menyebarkan berita hoax, melakukan bisnis illegal seperti prostitusi online, menghasut atau bahkan membuat gambar meme yang jelas-jelas merupakan salah satu pertanda krisis rasa nasionalisme dikalangan generasi muda. Diperlukan sekali upaya-upaya untuk meningkatkan semangat nasionalisme pada generasi muda sebagai penerus bangsa ini. Upaya ini dilakukan dalam sistem berkelanjutan, dilakukan pembiasaan dan tidak hanya dilakukan satu atau dua kali saja. Setelah menyangkut strategi diatas maka patut kita pertanyakan

bagaimana nasionalisme pada generasi milineal. Menurut **Dr. Sakroni** bahwa dunia yang semakin terbuka akibat globalisasi telah membuat batas antara negara makin kabur. Sekat-sekat antara negara itu bahkan telah sirna dalam perdagangan dan perputaran ekonomi. Fenomena ini dapat memudahkan sikap nasionalisme dan merubah *mindset* generasi milenial Indonesia sehingga lupa akan budaya dan tradisi yang sudah diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Salah satu yang memengaruhi persoalan ini adalah banjirnya informasi bagi generasi milenial dengan kemudahan mengakses internet. Penyebaran informasi yang tidak sesuai dan tidak berimbang juga beredar dengan luas dan seolah-olah generasi milenial tidak peduli apakah hal tersebut akan berdampak bagi orang lain atau tidak, selama mereka menganggapnya sebagai sebuah trend untuk mendapatkan titel kekinian. Nasionalisme perlu ditanamkan kepada generasi milenial Indonesia karena mereka merupakan penerus tonggak perjuangan bangsa. Namun, saat ini nasionalisme pada generasi milenial di Indonesia mengalami ancaman terbesar karena banjirnya informasi yang didapatkan oleh generasi milenial yang disebabkan oleh kemudahan mengakses informasi di internet. Hanya saja, informasi itu menyajikan soal-soal kebangsaan secara banal. Mereka mudah mendapatkan informasi soal kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, dan Kebinekaan), tapi hanya sebatas informasi permukaan. Tak jarang hanya sekedar saling ejek-mengejek berupa meme. Dengan demikian rasa nasionalisme generasi muda akan terus ada dan berkembang. **Dr. Abu Huraerah** dengan nada yang sama menyoal generasi milenial di Era Society 5.0 dalam bingkai nilai-nilai nasionalisme. *Society 5.0* sendiri menjadi sebuah “solusi” dari Revolusi Industri 4.0, dimana masyarakat beranggapan bahwa Industri 4.0 akan menggunakan mesin-mesin berteknologi canggih yang akan menekan jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga manusia. *Society 5.0* ini diharapkan dapat menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi canggih dapat mengurangi kesenjangan antara manusia dengan masalah ekonomi ke depannya. Kecanggihan teknologi dan informasi di era *Society 5.0*, di satu sisi



dapat memberikan peluang yang lebih bermakna bagi kehidupan manusia, seperti mempercepat akses informasi, karena dunia yang semakin terkoneksi “tanpa batas” antara sistem yang satu dengan sistem yang lainnya. Namun, di sisi lain, hal tersebut membawa perubahan pada nilai-nilai baru yang relatif tidak terjadi di era sebelumnya yang menuntut manusia untuk dapat menciptakan ide-ide segar, aksi-aksi cepat, adaptasi yang fleksibel, dan inovasi yang kreatif. Mencermati hal tersebut, Abu Huraerah mengatakan bahwa generasi milenial adalah modal manusia (*human resource*) yang sangat penting dan strategis untuk menjawab tantangan perubahan nilai-nilai baru tersebut. Hal ini adalah selaras dengan nilai-nilai nasionalisme yang perlu dikonstruksi pada generasi milenial, seperti tekad yang kuat, kecintaan terhadap tanah air, kesadaran yang tinggi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, serta memiliki kerelaan untuk berkorban demi bangsa dan negaranya. Selain itu, generasi milenial perlu mengembangkan ide-ide yang kreatif dan inovatif, serta membangun visinya jauh ke depan (*visioner*) demi kemajuan bangsanya. Dalam konteks yang lebih luas, mereka harus senantiasa adaptif terhadap perubahan global, terutama perubahan teknologi dan informasi yang sangat cepat. Mereka juga perlu membangun jaringan kerja dan kolaborasi yang luas dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mempermudah dan mempercepat proses pembangunan bangsa, baik pembangunan fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Hal ini mengajarkan kepada kita betapa penting pembentukan karakter nasionalisme seperti yang diutarakan oleh **Meiti Subardhini, PhD**. Menurut beliau, nilai nasionalisme merupakan suatu sikap akan kecintaan individu terhadap bangsa atau negaranya. Wujud dari sikap nasionalisme tersebut dapat berupa sikap ingin membela tanah air dalam melindungi penguasaan dari bangsa asing. Nilai nasionalisme ini salah satunya ditentukan oleh pembentukan karakter. Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (*virtues*) yang diyakininya dan digunakannya sebagai landasan untuk cara

pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Lingkungan yang positif dapat membentuk pribadi berkarakter positif, sebaliknya lingkungan yang negatif dan tidak sehat bisa membentuk pribadi yang negatif. Dalam penyiapan generasi muda sebagai sumber manusia berkualitas yang mampu bersikap bijaksana dalam menyikapi globalisasi dapat dilakukan melalui pembentukan karakter. Karakter merupakan kualitas moral dan mental seseorang yang pembentukannya dipengaruhi oleh berapa faktor. *Pertama pola asuh*, dimana pola asuh tua yang baik dapat membentuk, membimbing dan mengarahkan anak-anak mereka agar dapat menempatkan diri dengan baik di lingkungan sekitarnya, sehingga mereka bisa berkembang dengan semestinya dalam bergaul di tengah masyarakat. *Kedua kognitif*, merupakan unsur penting dalam pembentukan karakter karena di dalamnya terdapat seluruh program yang terbentuk dari pengalaman hidupnya, yang merupakan pelopor segalanya. Program ini kemudian membentuk sistem kepercayaan yang akhirnya dapat membentuk pola berpikir yang bisa mempengaruhi perilakunya. Jika program yang tertanam tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran universal, maka perilakunya berjalan selaras dengan hukum alam. Hasilnya, perilaku tersebut membawa ketenangan dan kebahagiaan. Sebaliknya, jika program tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip universal, maka perilakunya membawa kerusakan dan menghasilkan penderitaan. *Ketiga lingkungan*, adalah kesatuan dengan segala sesuatu ruang, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilaku yang mempengaruhi kelangsungannya. Ada empat lingkungan dalam pembentukan karakter yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan alam. Keempat lingkungan tersebut saling berperan penting dalam pembentukan karakter seorang anak karena dalam lingkungan tersebut banyak mengandung pembelajaran baik secara langsung atau tidak langsung. Menurut **Dian Din Astuti Mulia & Laila Meiliyandrie Indah Wardani, PhD** bahwa persoalan nasionalisme juga menyangkut bagaimana strategi pembentukan identitas nasional Bhineka Tunggal Ika salah satunya



melalui *influencer millennial*. Bhineka Tunggal Ika merupakan suatu semboyan yang mengakui kesamaan derajat dari fenomena budaya yang beragam. Ungkapan tersebut menunjukkan suatu keinginan yang kuat untuk mengakui perbedaan tapi sekaligus memelihara kesatuan atas dasar pemeliharaan keragaman, tidak dengan menghapus atau mengingkari keragaman tersebut. Di antara berbagai cara untuk mewujudkan masyarakat multikultur dan mengembalikan bhineka tunggal ika ke arasnya adalah dengan menggunakan peran *influencer millennial*. Advokasi penerapan model mutual differensial Bhineka Tunggal Ika melalui *influencer millennial* merupakan salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan akibat konflik keberagaman di Indonesia. Influencer dalam platform media sosial yang mampu mempengaruhi tindakan pada komunitas dengan minat yang sama. Opini seorang *influencer* memiliki kekuatan pendorong (*motivating force*) dalam mempengaruhi komunitas dengan memanipulasi suatu *tren* agar diikuti oleh *network* mereka. Terakhir mereka berpendapat bahwa sangat perlu untuk membentuk suatu komunitas yang berisikan *influencer online* yang sebelumnya diberikan proses pelatihan dan pembimbingan. *Influencer online millennial* diberikan project dalam membuat konten mengenai model mutual differensial Bhineka Tunggal Ika sesuai kreativitas mereka. Manakala **Dr. Istiana Hermawati & Wardo** memaparkan hasil penelitian mengenai spirit perjuangan dan nasionalisme di kalangan veteran pejuang kemerdekaan Indonesia. Menurut mereka bahwa nasionalisme dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dikenal sebagai sebuah kata sakti yang mampu membangkitkan spirit berjuang melawan penindasan yang dilakukan oleh kaum kolonialisme terhadap bangsa Indonesia selama ratusan tahun lamanya. Veteran pejuang merupakan seorang patriot yang rela berkorban jiwa, raga, harta dan benda untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Para pejuang ini memiliki nilai-nilai kepahlawanan yang menjadi elemen penting dalam membentuk dan menanamkan sikap nasionalisme bagi generasi muda penerus cita-cita bangsa. Nasionalisme ini akan mengantarkan warga negara, khususnya generasi muda sebagai

orang yang tangguh dalam melaksanakan pembangunan dan dalam memecahkan permasalahan bangsa, termasuk di dalamnya permasalahan kesejahteraan sosial. Berdasar pengukuran terhadap nilai-nilai kepahlawanan, terdapat empat indikator nilai atau sikap yang paling menonjol (dalam kategori baik) yaitu: rela berkorban, bertanggungjawab, militansi dan semangat juang yang tinggi. Sedangkan lima indikator lain (gagah berani, percaya pada kemampuan sendiri, berwibawa, berkepribadian kuat dan bercita-cita tinggi) dalam kategori baik dan cukup. Implementasi nilai-nilai kepahlawanan responden terlihat dari spirit yang besar dari responden sehingga masih mampu bekerja atau berkarya, meskipun telah berusia lanjut. Pejuang veteran memiliki pekerjaan selaras dengan kondisi/kemampuan fisik masing-masing dan keterampilan yang dikuasai. Pekerjaan responden dapat dikelompokkan menjadi empat jenis yaitu jasa, berdagang, bertani, dan beternak. Seperti telah dijelaskan pada pengantar buku ini bahwa ragam dan rasa nasionalisme telah mengalami perubahan seiring dengan perubahan waktu. Persoalan nasionalisme juga berkaitan dengan perubahan iklim, **Tria Patrianti** menjelaskan bahwa perubahan iklim tidak saja mengancam keberadaan setiap negara bangsa dalam bentuknya yang sekarang: tradisi, budaya, dan lanskap sendiri. Saat ini, bumi yang suhunya lebih hangat tiga atau empat derajat, mungkin akan menjadi gurun dari kelompok pengungsi yang kelaparan karena pemanasan global. Itulah gambaran dunia yang akan didiami oleh anak-anak kita nanti. Ini akan menjadi berbeda jika setiap umat manusia bersama-sama melakukan perubahan mendasar, demi kelangsungan hidup yang ideal di masing-masing negaranya. Namun, jika tidak ada upaya serius, mempertahankan keberlangsungan kehidupan dari ancaman perubahan iklim, maka umat manusia akan terdampak di seluruh aspek kehidupannya. Nasionalisme untuk merawat bumi, tempat berlindung setiap makhluk hidup, perlu dikembangkan agar rasa cinta pada tanah air sebagai tempat hidup satu-satunya yang didiami umat manusia, dapat dijaga dari suhu yang memanas dan merusak seluruh ekosistem di bumi. Nasionalisme dapat ditumbuhkan untuk



menjaga kenaikan emisi dan merawat bumi. Namun, umat manusia tidak akan dapat bertindak sendiri dalam menyelesaikan masalah iklim kecuali bergandengan tangan untuk tujuan bersama. Semua keyakinan individu yang berbasis agama, keyakinan politik, dapat menjadi medium untuk tujuan bersama; menurunkan emisi dan menyelamatkan bumi. Nasionalisme juga berkaitan dengan kewirausahaan. Menurut **Dr. Ida Hindarsah** bahwa wirausaha secara makro menjadi semangat nasionalisme yang terus harus digali dan ditumbuhkan, karena nasionalisme itu seorang individu mengintegrasikan perasaan dan kecintaannya pada negara kebangsaan dan kunci utamanya adalah bagaimana mencapai tujuan dari bangsa ini yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Bentuk kecintaan bisa diimplementasikan dalam banyak hal dan salah satunya adalah sebagai pejuang ekonomi bangsa. Kewirausahaan saat ini telah menjadi salah satu pilihan dalam mempertahankan dan melangsungkan kehidupan yang menantang jiwa-jiwa kreatif para pelaku usahanya. Masih menurut beliau, kewirausahaan menjadi salah satu pilihan dalam mempertahankan dan melangsungkan kehidupan yang lebih baik, apalagi kebutuhan semakin besar dan lapangan pekerjaan yang semakin sempit, sehingga perlu dipersiapkan generasi *entrepreneur*. Oleh karena itu untuk menciptakan para *entrepreneur* dibutuhkan kepribadian yang tangguh dan mandiri. Peran pemerintah sangat penting untuk turut serta dalam menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan ekonomi yaitu meningkatkan pendapatan per kapita negara, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan dan menyetarakan taraf hidup penduduk, meningkatkan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan investasi negara, mengurangi kemiskinan, menciptakan keadilan dan kemakmuran dalam bermasyarakat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan. Tentunya untuk mendorong tujuan ini perlu para nasionalis sejati yang siap membangun negaranya.

Nasionalis sejati di era sekarang salah satunya melalui terciptanya para wirausaha-wirausaha yang sukses. Pada bagian terakhir, masih menyoal nasionalisme dalam dimensi lain khususnya menyangkut UU Cipta Kerja. **Dr. Suryanto** menyatakan bahwa Nasionalisme dalam ekonomi tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah dalam menetapkan strategi pembangunan. Bila pemerintah berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang cepat maka pilihan bagaimana mengundang investor akan menjadi prioritasnya. Investasi adalah salah satu pintu bagi daerah atau suatu negara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Investasi menyebabkan peningkatan belanja barang dan jasa baik untuk belanja barang modal maupun barang konsumsi. Bila terjadi peningkatan belanja modal dan atau belanja konsumsi tentu akan melahirkan turunan kegiatan-kegiatan baru. Dalam terminologi ekonomi sering disebut sebagai *multiplier effect* (angka pengganda investasi). Investasi dalam bidang properti misalnya akan melahirkan permintaan yang meningkat dalam hal bahan bangunan (semen, pasir, besi, dan lain-lain). Permintaan semen yang meningkat akan memungkinkan peningkatan permintaan bahan baku untuk semen, peningkatan jumlah tenaga kerja. Banyak sektor selain properti yang juga akan ikut merasakan dampak positif dari investasi dalam bidang properti. Selain dampak positif tentu setiap investasi bisa menimbulkan dampak negative pada kerusakan lingkungan jika tidak ada pengawasan yang ketat. Lebih lanjut **Dr Suryanto** menyoroti beberapa perbedaan dalam pengelolaan lingkungan yang dikhawatirkan tujuan mempermudah investasi oleh pemerintah justru akan berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat lokal. Pengintegrasian perizinan lingkungan ke Perizinan Berusaha menyebabkan pelaku usaha tidak perlu mengurus banyak perizinan yang kadang sangat kompleks dan menyulitkan. Namun juga berdampak pada potensi pelanggaran izin lingkungan. Dalam hal ini maka pelibatan masyarakat dan penentuan kriteria risiko juga akan sangat signifikan dalam pengelolaan lingkungan. Penyebutan masyarakat yang terkena dampak langsung seakan-akan membatasi peran masyarakat dari unsur lainnya misalnya pemerhati lingkungan, baik sebagai individu maupun organisasi. Jadi fungsi kontrol dari berbagai lapisan masyarakat akan kelestarian lingkungan



dapat berkurang. Hal ini menimbulkan kekhawatiran publik atas terbatasnya akses untuk mendapatkan informasi dan partisipasinya dalam uji kelayakan lingkungan hidup. Investasi yang tinggi tapi merusak lingkungan juga tinggi justru merugikan pada kesejahteraan masyarakat. Ekternalitas negatif dari adanya investasi sering kali tidak diperhitungkan oleh pengambil kebijakan. Hancurnya ekosistem atau keanekaragaman hayati sering dinolkan. Oleh karena itu maka berhati-hatilah dalam memberikan kemudahan investasi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin masyarakat menjadi sejahtera, pengangguran menurun, kemiskinan berkurang, dan ketimpangan akan menurun. Bagaimana bila akhirnya investasi yang masuk dengan dalih efisiensi maka kemudian tenaga kerja lokal digantikan dengan tenaga kerja asing. Bagaimana bila akhirnya atas nama investasi maka sumber penghidupan masyarakat menjadi tergusur dan harus pergi entah ke mana. Nasionalisme dalam pengelolaan lingkungan yang baik akan menjamin pembangunan menjadi lebih adil untuk semua lapisan masyarakat.

Bab 1

NUSANTARASASI: TEORI DEKOLONISASI NEGARA DAN PENGUATAN NASIONALISME DI NUSANTARA

Mohammad Reevany Bustami & Rajih Arraki'

Centre for Policy Research & International Relations, Universiti Sains Malaysia

NUSANTARA KITA (Versi Suntingan pendek)

Oleh: Mohammad Reevany Bustami

Ini Tanahairku

Ini Tanahairmu

Inilah Nusantara kita

Dari Patani ke Sulawesi...ini Nusantara kita

Dari Kedah ke Ketapang...ini Nusantara kita

Dari Serba Jadi ke Spratly...ini Nusantara kita

Dari Putra Jaya ke Irian Jaya... ini juga Nusantara kita

Dari Sabang sampai Marauke sampailah ke Filipina...ini tanah Nusantara

Dari Rote sampai ke Miyangas ke utara lagi ke Nagara Campa...ini wilayah Nusantara

Dari Martapura ke Singapura...ini tetap Nusantara

Dari Mindanao ke Minangkabao...inilah Nusantara kita



Dari Banda Aceh ke Bandar Seri Begawan...ini kerajaan Nusantara
Darulsalam gelar kedua-duanya

Samudra itu tanah kita

Tanah itu samudra kita

Air dan tanahnya Tanahair Nusantara

Kerajaan Brunei, Kerajaan Melaka, Kerajaan Majapahit itu
pemerintahan Nusantara

Sejarah Funan, Laos, Ayuthia itu... sejarah Nusantara

Kerajaan Langkasuka itu kerajaan tua utara Nusantara

Lembah bujang juga Nusantara

Benua Sunda, Pentas Sunda peradaban awal Nusantara

Solo, Siak, Sambaliung, semuanya Nusantara

Bali, Borneo, Batangas memang Nusantara

Merong Mahawangsa itu Nusantara

Sunan Ampel... dan kesemua wali songo itu... Nusantara

Hang Tuah itu Nusantara

Raja Solo itu Nusantara

Keturunan kita, keluarga Jawi...dari Nabi berdarah mulia

Akar warisan kita, benua Sunda...peradaban Atlantis pra-sejarah

Identiti kita, mahawangsa Melayu...rumpun tertua di tanahairnya

Benar kata Sasterawan Nusantara Pak Usman Awang

Mahawangsa Melayu itu terkandung Bugis, Jawa, Banjar,
Minangkabau, Acheh, Jakun, Sakai

Bahkan terbukti persaudaraannya dalam DNAny

Justeru dalam sejarah tersebar istilahnya

di Indochina, Melayu Champa...

Cape Malays... di Selatan Afrika

Sri Lankan Malays...di Pulau Sri Lanka

Hanya apabila perampok kolonial, perompak penjajah pendatang memecahkan kita,

kita lupa bahawa kita serumpun, sedarah, sekeluarga...

Janganlah kita terus dipermain dan dijajah mereka

Kenali, ingatlah identitas dan asal usul kita.

Apa itu Nusantara?

Secara bahasa, Nusantara berarti antara-nusa atau antara kepulauan. Nusantara atau bahasa saintifik-geografinya, *Malay Archipelago* bermakna Kepulauan Melayu. Ia adalah habitat masyarakat Nusantara yang merupakan bangsa bahari karena memiliki pengalaman historikal kolektif samudera dan wilayah perairan yang luas. Mahawangsa rumpun Melayu di Nusantara memiliki hubungan secara tanah dan samudera sehingga muncul istilah "tanahair". Ini berbeda dengan konsep 'homeland' yang lebih terbatas kepada tanah. Konstruksi 'homeland' tanahair bukan saja merujuk kepada tanah tetapi juga air yang merangkumi gagasan imajinasi gabungan tanah dengan air di gunung, mata air dan air terjun, di alur, lubuk dan danau, di sungai, lembah, selat dan laut, serta di pulau, seberang dan semenanjung.

Nusantara biasa diidentikkan dengan seluruh wilayah dan pulau-pulau Melayu di Asia Tenggara dan telah menjadi negara-negara yang berdiri sendiri seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Filipina. Kata Nusantara juga sudah digunakan saat Majapahit melakukan penaklukan secara luas ke pulau-pulau di luar Jawa. Sekarang masyarakat Indonesia sering mengatakan bahwa nama lain dari Indonesia adalah Nusantara (karena terdiri dari kepulauan yang disatukan). Ia juga bisa diartikan sebagai kepulauan yang membentuk alam Melayu (Ishak, 2009). Sebenarnya, interpretasi tentang Nusantara masih menjadi hal yang bisa diperbincangkan lebih dalam, bahkan diperdebatkan. Hal ini dikarenakan banyaknya interpretasi masyarakat, khususnya di Kepulauan Melayu Nusantara (Nusantara Malay



Archipelago), yang berbeda-beda mengenai Nusantara itu sendiri. Mungkinkah Nusantara itu adalah konstruksi geografis, sejarah, sosial-budaya, ras biologis, etnis atau kesukuan, ekonomi politik, spiritual, pembangunan, peradaban atau bahkan gabungan dari semuanya? Meskipun demikian, Nusantara sering dikaitkan dengan konsep wilayah, yakni merujuk kepada sebuah ruang geografi dan elemen-elemen di dalamnya.

Mendalami lagi diskusi ini, apakah Nusantara itu adalah ruang yang menjadi perebutan dan kontestasi paradigma, naungan atau identitas? Kalau ruang kita ini dirangkul dan dilabeli sebagai *Asia-Pacific*, justru Amerika Serikat akan termasuk dalam konstruksi ini, malahan dalam konteks ini Amerika Serikat dikatakan sering berkeinginan untuk berperanan sebagai “big brother” atau pusatnya. Bisa dikatakan bahwa konstruksi ini bersifat US Sentris (contohnya dahulu apabila beberapa negara di Nusantara tergabung dalam APEC atau TPP yang mana pendiri atau pusat kekuatannya adalah Amerika Serikat). Meskipun demikian, tidak dinafikan bahwa kontestasi pusat bisa muncul dikarenakan adanya kekuatan baru yang timbul dan menjadi semakin kuat seperti China. Dinamika gagasan Nusantara tidak banyak dibahas di dalam diskursus *Asia-Pacific*.

Apabila kita hilangkan istilah *Pacific*, dalam konstruksi Asia saja, ruang dan gagasannya didominasi oleh kekuatan besar seperti China, Jepang dan juga India; maka Nusantara tidak menjadi sorotan; barangkali juga komunitas dan negara di Nusantara dilihat dari kaca mata sebagai perlintasan saja antara dua blok besar Asia Selatan dan Asia Timur. Setiap paradigma spasial (*spatial*) mempunyai *loci of power* atau pusat kekuasaan yang dominan. Apabila konstruksi ruangnya China Sentris, maka muncullah istilah dan perspektif Jalur Sutera (*silk road*) yang lama dan yang baru, Laut China Selatan atau BRI (*Belt and Road Initiative*). Dalam konteks ASEAN, pusat dominannya terletak di founding members atau negara-negara pengasas atau pendiri dan juga negara yang semakin meningkat kekuatan ekonomi politiknya, namun jarang juga Nusantara menjadi wacana atau *discourse mainstream*.

Gagasan ASEAN punya persamaan dengan gagasan negara-bangsa. Apabila ditingkatkan dalam ranah negara dan hubungan internasional, yang timbul adalah Negara Sentris (*nation-centric*). Negara Sentris sering menjurus ke nasionalisme kenegaraan atau kepentingan negara seperti Thailand, Singapura, Indonesia dan Malaysia. Sehingga, acapkali kepentingan negara itu berbasis kesatuan *individual nation-state* dan bukannya kesatuan dan warisan kolektif “tadisional” atau pra-kolonial seperti Nusantara. Sekiranya wujud, kepentingan kolektif itu selalunya bersifat sekunder dan dirangkaikan dalam konteks memajukan kepentingan negara sebagai kesatuan individu, barulah kemudian kesatuan kolektif. Tetapi di manakah paradigma dan gagasan *Civilizational-Centric* (Peradaban Sentris) yang memberi keberlanjutan sebuah peradaban Nusantara?

Paradigma-paradigma ini semuanya, secara sosial atau secara proses yang berkelanjutan, sangat bisa membentuk bagaimana masyarakat di Nusantara mendefinisikan siapa diri mereka, apa yang mereka miliki, siapa yang memiliki ruang Nusantara, siapa yang punya hak atas wilayah Nusantara, kepentingan mereka dan posisi kepentingan mereka dibanding kepentingan masyarakat lain. Ambil contoh dulu yang hampir berhasil, yaitu TPP/TPPA yang US Sentris. Tergabungnya negara dalam TPP berarti secara tidak langsung memilih untuk tunduk dan ikut bagaimana US bersikap dalam hal perdagangan. Nasionalisme yang terbentuk dalam konteks ini seringkali tidak merdeka karena masih dalam bayangan kolonialisme bercampur cengkaman penjajahan ekonomi baru.

Pada artikel ini, Nusantara dimaknai dan diangkat bukan sekedar wilayah geografis, tapi juga ekonomi-politik, sosial-budaya, perbatasan dan ruang sejarah. Ia juga berkaitan erat dengan konsep *archipelago* yang terdiri dari kepulauan serta lautan. Wilayahnya juga sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, jauh sebelum masa penjajahan. Termasuk dalam Nusantara ialah Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand Selatan dan bagian tertentu di Indochina seperti Champa.



Komunitas Nusantara juga berkembang ke Madagaskar dikarenakan asal usul masyarakatnya yang merupakan persebaran dari *Sundaland*. Bahkan hingga Cape Town di Afrika Selatan yang ada dikarenakan warga Nusantara dikirim atau diusir oleh Belanda dari Sulawesi. Sheikh Yusuf Tajul Khalwati atau Sheikh Yusuf Al-Makassari dari Makassar bersama 49 orang pengikutnya diusir dari Sulawesi Selatan ke Cape Town, Afrika Selatan pada tahun 1694 oleh Belanda pada masa penjajahan (Jappie, 2012). Perjalanan ke Cape Town dilakukan dengan melalui Banten dan Sri Lanka. Mereka membangun masyarakat muslim yang pertama serta masjid di Afrika Selatan. Secara etnis atau suku, Sheikh Yusuf dan pengikutnya adalah orang Makassar. Kawan-kawannya ada yang dari Bugis, Jawa, bahkan Minang. Tapi, mereka semua lebih dikenal dengan "*Cape Malays*" karena masyarakat Nusantara menyebut diri mereka "Melayu". Bugis, Jawa dan Minang adalah suku, adapun mahawangsa rumpun mereka ialah Melayu. Dekonstruksi identitas mahawangsa Melayu dan disintegrasi keserumpunan terjadi mulai zaman kolonial hingga pasca-kolonial, dipicu lagi dengan agenda pembangunan identitas negara bangsa dan nasionalisme. Dari sisi ini juga, nasionalisme yang terbangun memerlukan dekolonisasi sehingga esensi Nusantara dibangkitkan untuk menguatkan nasionalisme dan jatidiri.

Nusantara dan Nasionalisme

Wilayah dalam Kepulauan Melayu Nusantara memang sudah terpisahkan oleh negara-negara akibat penjajahan dan proses kemerdekaan. Dalam artian, negara-negara tersebut memang ingin merdeka dan menjadi negara yang berdaulat karena penindasan yang dilakukan oleh penjajahan. Ketika mereka sudah merdeka, maka paling tidak penjajah tidak akan seenaknya menerobos teritori kenegaraan. Tumbuhlah rasa dan jiwa kepemilikan pada negara atau nasionalisme pada masyarakat di setiap negara yang tercakup dalam Kepulauan Melayu Nusantara.

Walaupun begitu, diskursus mengenai nasionalisme juga perlu untuk didalami agar kita juga tahu asal muasal dari nasionalisme

itu sendiri. Kalau dilihat dari kacamata perjuangan elit, sebenarnya ideologi nasionalisme sebagian besar bersumber dari dunia Barat. Kaum elit pribumi (dalam hal ini adalah para pemuda terpelajar yang berkesempatan bersekolah dengan sistem kolonial di Hindia dan Negeri Belanda) mempelajari ideologi ini dan terdidik dengan pendidikan Barat. Meskipun nasionalisme berhasil terwujud dengan terbentuknya Indonesia contohnya sebagai negara-bangsa, masyarakat di dalamnya yang berbeda-beda tidaklah berubah. Nasionalisme ini memunculkan elemen-elemen pembuat identitas baru sebuah masyarakat yang terlepas dari keprimordialannya (Lohanda, 2019). Kemudian, muncullah rasa kepemilikan yang kuat akan bangsa dan negara serta keinginan untuk bebas dari penjajah.

Kebebasan sebuah masyarakat dalam menentukan nasib mereka sendiri merupakan sikap dari nasionalisme. Keinginan ini adalah imbas dari penjajahan yang sangat pahit, dengan waktu yang lama dan menjatuhkan martabat kemanusiaan. Tujuan nasionalisme adalah kehidupan berbangsa yang bebas. Salah satu dasar negara Indonesia misalnya, UUD 1945, menyebutkan “Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya” menjadi bukti bahwa mempunyai negara sendiri adalah usaha agar terlepas dari penjajahan (Zuhdi, 2014). Masa penjajahan Belanda ke Indonesia telah memperlihatkan praktik penindasan, pembodohan serta ketidakadilan (Zuhdi, 2014). Dengan perginya pemerintah kolonial, esensi kemerdekaan adalah di antara nasionalisme dengan rasa kolonial atau nasionalisme yang didekolonisasi yaitu kemerdekaan dengan membangkitkan kembali Nusantara sebagai roh jatidiri dan sebagai substansi pembangunan masyarakat serta rakyat.

Nusantarasisasi (*Nusantarazation*) sebagai Teori Dekolonisasi

Dekolonisasi adalah usaha-usaha atau strategi melepaskan diri dari kekuasaan kolonial baik dari budaya, birokrasi bahkan politik (Capan, 2017). Formulasi *Nusantarazation* atau Nusantarasisasi



sebagai Teori Dekolonisasi berkaitan penting dengan melihat ke dalam hal-hal yang berkaitan dengan peninggalan-peninggalan masa-masa kolonial seperti sistem sosial-politik dan lain yang menjadi peninggalan penjajahan. Lensa analisisnya harus digunakan untuk mengevaluasi “penjajahan” itu sendiri. Meskipun ada penjajah yang “mungkin” atau yang dikatakan berniat baik dan memberikan manfaat untuk masyarakat lokal yang dijajah seperti sistem pendidikan, dekolonisasi tetap perlu menjadikan kerusakan, eksploitasi dan penaklukan sebagai fokus utama. Jika tidak, maka akan terjadi perdebatan tak berguna tentang “Siapakah penjajah yang banyak memberi manfaat? Siapakah yang paling kejam? Apakah Inggris atau Belanda atau Jepang?” Padahal, fakta sejarah mengatakan bahwa penjajah itu adalah perampok, pembunuh dan pemerkosa masyarakat lokal, baik secara nyata maupun kiasan. Tusukan dan racun siapa yang lebih membinasa itu suatu diskursus dan pemikiran yang kurang bijak dan mungkin bertujuan untuk menghibur diri atau bersimpati terhadap diri sendiri.

Melakukan dekolonisasi memori masa penjajahan dan pasca penjajahan melalui Nusantarasasi adalah hal terpenting. Ini bukan tentang siapa penjajah yang “lebih baik” sehingga memberikan keuntungan pada masyarakat masa kini. Yang seharusnya menjadi fokus pembahasan dan perdebatan kritis adalah “Bagaimana jika seandainya penjajahan itu tidak terjadi?” dan “Bagaimana jika penjajah tak melakukan invasi, menindas dan menyabotase lintasan pertumbuhan masyarakat lokal, budaya dan lembaga-lembaga bentukan masyarakat lokal?”. Satu lagi yang penting. Apa saja cara yang bisa ditempuh untuk dekolonisasi dan memacu pertumbuhan masyarakat lokal setelah mengalami penjajahan di masa lalu?

Nusantarasasi perlu dilakukan dengan tujuan agar pertukaran ilmu pengetahuan dan sinergitas antara intelektual dan budaya dapat terjadi dengan lebih cepat. Ia juga bertujuan untuk membangkitkan semangat dan kesadaran kepemilikan atas masyarakat dan wilayah Nusantara yang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, jauh sebelum masa penjajahan. Hanya saja, lintasan jalannya peradaban masyarakat Nusantara tersebut terputus dan terbajak saat Barat

datang dan melakukan penjajahan. Penjajahan telah meninggalkan banyak hal pada tanah jajahannya, dalam hal ini adalah wilayah Nusantara. Penjajahan yang dilakukan Barat telah melemahkan hal-hal yang sudah dimiliki secara bersama oleh masyarakat di Nusantara, yaitu wilayah, solidaritas, sejarah, identitas, kemanusiaan, kehormatan, kedaulatan spiritual dan tujuan.

Maka dari itu, muncullah usaha-usaha untuk merdeka dari penjajah dengan menjunjung tinggi semangat nasionalisme. Nasionalisme yang murni adalah dekolonisasi yang berusaha untuk menuju kebebasan sebagai masyarakat yang bernegara. Nasionalisme juga bisa menjadi bentuk Nusantarasisasi yang berwujud proses membangun ulang, mengklaim ulang dan memberdayakan ulang diri kita pada masa pasca kemerdekaan. Hal ini bisa mendekolonisasi nasionalisme dan masyarakat Nusantara sendiri. Justru, mendekolonisasi nasionalisme berarti membebaskan pembentukan negara bangsa dari bayangan dan acuan kolonial dan meneruskan kebangkitan jatidiri dan kekuatan Nusantara. Berlatarbelakangkan rasionalitas ini, Nusantarasisasi diangkat sebagai teori dekolonisasi atas Kepulauan Melayu Nusantara dan ruang-ruang dan elemen-elemen dalamnya. Sebagai kerangka konsep awal, Teori Dekolonisasi Nusantarasisasi (*Nusantarazation Decolonizing Theory*) ini mempunyai 5 dimensi utama yaitu:

- a) Dekolonisasi Identitas (*Decolonization of identity*)
- b) Dekolonisasi Sejarah (*Decolonization of history*)
- c) Dekolonisasi Wilayah (*Decolonization of territory*)
- d) Dekolonisasi Bahasa (*Decolonization of language*)
- e) Dekolonisasi Budaya dan Warisan (*Decolonization of culture and heritage*)

Pada artikel ini, penjelasan akan difokuskan pada dekolonisasi identitas, sejarah serta wilayah. Nusantarasisasi ini sama dengan menyatukan negara-negara di Kepulauan Melayu Nusantara yang telah terpisah-pisah dikarenakan penjajahan. Dengan kata lain, Nusantarasisasi juga bertujuan untuk membentuk Nusantara yang



baru, progresif, dan mengembalikan dimensi dan ruang bersama “lagi”. Uni-Eropa (*European Union* atau EU) terbukti mampu untuk terintegrasi dengan mayoritas negara dalam wilayahnya dan bisa menjadi patokan atau standar pengintegrasian negara-negara, meskipun masih ada beberapa kekurangan. Meski kesepaduannya bisa dipertikaikan dan berterusan dalam proses berintegrasi, namun Uni-Eropa merupakan kekuatan terbesar ketiga dunia setelah US dan China. ASEAN (*Association of Southeast-Asian Nations*) belum sampai pada tahap ini. Nusantarasaki bukan untuk membubarkan negara-negara yang sudah ada, tapi untuk bergerak bersama melakukan dekolonisasi dengan cara yang konstruktif.

Dekolonisasi Identitas

Pembahasan tentang identitas memang agak sensitif karena ia melekat di hati dan pikiran masyarakat. Salah satu cara efektif dari strategi *divide and rule* adalah mengidentifikasi variasi atau perbedaan identitas bercampur yang diberi tanda penghubung (-) dari penduduk asli dan melanggengkan identitas partikularistik ini sampai titik yang cukup untuk melonggarkan identitas yang bersatu. Orang Eropa memiliki istilah untuk menggambarkan diri mereka sendiri, yaitu orang Eropa atau “European”. Begitu juga dengan orang Amerika atau “American” di AS dan “Cina” di China. Nusantara terkadang menggunakan kata ,serumpun’. Tetapi ,serumpun’ berarti satu suku atau ras atau etnis, yaitu satu kata umum. Itu bukan nama identitas, seperti orang Eropa.

Salah satu dampak terbesar penjajahan adalah memisahkan masyarakat asli pada level kesadaran sosial mereka akan konstruksi dan rekonstruksi identitas. Bukan berarti masyarakat itu tidak punya identitas suku. Memang suku itu merupakan bagian utama dari identitas sosial dan merupakan hal penting untuk menentukan siapa mereka dan dari mana mereka berasal. Tetapi penjajahan Nusantara baik secara langsung maupun tidak langsung telah memisahkannya. Istilah asal yang digunakan masyarakat Nusantara untuk mendeskripsikan diri mereka adalah “Melayu”. Inilah identitas mereka. Identitas ini sama pentingnya dengan

identitas suku mereka. Nusantara juga disebut kepulauan Melayu (*Malay Archipelago*) karena identitas yang satu ini dan identitas yang terintegrasi.

Penjajahan Nusantara telah mengakibatkan disintegrasi identitas. Nusantara terdiri dari banyak kerajaan yang memiliki sub identitas yang berbeda-beda, namun masih menjadi bagian dari kepulauan Nusantara. Ruang konsep kepulauan, samudera dan daratan ini mencakup pulau dan kepulauan di Filipina, Kalimantan, Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaysia, juga Pattani dan Thailand Selatan dan hingga ke beberapa wilayah Indochina. Tetapi, pada masyarakat pasca-kolonial, kata Melayu di dalam diskursus yang mainstream, selalu dihubungkan dengan salah satu etnis asli dari suatu negara, yaitu Malaysia atau orang-orang yang tinggal dan berketurunan di wilayah tertentu di Sumatera, Johor, Riau, dan sebagian Kalimantan. Dalam fakta sejarah, nama “Malaysia” pernah diusulkan untuk dipakai oleh Filipina sebagai nama negara mereka. Hal ini bisa difahami karena mereka juga berbangsa Melayu (*Malay*), meski Filipina terdiri dari banyak suku seperti Bicolano, Visayans, Tagalog dan Kapampangan, namun semuanya bermahawangsa Melayu.

Dekolonisasi identitas penduduk asli Nusantara berarti mengenali berbagai identitas sub-etnis serta satu kesatuan identitas dan yang lebih penting adalah menyatukan kembali keduanya secara bermakna dan memberdayakan. Sangat penting untuk menggunakan lagi nama ‘Melayu’ sebagai identitas tunggal yang bersatu sambil memperkuat dan melengkapi signifikansi identitas sub-etnis. “Melayu” atau “Mahawangsa Melayu” harus diintegrasikan ke dalam diri pribumi Nusantara sebagai identitas yang memayungi atau bersatu atau bersama. Karenanya, misalnya, anggota komunitas Nusantara juga dapat mengakui diri mereka sebagai orang Sunda dengan tetap mengakui jati diri mereka sebagai Melayu-Sunda, seperti halnya orang Johor menjadi Melayu-Johor. Secara teknis, identitas sebegini bisa digabungkan lagi dengan identitas lainnya lantaran memperkayakan lagi identitas warga Nusantara. Justru dalam kasus orang Johor, beberapa orang



mungkin memilih untuk diketahui sebagai “Jawa-Melayu-Johor” seperti halnya “Pujakesuma” yang membawa arti “Putra Jawa Kelahiran Sumatera”. Sayogyanya, ini bisa menjurus kepada satu identitas “*hyper-hyphanated*”/“*multi-layered*” (tanda hubung berlapis-lapis) seperti kue lapis Nusantara. Misalnya, seorang warga Malaysia yang dikenali sebagai etnis Brunei tinggal di negara bagian Sabah; orang tersebut bisa dikatakan sebagai orang “Melayu-Brunei-Sabah-Malaysia”. Identitas ini merangkumi elemen suku, provinsi, negara dan Nusantara. Pokoknya identitas Nusantara harus diangkat untuk menyatukan komunitas Nusantara dan memunculkan kekayaan identitas pribumi Nusantara. Makanya penting sementara kita memperkaya dan mengakar-bumikan identitas individu, identitas penyatu “Melayu” seharusnya jadi satu penyebutan umum, seperti juga untuk menegaskan “European”, “Arab” and “African”. Nasionalisme dan identitas nasional itu sangat penting justru harus diperkuat dengan meNusantarakan nasionalisme dengan kesadaran keserumpunan identitas kita bersama. Identitas nasional yang didekolonialisasikan malah akan menjadi lebih bermakna dan bertunjangkan kekuatan sejarah apabila dihidupkan kembali elemen Nusantaranya.

Dekolonisasi Sejarah

Sejarah masyarakat Nusantara bukan dimulai dari kemerdekaan masing-masing negara. Sebenarnya, Nusantara sudah ada semenjak sebelum datangnya penjajahan ke bumi Nusantara. Sejarah kita harus dipahami melalui kerangka Nusantara. Kerajaan-kerajaan pada masa lalu juga merupakan bagian dari sejarah Malaysia, bagian dari pra sejarah dan juga *Sundaland*. Tidak membandingkan penjajah mana yang lebih baik. Tidak bermindset kalau kita tidak bisa mengembangkan dan membangun masyarakat kita secara kelembagaan tanpa kehadiran penjajah. Kita pernah menjadi satu Nusantara dan para penjajah memecah kita menjadi beberapa bagian yang berbeda (dalam banyak hal, negara dan perbatasan yang kita tinggali ini merupakan produk dari penjajahan)

Stephen Oppenheimer, ilmuwan Oxford dan pernah menjadi Professor kunjungan di Universiti Sains Malaysia, menjelaskan mengenai sejarah dari Nusantara dalam bukunya yang berjudul *Eden in the East* berdasarkan kacamata sejarah, arkeologi, oseanografi, genetika, linguistik dan cerita-cerita rakyat. Terbukti bahwa pada 16.000 tahun yang lalu sebelum berakhirnya zaman es, Asia Tenggara merupakan wilayah yang besar dan luas, bahkan dua kali lipat dari India dengan sebutan *Sundaland* atau Bumi Sunda.

Bumi Sunda atau *Sundaland* ialah wilayah yang terdiri dari Semenanjung Melayu, Sumatera, Jawa, dan juga Kalimantan yang pada zaman dahulu masih berupa satu daratan luas (Ishak, 2009). Di daratan *Sundaland* ini, sudah lahir peradaban-peradaban. Sayangnya, pada akhir zaman es, *Sundaland* terendam banjir bandang yang sangat besar karena naiknya permukaan air. Alhasil, banyak masyarakat *Sundaland* bermigrasi ke bukit dan pergunungan serta ke pulau-pulau yang berjauhan dan terpisah-pisah. Begitulah *Sundaland* berakhir dan menjadi “Surga yang hilang” atau *the lost Eden* (Oppenheimer, 1999). Nusantara lahir dari *Sundaland*.

Masyarakat *Sundaland* (atau juga dikenali sebagai Pentas Sunda) berpindah ke utara (Taiwan dan China), ke selatan (Selandia Baru dan Pulau Chatham), ke timur (kepulauan Pasifik, Pulau Easter, Pulau Hawaii dan pulau-pulau di bagian timur), dan ke barat (Madagaskar dan Pantai Timur Benua Afrika). Mereka akhirnya menjadi penduduk asli di tempat-tempat yang mereka tinggali tersebut (Ishak, 2009). Sekarang, yang tersisa dari *Sundaland* adalah kepulauan dan disebut Kepulauan Melayu Nusantara.

Nusantara memiliki akar sejarah dan budaya yang banyak. Kepulauan Melayu Nusantara terlahir dari *Sundaland* dan juga Sumpah Palapa. Namun, setelah itu penjajah datang dan menguasai tanah air Nusantara selama berabad-abad. Maka dari itu, melestarikan dan menguatkan sejarah bersatunya Nusantara ini amatlah penting demi melepaskan nilai-nilai penjajahan yang telah ditinggalkan oleh Barat di bumi Nusantara.



Dekolonisasi Wilayah

Terdapat hal-hal penting yang berperan mendorong terbentuknya negara bangsa. Salah satunya adalah Perjanjian Westphalia, dan puncaknya adalah Piagam PBB. Itu semua mengarah pada terjadinya konsolidasi politis untuk terbentuknya negara bangsa (Dubey, 2017). Konsep negara bangsa Westphalia menjadi salah satu aspek kunci sistem sosial-politik pemerintahan dan kemudian dibawa oleh penjajah di Nusantara. Ia berciri Eropa serta menjunjung tinggi kedaulatan negara. Alhasil wajar jika ada keinginan untuk membentuk negara sendiri-sendiri. Konsep negara bangsa yang terpaksa oleh perbatasan Westphalian seperti ini harus difikir ulang dan didekolonisasi dalam bingkai yang membawa perdamaian.

Asal muasal Westphalia Barat dapat ditelusuri ke perjanjian Westphalia (atau Westfalen) tahun 1648, di mana kematian delapan juta orang, secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh perang agama Eropa, dihentikan melalui serangkaian negosiasi dan perjanjian damai. Perjanjian ini berkembang menjadi apa yang dapat disebut sebagai paradigma Westphalia Barat. Intinya ia menciptakan wilayah negara dan tatanan antar negara dengan perbatasan dan kekuasaan untuk menguasai dan mengatur apapun yang ada di dalam batas-batas wilayahnya. Ini memberi legitimasi untuk melindungi wilayah berdasarkan batas negara.

1. Strategem Penjajah dalam Melakukan Kolonisasi

Penjajah Nusantara memmanifestasikan dirinya ke dalam 3 bentuk Stratagem:

- 1) **Strategem #1: Memecah Kekuasaan Lokal dan Menciptakan Keretakan Kepemimpinan.** Strategem pertama menargetkan pada posisi-posisi puncak. Tujuannya adalah menimbulkan keretakan di dalam atau antar kerajaan. Caranya, bergabung dalam kekuatan tertentu, eksploitasi celah kepemimpinannya, buat celah jika tidak ditemukan celah, bisa juga merekayasa keretakan dengan menggunakan *power* eksternal, bisa juga kombinasi semua cara tersebut. Sebagai contoh, saat

penjajahan Belanda di Indonesia, Belanda menggandeng Raja Mataram Kasunanan Kartasura yaitu Sultan Amangkurat III yang sedang berkonflik dengan pamannya, Pangeran Puger. Dalam prosesnya, VOC (Belanda) ikut campur di dalamnya (Raditya, 2018b).

2) **Strategem #2: Memisahkan Masyarakat Lokal dan Melemahkan Solidaritas Sosial.** Mirip dengan Strategem pertama, tetapi menarget pihak eksternal istana, dan lebih banyak pada rakyat biasa serta elit lokal yang bekerja bersama masyarakat. Ini adalah stratagem dengan kekuatan bercabang. Sebagai contoh, VOC pernah membantu Kerajaan Bone melawan Kerajaan Gowa untuk lepas dari wilayahnya karena kekuatan militer VOC sangatlah kuat. Alhasil, Kerajaan Gowa mengalami kekalahan (Sahajuddin, 2017). Kemudian terjadilah perjanjian Bongaya yang isinya sangat merugikan Kerajaan Gowa, termasuk memonopoli perdagangan di wilayahnya, juga mengatur akses keluar masuk orang-orang dari luar, sampai membatasi gerak warga Gowa untuk berlayar (Raditya, 2018a). Strategem ini sering kali mencakup hal-hal yang berpotensi memecah belah yang akan mempengaruhi demografi dan solidaritas lokal termasuk:

- a. Membawa masuk orang luar, khususnya pekerja migran (dengan cara pemaksaan atau tidak),
- b. Melokalisir bangunan-kelembagaan entitas dan ideologi asing, seperti sistem pendidikan asing, operasi medis atau bahkan lembaga keagamaan dan rumah peribadatan,
- c. Perkawinan antar penjajah dan masyarakat lokal,
- d. Perekrutan tertarget pada masyarakat lokal yang kooperatif (terkadang memeras mereka),
- e. Membangun daerah khusus dengan pengaruh luar atau asing,
- f. Pemisahan (seperti menempatkan orang luar di jalan-jalan perkotaan atau perkebunan pedesaan tertentu) semua dalam rangka untuk lebih melemahkan kapital



sosial masyarakat lokal, sembari memosisikan untuk penaklukan lebih lanjut

- 3) **Strategem #3: Membangun sistem pemerintahan kolonial negara berprinsip Westphalian bergaya barat dan menciptakan perbatasan yang memecah belah agar dapat membatasi wilayah.** Ini merupakan kelanjutan dari yang kedua, bahkan bukannya melanjutkan, justru tumpang tindih. Tujuannya ialah membangun sistem pemerintahan kolonial untuk menggantikan atau menundukkan sistem pemerintahan lokal. Otoritas, legitimasi serta sistem pendukungnya dilemahkan dengan cara menerapkan sistem atau gaya Westphalian dan demarkasi wilayah. Sebagai contoh, penjajah Belanda saat menjajah Indonesia, setelah melakukan penundukan terhadap pemimpin-pemimpin lokal, mereka melakukan monopoli wilayah dan ada batas-batas yang diatur sehingga siapapun tidak bisa sembarangan memasuki wilayah jajahan mereka.

2. **Filosofi Mandala**

Hal ini mengacu pada sistem pemikiran yang ada di Arthashastra karya Kautilya (322-298 SM), yang merupakan salah satu acuan pemikiran dalam hubungan internasional. Pemikiran ini mengasumsikan bahwa Raja atau pemimpin negara adalah aktor dominan yang mempromosikan negaranya yang dibantu oleh para menteri. Pemikiran ini mirip dengan asumsi hubungan internasional klasik yaitu "tetangga anda adalah musuh anda dan tetangga anda adalah teman anda". Teori Mandala berpedoman pada istilah 'Rajadharma' (Kebenaran Raja) dan 'Nitishastra' (Etika) dengan perilaku etis yang menjadi ciri kebijakan internal dan eksternal negara. Model ini digunakan pada zaman Majapahit.

3. **Pemerintahan Wilayah Mandala Nusantara**

Konsep ini berlawanan dengan konsep kewilayahan gaya Westphalia Barat. Batas kewilayahannya tidak mutlak dan dikendalikan oleh pusat-pusat pemerintahan dengan lingkup

wilayah yang memang saling tumpang tindih serta seringkali dibagikan tanggungjawabnya. Penekanannya ialah pada hubungan dan kesetiaan antar pusat pemerintahan, bukan hanya sekedar geografis. Gaya Westphalia telah menghilangkan unsur ruang bersama (*commons/ruang publik*), karena konsep Mandala Nusantara ini secara tidak langsung telah menciptakan ruang bersama. Dampaknya, muncul batas-batas di wilayah Nusantara, termasuk laut. Setelah penjajah pergi, terbentuklah kedaulatan negara berbasis perbatasan.

4. Masalah Kewarganegaraan akibat Batas Negara

Masalah perbatasan yang diwariskan oleh penjajah terjadi hingga hari ini. Contohnya, oleh karena filosofi Westphalian, komunitas di desa terapung di Sabah, meski sudah ada selama beberapa generasi, dan aktivitasnya di perairan yang telah menjadi wilayah Filipina dan Malaysia, kewarganegaraannya mereka menjadi tidak jelas, sehingga muncul fenomena *stateless people* atau komunitas tanpa kewarganegaraan. Di sini contoh di mana nasionalisme kita perlu didekolonisasi supaya komunitas yang seperti ini tidak terpinggir atau teraniya.

Satu lagi kasus ialah sungai Golok atau Sungai Kolok (dalam Bahasa Thai) yang dijadikan perbatasan Malaysia dan Thailand. Menyeberang sungai yang hanya sederhana menggunakan sampan hanya butuh beberapa menit; namun bisa jadi satu insiden atau fenomena ilegal karena telah menjadi wilayah yang berbeda antar seberang sungai. Padahal di sepanjang sungai ini ada kampung-kampung yang banyak warganya sekeluarga dan bersaudara. Penjajah British memisahkan mereka dan peninggal colonial Westphalian ini terus membawa kerumitan kepada kesepaduan dan ketenteraman masyarakat kampung dan kerabat yang sudah ada sebelum penjajahan, lebih lebih dalam krisis pandemi COVID 19 dan yang melibatkan kasus penyeludukan barang ilegal.

Di pulau Kalimantan pula, muncul 'keanehan' di Sarawak dan provinsi-provinsi Kalimantan di Indonesia yang berbatasan



negara. Ada warga yang rumahnya terbagi di dua negara karena tepat di wilayah perbatasan. Dapurnya di Malaysia dan ruang tamunya di Indonesia. Ini masih terjadi sampai sekarang (Kumparan.com, 2019).

5. Lalu, dari manakah kita bisa memulai diskursus tentang dekolonisasi wilayah?

Meski banyak cara dan tingkatan dekolonisasi, banyak orang mungkin berpendapat bahwa hal ini mustahil terjadi. Dekolonisasi wilayah mungkin akan tidak mudah. Kabar buruknya, sebagian besar cara dan tingkatannya sulit untuk diterima dan diterapkan dalam kondisi politik dan keamanan masa kini serta dalam sistem negara-bangsa. Kendati demikian, sebenarnya ada perubahan dan transformasi yang bisa dimodelkan dan digali lebih lanjut dalam titik-titik masuk berikut:

- a. Titik masuk pertama: Penyatuan negara-negara di Kepulauan Melayu Nusantara. Ini bisa menjadi salah satu puncak dekolonisasi wilayah. Pemerintah dan masyarakat mungkin tidak akan mengharapkan ini terjadi saat ini. Tapi, lebih baik tidak dikesampingkan sebagai salah satu hal yang bisa terjadi di masa depan di bawah struktur pemerintahan Nusantara. Sebagaimana US terinspirasi dan mengambil model dari struktur konfederasi Indian, maka negara-negara di Nusantara bisa mencari solusi yang mengakar dengan kearifan lokalnya
- b. Titik masuk kedua: Formalisasi atau pelebagaan pengakuan dan hak istimewa. Sikap pengakuan terhadap anggota masyarakat Nusantara, seperti: Visa, ID khusus yang diakui oleh negara anggota Nusantara (dengan kesepakatan *Government to Government*) dengan hak-hak istimewa tertentu seperti melamar pekerjaan dengan waktu yang lebih singkat. Ini adalah contoh me-Nusantarasi-kan visa dan mobilitas warga Nusantara. Ini juga merupakan usaha menusantarakan sembari juga menegakkan nasionalisme

- c. Titik masuk ketiga: Penciptaan Nusantara “Baru” milik bersama. Ini adalah bentuk konkrit dari perdamaian dan kemakmuran bersama dan sebagai bentuk pengembangan dari Kerjasama yang dilakukan saat ini. Penjajahan telah memecah Nusantara. Dengan proses Nusantarasaki ini, akan muncul usaha menstabilkan, mensinergikan dan memperkuat perdamaian dan kemakmuran bagi negara-negara yang masuk dalam Nusantara. Melalui usaha Nusantarasaki ini. negara-negara bisa bergotong royong untuk membangun wilayah demi menciptakan kemakmuran, seperti eksplorasi minyak. Seperti halnya kita bisa mendirikan wilayah federal, kita juga bisa mendirikan ruang kemakmuran bersama untuk Nusantara, bagian-bagian tertentu dari puncak gunung hingga ke laut. Pendekatan ini bisa mengurangi dan mencegah ketegangan perbatasan yang telah muncul dan yang mungkin muncul seperti kasus Ambalat dan konflik sepertinya (Maksum dan Bustami, 2014). Akhirnya, masyarakat Nusantara bisa menikmati menjadi warga Nusantara di wilayah persatuan Nusantara. Hal ini bisa dilakukan di kota-kota perbatasan, laut, pulau atau wilayah udara khusus yang ditentukan.
- d. Titik masuk keempat: Pembentukan *multi or binational institution*. Menusantarakan nasionalisme akan memungkinkan negara-negara membentuk *binational* atau *trinational institution* khususnya yang akan membantu mempromosikan solidaritas dengan kuat dan juga rasa kepemilikan. Diantaranya ialah pendidikan dan institusi kebudayaan seperti Dewan Bahasa dan Pustaka, kerjasama universitas-universitas (contoh: Jaringan Universitas di Nusantara di setiap Propinsi dengan tenaga pengajar dan mahasiswanya yang berasal dari negara-negara di Nusantara), rumah media dan institusi berbasis agama (seperti penubuhan Lembaga Nusantara *Islamic Finance* dan Lembaga Sertifikasi Halal Nusantara). Eksploitasi dan sensasi isu perhubungan Indonesia-Malaysia oleh media



juga bisa dikurangkan (Bustami dan Maksum, 2016; Maksum dan Bustami, 2014). Pengembangan atau perluasan konsep Nusantara. Nusantarasaki bukan sekedar kajian akademis yang abstrak, tapi bisa menjadi Langkah konkrit perbaikan jembatan yang terputus akibat penjajahan. Pada titik masuk yang ini, dilakukan pengonseptualisasian kembali kota-kota perbatasan dan wilayah-wilayah tak berpenghuni. Bisa dimulai dengan pengelolaan bersama area tertentu serta lembaga (dengan patroli keamanan bersama), bereksperimen dengan pendidikan sistem ganda, atau bahkan kewarganegaraan ganda di beberapa kota.

- e. Titik masuk kelima: Dekolonisasi pola pikir, komunikasi dan narasi. Tujuannya adalah membalikkan pola pikir dari paradigma kolonial ke paradigma merdeka. Kalau dahulu narasinya “Ya sudah, memang wilayahnya terpisah”, diubahkan ke semangat merdeka dengan menyebarkan dan berbagi visi Nusantara. Caranya adalah dengan mengarusutamakan diskursus wilayah Nusantara sebagai wacana dalam buku-buku sejarah, sosial media dan bahkan debat resmi. Hal ini dilakuan hingga diskursus Nusantara benar-benar menjadi pembahasan dan konstruksi pengalaman sehari-hari bagi negara dan seluruh penduduknya. Inilah inti menusantarakan dan memerdekakan nasionalisme dari cengkraman kolonialisme.

Daftar Pustaka

- Ali Maksum dan Reevany Bustami, *Ketegangan Hubungan Indonesia-Malaysia Dalam Isu Tarian Pendet*, *Kajian Malaysia: Journal of Malaysian Studies*, 2014, 32, 2, 41-72
- Ali Maksum and Reevany Bustami, *The 1965 coup and reformasi 1998: two critical moments in Indonesia-Malaysia relations during and after the Cold War*, SpringerPlus, 2014, 3, 45, 1-9

- Capan, Z. G. (2017). Decolonising International Relations? *Third World Quarterly*, 38(1), 1–15. <https://doi.org/10.1080/01436597.2016.1245100>
- Dubey, M. (2017). The Nationalism Debate: Past and Present. *Indian Journal of Public Administration*, 63(1), 1–12. <https://doi.org/10.1177/0019556117689853>
- Ishak, M. A. (2009). *Tamaddun Alam Melayu* (Second edi; A. Mansur, Ed.). Kuala Lumpur: Mohd Arof Ishak.
- Jappie, S. (2012). JAWI DARI JAUH. *Indonesia and the Malay World*, 40(117), 143–159. <https://doi.org/10.1080/13639811.2012.683675>
- Kumparan.com. (2019). Rumah Unik di Perbatasan, Dapur di Malaysia, Ruang Tamu di Indonesia - kumparan.com. Retrieved November 8, 2020, from <https://kumparan.com/berita-heboh/rumah-unik-di-perbatasan-dapur-di-malaysia-ruang-tamu-di-indonesia-1rgvzIwxvZG>
- Lohanda, M. (2019). Nasionalisme Indonesia dan Pembentukan Nasion. *Antropologi Indonesia*, 86–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.7454/ai.v0i15.10504>
- Mohammad Reevany Bustami & Ali Maksum (2016), Why Are We Angry at Them? Satu Analisis Matriks Berkembar G-MP bagi Hubungan Indonesia-Malaysia, Universitas Indonesia Publications.
- Oppenheimer, S. (1999). *Eden in the East*. London: Phoenix.
- Raditya, I. N. (2018a). Sejarah Perjanjian Bongaya: Cara Belanda Lemahkan Kesultanan Gowa. Retrieved January 14, 2021, from Tirto.id website: <https://tirto.id/sejarah-perjanjian-bongaya-cara-belanda-lemahkan-kesultanan-gowa-c951>
- Raditya, I. N. (2018b). Watak Buruk & Kekejaman Raja yang Berkuasa Singkat, Amangkurat III - Tirto.ID. Retrieved November 8, 2020, from <https://tirto.id/watak-buruk-kekejaman-raja-yang-berkuasa-singkat-amangkurat-iii-cJqj>
- Sahajuddin, S. (2017). AKHIR PERSEKUTUAN BELANDA DENGAN KERAJAAN BONE ABAD XIX. *Walasuji : Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 8(1), 57–70. <https://doi.org/10.36869/wjsb.v8i1.105>



Subagyo. (2012). Pengembangan Nilai Dan Tradisi Gotong Royong Dalam Bingkai Konservasi Nilai Budaya. *Indonesian Journal of Conservation*, 1(1), 61–68.

Zuhdi, S. (2014). *Nasionalisme: Laut dan Sejarah* (H. Junisar, Ed.). Depok: Penerbit Komunitas Bambu.

Bab 2

NASIONALISME DALAM KARYA SAJAK VIDEO NUSANTARA

Oktaviana Purnamasari, Arya Zikri & Noergawanti Syafitri

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Pendahuluan

Nasionalisme merupakan hal yang esensial dalam membentuk karakter suatu bangsa. Rasa nasionalisme yang tumbuh dalam diri individu akan menjadi landasan untuk mencintai tanah air. Manifestasi kecintaan tersebut adalah perbuatan-perbuatan baik guna menjaga, membangun dan melakukan yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nasionalisme mengandung dua arti yakni paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri; sifat kenasionalan serta kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu; semangat kebangsaan (KBBI, 2016).

Nasionalisme juga diartikan sebagai suatu sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah. Sikap dan perilaku nasionalisme harus dimiliki warga negara, dengan mematuhi aturan yang berlaku, mematuhi hukum negara, serta melestarikan budaya Indonesia. Perilaku nasionalisme lainnya adalah dengan



menciptakan dan mencintai produk dalam negeri, serta bersedia melakukan aksi nyata membela negara (Welianto, 2019).

Di tengah gempuran budaya global, nasionalisme menjadi isu esensial. Generasi muda Indonesia penting untuk mendapatkan nilai-nilai keteladanan guna membangkitkan rasa nasionalisme dalam diri mereka. Tanpa dilandasi dengan rasa nasionalisme, semangat untuk berkarya dan bersatu untuk membangun negeri tidak akan pernah tercipta. Era globalisasi menjadi tantangan tersendiri guna menanamkan nilai-nilai dan semangat nasionalisme pada generasi muda. Budaya global memang tidak sepenuhnya buruk, namun kebanggaan akan budaya sendiri menjadi penting untuk ditanamkan sebagai landasan pembentukan nasionalisme. Meskipun globalisasi dianggap sebagai stimulus lahirnya kesadaran nasionalisme di awal-awal tahun pergerakan kemerdekaan Indonesia (Hudaya, 2019) namun globalisasi masa kini membawa konsekuensi pada penanaman nilai-nilai nasionalisme di kalangan generasi muda.

Berbagai penelitian menjelaskan bagaimana penanaman semangat nasionalisme penting dan dapat dilakukan dengan berbagai cara agar tidak terpengaruh kebudayaan asing yang negatif (Affan, 2016). Merujuk pada kajian yang pernah dilakukan berkaitan dengan cara menumbuhkan semangat nasionalisme di kalangan generasi muda, di antaranya dapat dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan (Dewirahmadanirwati, 2019), peningkatan pemahaman ideologi Pancasila (Saputro, 2016), sinema konseling sufistik dengan melalui pemutaran film (Farmawati, 2019), serta pembelajaran puisi untuk meneladani semangat para pejuang (Ardianto, 2019).

Berkaitan dengan puisi atau sajak, telah lama sajak menjadi medium untuk menumbuhkan sikap nasionalisme. Tercatat sejak sebelum kemerdekaan, sajak-sajak tentang perjuangan telah banyak dikumandangkan. Sastrawan Angkatan '45, berbeda halnya dengan Angkatan Pujangga Baru, lebih mementingkan realitas isi puisi daripada keindahan bahasa. Chairil Anwar sebagai tokoh pujangga angkatan '45 banyak menyuarakan semangat nasionalisme dalam karya sajaknya. Bersama Rivai Apin dan Asrul

Sani, mereka menerbitkan kumpulan sajak Tiga Menguak Takdir yang menggambarkan suasana sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia (Saptoyo, 2020). Sajak-sajak yang menggambarkan tentang semangat nasionalisme juga hadir dengan terbitnya koran Masyarakat Baru pada masa awal kemerdekaan di Kalimantan Timur. Sajak-sajak tersebut terdokumentasikan dengan baik dan dari hasil analisis menunjukkan bahwa semangat nasionalisme yang terdapat dalam sajak-sajak koran Masyarakat Baru dapat ditemukan dalam beberapa tema yakni cinta tanah air, jati diri bangsa dan semangat perjuangan. Dengan demikian para penyair Kalimantan Timur telah meletakkan esensi semangat nasionalisme dalam karya-karya mereka (Hariyanto, 2014).

Nasionalisme yang termuat dalam bentuk sajak terus berkembang hingga kini, lebih dari tujuh dasawarsa setelah Indonesia merdeka. Dalam konteks perkembangan teknologi yang sudah semakin pesat, karya sastra khususnya sajak tak lagi hanya dipublikasikan dalam medium koran atau surat kabar, majalah, buku dan media cetak lainnya namun juga dalam platform audio visual. Tak terkecuali sajak-sajak yang dapat dikembangkan sebagai sarana menumbuhkan semangat nasionalisme di kalangan anak-anak muda. Salah satu asosiasi yang peduli dengan karya sajak adalah NUSA (Nusantara International Heritage Association). NUSA merupakan asosiasi yang didirikan berdasarkan kesepakatan dari lima universitas, yakni CenPRIS-Universiti Sains Malaysia, Universiti Sultan Zainal Abidin, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta & Prince Songkla University Thailand. Berawal dari program yang diinisiasi oleh Nusantara Malay Archipelago Research CenPRIS USM, yakni Lomba Video Sajak Nusantara, akhirnya berkembang dengan mengajak beberapa universitas guna membentuk sebuah asosiasi yang berusaha melestarikan warisan budaya Nusantara.

NUSA menyelenggarakan Lomba Video Sajak, dengan tema utama Nusantara. Sedangkan tema yang lebih spesifik adalah tentang Alam, Merdeka, Persaudaraan dan tema lain yang terkait. Karya-karya video sajak yang menjadi peserta lomba sarat dengan



semangat melestarikan warisan budaya Nusantara, dan video pemenang lomba sajak Nusantara memiliki muatan semangat nasionalisme yang tinggi. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka menjadi menarik untuk dikaji mengenai pemaknaan semangat nasionalisme dalam karya video sajak yang menjadi pemenang pertama Lomba Video Sajak Nusantara dengan judul *Tak Sedarah Bersaudara*. Pemenang pertama tersebut adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang menjadi representasi generasi muda dengan semangat menggaungkan rasa nasionalisme lewat sajak. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi makna Nasionalisme dalam karya sajak video Nusantara dengan judul *Tak Sedarah Bersaudara*.

Konsep Nusantara

Nama Nusantara berasal dari masa Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Istilah Nusantara sering disebut untuk menggambarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Indonesia. Padahal istilah Nusantara dalam konteks politik di masa Kerajaan Majapahit mengacu pada sumpah Palapa yang diucapkan oleh Maha Patih Gajah Mada, di mana ia menyebut wilayah-wilayah yang akan ditaklukkan oleh Majapahit. Sumpah Palapa yang sangat terkenal tersebut berbunyi:

“Jika telah mengalahkan Nusantara, saya (baru akan) melepaskan puasa. Jika mengalahkan Guru, Seram, Tanjung Pura, Pahang, Dompom Bali, Sunda, Tumasik, demikian saya (baru akan) melepaskan puasa.”

Merujuk pada hal tersebut, kawasan Nusantara terdiri dari rangkaian pulau yang terdapat di antara Benua Asia dan Australia, termasuk Semenanjung Malaya. Wilayah-wilayah itulah yang disebut Majapahit sebagai Nusantara. Berabad-abad lamanya setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit, istilah Nusantara kembali dipopulerkan oleh tokoh pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara. Terminologi Nusantara, yang terdiri dari kata *nusa* yang berarti pulau dan *antara* atau seberang, menjadi alternatif nama *Nederlandsch Oost-Indie* atau Hindia Belanda (Nailufar, 2020).

Konsep lain tentang Nusantara dikemukakan oleh NUSA (Nusantara International Heritage Association) yang menyatakan bahwa Nusantara merupakan wujud keserumpunan dari berbagai wilayah dan negara-negara yaitu Filipina Selatan, Thailand Selatan, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, sebagian dari Papua dan Singapura. Keserumpunan ini merupakan penyatuan wilayah yang terwujud saat Gadjah Mada berhasil menyatukan wilayah-wilayah tersebut dengan semangat Sumpah Palapa. Disebut serumpun karena secara fisik, bahasa dan wilayah tidaklah jauh berbeda, hanya dibedakan oleh status kenegaraan. Warisan budaya Nusantara sangat kaya, dengan berbagai suku yang beragam. Semakin derasnya arus informasi dan masuknya budaya Barat di tengah maraknya isu globalisasi memunculkan semangat untuk kembali melestarikan warisan budaya Nusantara. Salah satu cara yang dilakukan oleh NUSA adalah dengan menyelenggarakan kompetisi Video Sajak Nusantara yang pesertanya adalah generasi muda dari berbagai negara di antaranya Malaysia, Indonesia dan Thailand.

Semangat Nasionalisme

Lembaga Survei Indonesia (LSI) menemukan, mayoritas masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi nasionalisme. Identitas nasional atau nasionalisme warga Indonesia jauh lebih kuat dibandingkan identitas keagamaan dan kesukuan. Temuan ini diperoleh dari hasil survei LSI pada 8 sampai 17 September 2019 yang melibatkan 1.550 responden (Farisa, 2019). Semangat nasionalisme yang tinggi pada masyarakat Indonesia cukup menggembirakan. Berdasarkan sebuah penelitian, terdapat hubungan yang signifikan antara pemahaman tentang Ideologi Pancasila dengan Sikap Nasionalisme berbangsa dan bernegara (Saputro, 2016). Sementara itu penelitian lain mengenai sikap nasionalisme pada mahasiswa di sebuah perguruan tinggi swasta di Yogyakarta cukup tinggi dan positif dengan rata-rata persentase 73% dengan menggunakan indikator pengetahuan tentang cinta tanah air, kemandirian, dan multikulturalisme; perasaan cinta tanah air; dan kemauan untuk cinta tanah air, kemandirian, dan multikulturalisme (Kurnia, 2016).



Tak Sedarah Bersaudara, Sajak dengan Semangat Nasionalisme

Pada artikel ini karya video sajak yang dipilih untuk dibahas berjudul *Tak Sedarah Bersaudara*. Video sajak ini menjadi pemenang pertama Lomba Video Sajak Nusantara yang diselenggarakan oleh NUSA pada tanggal 16 Oktober 2020 sekaligus meraih Anugerah Video Paling Kreatif dan Anugerah Video Sajak Berkualitas. Metode yang digunakan guna memaknai isi sajak ini adalah Semiotika Roland Barthes yang mengkategorikan makna menjadi makna denotatif, konotatif dan mitos. Teknik analisis data menggunakan analisis teks guna mencari makna Nasionalisme yang ada pada video sajak Nusantara. Uji keabsahan data dengan triangulasi sumber, yakni mewawancarai dua informan yang merupakan pencipta sajak. Berikut adalah petikan sajak Tak Sedarah Bersaudara yang mengandung muatan semangat Nasionalisme:

Sebercak air dalam vena membekas di atas kertas

Berisi jejak tidak tampak

Tidak juga abstrak

Semesta! Izinkan permata berkilau abadi

Memberi pelita agar persada tetap ada

....

Namun perlahan, ku mulai paham

Bahwa tak perlu sedarah untuk menjadi saudara

Tak perlu se-*iya se-kata* untuk bisa seirama

Hanya perlu asa dan rasa, untuk terus jalan bersama

Nusantara, tak ada habisnya ruang rindu untuknya

Merekah alam sejuta pesona

Merayu dalam semburat jingga

Saat sepi menepi Ku kan kembali merajut mimpi

Menjagamu dengan segenap jiwa sepenuh doa

Untukmu, Nusantara

Menurut Budiman (2011) signifikasi melalui pendekatan semiotika Barthes menekankan pada konsep tentang konotasi dan denotasi sebagai sebuah kunci analisisnya. Barthes mendefinisikan tanda (sign) sebagai sebuah sisten yang terdiri dari (E) sebuah ekspresi atau signifier dalam hubungannya (R) dengan content atau signified (C): ERC. Dengan demikian metode Barthes tidak hanya berhenti dalam mengamati makna tanda dengan membedah penanda dan petanda. Bagi Barthes pemaknaan tersebut merupakan pemaknaan pada lapisan pertama yakni tataran denotasi. Sehingga perlu pisau analisis mendalam untuk memperhatikan pemaknaan pada lapisan kedua yakni tataran konotasi dan akhirnya tanda dalam level pertama dilakukan petanda kembali dan menimbulkan tanda kedua yakni mitos dalam masyarakat. Konotasi menurut Barthes justru mendenotasikan sesuatu hal yang ia nyatakan sebagai mitos, dan mitos ini mempunyai konotasi terhadap ideologi tertentu (Hartono & Hidayatullah, 2019).

Tabel 1. Makna Video Sajak Tak Sedarah Bersaudara (Analisis Semiotika Roland Barthes)

Shot	Dialog/suara/teks	Visual
Medium Shot	FVO: “..bahwa tak perlu sedarah untuk menjadi saudara..”	
	Penanda (Makna Denotasi)	Petanda (Makna Konotasi)



	<p>Sekelompok anak-anak mengenakan kostum pejuang dengan syal Merah Putih membawa bambu runcing. Anak-anak lain mengenakan baju khas Betawi warna merah yang identik dengan tokoh pembela kebenaran Si Pitung.</p>	<p>Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa. Untuk meneruskan perjuangan para pahlawan menegakkan kemerdekaan, saat ini yang harus dilakukan adalah dengan menjaga persatuan. Hal ini selaras dengan teks dan suara dari <i>Female Voice Over</i> (FVO) yang mengatakan bahwa tak perlu sedarah untuk menjadi saudara.</p> <p>Mitos:</p> <p>Bambu runcing menjadi mitos bahwa perjuangan menegakkan kemerdekaan Indonesia bisa dicapai meskipun pada saat itu persenjataan yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia kalah jauh dengan persenjataan musuh. Meskipun hanya dengan senjata seadanya, dilandasi semangat persatuan dan kesatuan, Indonesia akhirnya bisa merdeka.</p>
<p>Medium Shot</p>	<p>FVO: “..Tak perlu se-iya se-kata untuk bisa seirama..”</p>	
	<p>Penanda (Makna Denotasi)</p>	<p>Petanda (Makna Konotasi)</p>

	<p>Seorang pria mengenakan kostum militer dengan kaca mata hitam dan peci, terlihat berwibawa.</p>	<p>Tampilan pria ini secara keseluruhan mengingatkan kita pada Soekarno, sosok proklamator yang memproklamkan kemerdekaan Indonesia bersama Hatta. Soekarno dan Hatta dianggap sebagai <i>founding father</i> atau Bapak Pendiri Republik Indonesia. Ketokohan Soekarno berhasil menyatukan rakyat Indonesia untuk terus berjuang bersama meraih kemerdekaan. Maksud dari kalimat “tak perlu se-iyu se-kata untuk bisa seirama” adalah bahwa masyarakat Indonesia yang majemuk memiliki keberagaman yang luar biasa. Untuk menyatukan berbagai keberagaman tersebut tidak harus dengan memaksakan kehendak, namun bisa dengan cara-cara yang lebih bijaksana.</p> <p>Mitos:</p> <p>Untuk bisa bersatu dalam sebuah bangsa, mitosnya adalah harus selalu sependapat dalam berbagai hal. Padahal sejatinya berbeda pendapat adalah sesuatu yang wajar, bahkan kritik dan saran kepada penguasa merupakan salah satu cara untuk menyatukan langkah dalam membawa kemajuan suatu bangsa.</p>
<p>Medium Shot</p>	<p>FVO: “..untuk terus jalan bersama...”</p>	
	<p>Penanda (Makna Denotasi)</p>	<p>Petanda (Makna Konotasi)</p>



	<p>Nampak sekelompok pemuda mengenakan kostum adat Papua berjalan bersama, membawa gendang dan juga tas ransel.</p>	<p>Baju adat Papua tergolong sangat khas dibanding dengan baju adat suku-suku lain di Indonesia. Ciri khas yang melekat pada baju adat Papua identik dengan alam dan tarian yang menggunakan alat musik tradisional. Pada visual ini kalimat yang diucapkan oleh FVO adalah “untuk terus jalan bersama.” Kalimat sebelumnya adalah “hanya perlu asa dan rasa”. Hal ini melambangkan bahwa untuk terus maju sebagai sebuah bangsa yang besar, Indonesia perlu mengikutsertakan semua komponen warganya, tak peduli dari suku manapun, termasuk masyarakat adat Papua.</p> <p>Mitos:</p> <p>Papua selama ini digambarkan sebagai daerah yang tertinggal dengan masyarakatnya yang masih terbelakang. Seolah-olah masyarakat Papua tidak diikutkan dalam perjalanan pembangunan yang dicanangkan di Indonesia. Ketertinggalan Papua dalam berbagai pembangunan infrastruktur selama ini mulai diperbaiki oleh Pemerintah dengan melakukan pembangunan jalan tol dan infrastruktur lainnya.</p>
<p>Long Shot</p>	<p>FVO: “...tak ada habisnya ruang rindu untuknya..”</p>	
	<p>Penanda (Makna Denotasi)</p>	<p>Petanda (Makna Konotasi)</p>

	<p>Sebuah globe yang menunjukkan peta wilayah Nusantara</p>	<p>Nusantara terdiri dari berbagai wilayah serumpun yang terbagi menjadi beberapa Negara, di antaranya Indonesia. Kalimat “tak ada habisnya ruang rindu untuknya” bermakna kecintaan yang mendalam pada Nusantara, dan tak pernah bisa lepas seorang warga terhadap kecintaan akan negerinya. Menjaga wilayah Nusantara dan menjaga warisan budayanya merupakan bukti kecintaan tersebut.</p> <p>Mitos:</p> <p>Cinta tanah air selama ini dianggap sebagai hal yang esensial dalam membentuk semangat nasionalisme. Hal ini benar karena kecintaan pada tanah air menjadi muara bagi individu untuk berkorban dan melakukan hal-hal positif demi membela bangsa dan negaranya. Dengan cinta tanah air, rasa nasionalisme akan dapat terus dipupuk dan tumbuh dalam jiwa setiap rakyat Indonesia.</p>
--	---	--

Berkaitan dengan hasil pemaknaan penanda, petanda dan juga mitos yang telah dipaparkan di atas, guna menguji keabsahan data dilakukan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan mewawancari dua orang informan yang merupakan pencipta dari sajak Tak Sedarah Bersaudara. Hasil dari wawancara tersebut, terdapat beberapa poin penting yang dapat dimaknai sebagai semangat nasionalisme, di antaranya adalah pada makna dari bait berikut: *Semesta, izinkan permata berkilau abadi* memiliki makna:

“Seorang manusia yang berbicara kepada penguasa untuk menjaga harta yang ada di dalam tanah Nusantara. Karena kita tahu kan di dalam tanah Nusantara ini berlimpah sumber daya alam tapi sering diambil oleh orang-orang tidak bertanggung jawab yang ingin meraup keuntungan namun merusak alam,” (Informan ke-1)

Menurut informan ke-1, hal ini menunjukkan rasa cinta kepada Nusantara juga ada semangat juang tinggi untuk mempertahankan dan merebut kembali apa yang sudah hilang dari Nusantara.



Sedangkan makna dari bait: *Sebercak air dalam vena membekas diatas kertas, berisi jejak tidak tampak, tidak juga abstrak* adalah:

“Mengajak kita kembali mengenang tetesan darah perjuangan di masa lalu, mengenang segala jasa para pahlawan” (Informan ke-2)

Berikutnya, makna dari bait: *Merekah alam sejuta pesona, merayu dalam semburat jingga* disebutkan oleh informan kedua sebagai berikut:

“Pujian-pujian terhadap nusantara, sebagai rasa cinta terhadap bangsa kita,”

Makna dari bait: *Menjagamu dengan segenap jiwa sepenuh doa, Untukmu, Nusantara* adalah:

“Menyampaikan jiwa nasionalisme yang sangat mendalam, rasa ingin melindungi, dan memohon perlindungan dari Sang Pencipta untuk Nusantara.”(Informan ke-2).

Kesimpulan

Dengan demikian, baik dari hasil analisis teks menggunakan metode semiotika Roland Barthes maupun dari hasil wawancara untuk triangulasi dapat dikatakan bahwa karya sajak video Tak Sedarah Bersaudara mengandung semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap Nusantara. Poin penting lainnya adalah bahwa semangat nasionalisme dapat dibentuk melalui inisiasi pembuatan karya sajak dalam format audio video yang diminati generasi muda sehingga dapat menjadi jembatan untuk mencintai negerinya.

Daftar Pustaka

- Affan, M. H. (2016). Membangun Kembali Sikap Nasionalisme Bangsa Indonesia dalam Menangkal Budaya Asing di Era Globalisasi. *Pesona Dasar (Jurnal Pendidikan Dasar Dan Humaniora)*, 3(4).
- Ardianto, F. (2019). Muatan Nasionalisme Puisi Karya Sastrawan Indonesia sebagai Pendidikan Karakter di Era Globalisasi. *Jurnal Ilmiah FONEMA : Jurnal Edukasi Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 2(1), 31–45.

- Dewirahmadanirwati. (2019). Peranan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Menumbuhkan Semangat Nasionalisme di Kalangan Genarasi Muda Harapan Bangsa dalam Era Globalisasi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic*, 3(3), 25–30.
- Farisa, F. C. (2019). Survei LSI: Dibanding Identitas Keagamaan dan Kesukuan, Nasionalisme Rakyat Indonesia Lebih Tinggi. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/03/17184761/survei-lsi-dibanding-identitas-keagamaan-dan-kesukuan-nasionalisme-rakyat>
- Farmawati, C. (2019). Penanaman Jiwa Nasionalisme Melalui Sinema Konseling Sufistik. *Jurnal Madaniyah*, 9(2), 184–202.
- Hariyanto, D. (2014). Jejak Nasionalisme Sajak-Sajak dalam Koran Masyarakat Baru. *Loa: Jurnal Ketatabahasaan Dan Kesusastraan*, 9(2), 171–176.
- Hartono, D., & Hidayatullah, R. (2019). Mitos Militerisme pada Busana Kampanye. *JCommSci – Journal Of Media and Communication Science*, 2(2), 4–8.
- Hudaya, F. (2019). Globalisasi: Stimulus atas Lahirnya Kesadaran Nasionalisme Indonesia. *Gelanggang Sejarah*, 1(4).
- KBBI. (2016). Nasionalisme. Retrieved February 22, 2021, from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nasionalisme>
- Kurnia, H. (2016). Sikap Nasionalisme Mahasiswa Universitas Cokroaminoto Yogyakarta Tahun Akademik 2015-2016. *Academy of Education Journal*, 7(2).
- Nailufar, N. N. (2020). Asal-usul Istilah Nusantara. Retrieved February 25, 2021, from <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/15/080000369/asal-usul-istilah-nusantara?page=all>
- Saptoyo, R. D. A. (2020). Karya-Karya Sastra Angkatan 45. Retrieved February 23, 2021, from <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/21/203338969/karya-karya-sastra-angkatan-45?page=all>
- Saputro, Y. D. T. W. (2016). Hubungan Pemahaman Tentang Ideologi Pancasila Dengan Sikap Nasionalisme (Studi Pada Anggota Bidang Kepemudaan dan Olahraga Serta Bidang Pendidikan dan Kesenian di Perkumpulan Masyarakat Surakarta). *PKn Progresif*, 11(2), 392–403.



Welianto, A. (2019). Nasionalisme: Arti, Sejarah, dan Tujuan. Retrieved from <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/29/180000269/nasionalisme-arti-sejarah-dan-tujuan?page=all>

Bab 3

IDENTITAS DAN KEWARGANEGARAAN GLOBAL

Lusi Andriyani

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Pendahuluan

Menjelaskan kajian identitas di era disrupsi masyarakat dengan perkembangan yang pesat menuju masyarakat 4.0 dan 5.0 menjadi hal yang menarik. Perkembangan teori dan konsep politik identitas sendiri mengalami perkembangan seiring dengan banyaknya ke-identitasan masyarakat yang mulai muncul dan berkembang untuk eksistensi dan persaingan. Dalam kajian internasional, identitas merupakan kajian konstruktivisme yang lebih menekankan pada kesadaran manusia dalam menempatkan perannya dalam konteks internasional. Gagasan yang dibangun oleh individu lebih mendapat peran dan posisi penting dibandingkan dengan sisi material. Disini menempatkan gagasan menjadi bingkai pembentuk individu. Hal yang menarik telah disampaikan oleh Dower, bahwa gagasan kewarganegaraan dunia bagi sebagian orang merupakan dis-illusi. Dower menjelaskan bahwa kewarganegaraan global lebih dari sekedar konsepsi moral, bahwa syarat-syarat penerapannya memang ada di dunia modern, dan diharapkan orang-orang menerimanya, karena ini akan membuat institusi negara lebih kuat dalam berperan untuk melaksanakan tanggung jawab global (Dower, 2000).



Saat ini, di era modern dengan kehidupan yang semakin mengglobal, kesadaran global dan keterlibatan global merupakan prasyarat yang kuat untuk menegaskan tanggung jawab kita dalam pembentukan kewarganegaraan global. Kondisi ini membutuhkan komitmen politik yang kuat dari semua entitas di seluruh dunia dalam mewujudkan kewarganegaraan yang inklusif dan menciptakan tatanan dunia yang lebih baik dan adil (Prayetno, 2017). Ini berarti perlu melihat kembali hubungan antara transformasi sosial dan mobilitas manusia di berbagai tingkat sosiospasial, dan memahami bagaimana lembaga manusia dapat mengkondisikan respons terhadap faktor struktural. Kondisi ini dapat digambarkan dengan adanya dinamika perubahan angkatan kerja di negara-negara maju yang membuka ruang seluas luasnya untuk membentuk kewarganegaraan global (Castles, 2010).

Kondisi yang menarik yang dapat dijadikan ilustrasi untuk menggambarkan kewarganegaraan global adalah adanya partisipasi relawan internasional dalam bidang sosial dan perdamaian dunia. Relawan ini hadir dengan keyakinan kuat akan kebutuhan pemerintahan global. Sehingga kondisi ini dapat membangun kepercayaan publik bahwa partisipasi dalam ruang politik dan sipil nasional akan mampu mendorong perubahan global. Hasil survey yang dilakukan oleh Lough menggambarkan bahwa ditemukan di 245 relawan internasional yang menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan dalam konsepsi relawan kewarganegaraan global sebelum dan sesudah layanan internasional. Relawan yang berpandangan tentang perlunya pemerintahan global mempunyai argumentasi bahwa partisipasi dalam ruang nasional dapat mempengaruhi perubahan global. Mereka juga lebih cenderung terlibat secara internasional tetapi tidak secara lokal. Dalam survei tersebut ditemukan bahwa warga global dapat mempertahankan identitas sipil aktif yang berakar di lokasi asal. Gambaran ini menjelaskan bahwa gagasan kewarganegaraan global yang meningkat karena adanya semakin meningkatnya minat relawan dalam urusan internasional dan keterlibatan aktif lintas batas negara (Lough & McBride, 2014).

Diskursus Identitas dan Kewarganegaraan Global

Kewarganegaraan global masih menjadi konsep yang diperdebatkan, apalagi terkait dengan keidentitasan yang melekat pada subjek. Dalam kajian yang dilakukan oleh Kalberg dijelaskan bahwa Konsep kewarganegaraan global telah masuk ke dalam bentuk gerakan beragam khususnya untuk program perdamaian dan keadilan seperti masalah kemiskinan, degradasi lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan internasional dan intranasional yang meluas, mengharuskan individu untuk melaksanakan tanggung jawab global dan melakukannya melalui lembaga-lembaga yang efektif dalam dekade terakhir. Karlberg menjelaskan bahwa konsep kewarganegaraan merupakan cita-cita demokratis yang dapat memperluas batas-batas penentuan nasib sendiri di luar lingkup penguasa. Dalam konteks ini warga negara adalah peserta dalam pemerintahan sendiri (Karlberg, 2008).

Untuk itu gagasan kewarganegaraan global akan semakin banyak digunakan oleh beberapa orang sebagai upaya untuk melaksanakan tanggung jawab global. Kewarganegaraan global dalam konteks ini telah dibedakan dari konteks pemerintahan dunia atau konteks politik. Menjadi warga negara global dalam konteks ini menempatkan warga negara sebagai agen moral yang tetap berusaha mempertahankan elemen penting dari “kewarganegaraan”. Secara hukum, istilahnya kewarganegaraan sekarang menunjukkan hubungan yang ditentukan secara konstitusional antara individu dan negara-bangsa, di mana individu tersebut menerima jaminan hak-hak sipil tertentu sebagai imbalan atas tugas dan tanggung jawab sipil tertentu. Meskipun kewarganegaraan global belum menjadi konstruksi hukum yang diterima, istilah ini menjadi konstruksi diskursif yang signifikan yang dapat memainkan peran penting dalam penciptaan tatanan global yang lebih damai dan adil. Kewarganegaraan global dalam teori wacana dibentuk oleh pola cara kita berpikir dan berbicara bersama yang memengaruhi persepsi, motivasi, tindakan kita, dan bahkan konstruksi lembaga sosial. Dalam konteks ini konsep kewarganegaraan global terkait



dengan produktifitas budaya dan kesadaran manusia yang dapat membantu menyusun realitas mental dan sosial (Karlberg, 2008).

Berbeda dengan Karlberg, Miller dalam *“Bounded Citizenship”* menjelaskan bahwa kewarganegaraan sejati sampai pada kosmopolitanisme bersifat utopis dan tidak realistis. Kewarganegaraan nasional dan nilainya dalam konteks ini, menurut Miller merupakan bentuk konsisten dan pengakuan atas kewajiban internasional dalam konteks komunitas politik. Yang membuat kewarganegaraan menjadi praktik yang berharga memiliki empat ciri: (a) persamaan hak: kita semua memiliki hak yang sama sebagai komunitas politik; (b) kewajiban yang melekat: setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati hak-hak sesama warga negara; (c) komitmen: warga negara memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah aktif untuk membela hak-hak orang lain dan mempromosikan kebaikan bersama dari seluruh komunitas politik; (d) partisipasi: warga negara memiliki tugas untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik (Dower, 2000).

Falk juga berusaha untuk mengidentifikasi hubungan antara konsepsi tradisional kewarganegaraan berdasarkan afiliasi dengan negara teritorial dan kebangkitan kekuatan pasar global. Argumen dasar yang dikemukakan adalah bahwa erosi otonomi negara dan munculnya arena pengambilan keputusan dan kekuasaan di luar kendali negara telah melemahkan ikatan identitas tradisional antara individu dan negara. Pola ini terutama terlihat di negara-negara demokrasi liberal di Barat, yang merupakan latar utama di mana kewarganegaraan dalam bentuk modernnya muncul. Falk menjelaskan bahwa terdapat upaya munculnya bentuk-bentuk baru identitas politik yang membentuk kembali makna kewarganegaraan, menciptakan banyak loyalitas dan menggantikan konsepsi monolitik kewarganegaraan yang terkait dengan sistem tatanan publik dunia Westphalia. Esensinya bahwa loyalitas kewarganegaraan akan dibentuk oleh kesetiaan pada nilai-nilai bersama dan pengalaman komunitas, sebuah dinamika yang akan semakin mengurangi asosiasi reduktif warga negara secara eksklusif dengan negara berdaulat tertentu (Falk, 2000).

Berbeda dengan falk, Delanty (Delanty, 2000) melakukan kritik terhadap konsep kewarganegaraan global yang dikemukakan oleh demokrasi liberal, komunitarian dan radikal. Delanty menjelaskan bahwa munculnya kewarganegaraan global karena akibat dari transformatif kapitalisme dan demokrasi. Perdebatan dan transformasi ini, memberikan kerangka dan konteks untuk konfigurasi ulang kewarganegaraan dan hubungan kewarganegaraan-demokrasi. Dalam kondisi tersebut ada kebutuhan untuk menanggapi fragmentasi internal kewarganegaraan dan berbagai model serta kerangka demokrasi di setiap tingkat pemerintahan. Terbentuknya kewarganegaraan global juga didukung adanya sebuah kosmopolitanisme sipil yang responsif terhadap dunia pluralis komunitas politik tetapi menghindari universalisme palsu dari liberalisme dan mundur ke hal khusus yang tertanam dalam tanggapan komunitarian. Kondisi ini akhirnya mendorong untuk menghasilkan keterlibatan dengan transformasi globalisasi, dan kritik terhadap bentuk-bentuk neoliberal, globalisasi dan tanggapan romantisme yang menentangnya. Upaya untuk mengeksplorasi kebutuhan baik menjadi bagian dari tatanan budaya yang memungkinkan mereka untuk saling mengkritik dan melengkapi satu sama lain. Kewarganegaraan global juga dapat hadir karena adanya ruang publik kosmopolitan, meskipun tidak harus global, yang berakar pada kewarganegaraan yang mampu menanggapi keragaman tetapi juga mampu mengkritik dan menengahi bentuk-bentuk globalisasi yang homogen.

Identitas dan Peran Penting Dalam Penciptaan Tatanan Global

Dari diskusi teoritis diatas, dapat digambarkan bahwa konsep kewarganegaraan global dengan bangunan identitas didalamnya masih mengalami perdebatan. Walaupun dalam kenyataannya perkembangan konsep dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran masyarakat secara menyeluruh serta tatanan global yang berubah. Pola migrasi, politik global, penanganan isu sosial, keamanan, serta perdamaian, telah mendorong konsep kewarganegaraan global semakin eksisting. Fenomena kebangkitan kekuatan pasar global



dalam kenyatannya telah memunculkan erosi otonomi Negara, sehingga kekuasaan di luar kendali negara yang melemahkan ikatan tradisional identitas antara individu dan negara. Kondisi ini telah melahirkan kewarganegaraan dalam bentuk modern. Bentuk-bentuk baru identitas politik yang membentuk kembali makna kewarganegaraan, menciptakan banyak loyalitas dan menggantikan konsepsi monolitik kewarganegaraan yang terkait dengan sistem tatanan publik dunia Westphalia yang dibentuk oleh kesetiaan pada nilai-nilai bersama dan pengalaman komunitas (Falk, 2000).

Fenomena menarik yang di tuliskan oleh VOA Indonesia, dimana terdapat Jumlah warga negara Inggris yang memperoleh kewarganegaraan Jerman meningkat secara signifikan sejak Inggris melangsungkan referendum untuk memisahkan diri dari Uni Eropa pada 2016. Kondisi ini disebabkan karena banyak warga negara Inggris khawatir Brexit akan menyebabkan mereka kehilangan hak untuk tinggal dan bekerja di Jerman, ekonomi terbesar di Eropa, sehingga mendorong mereka untuk memiliki kewarganegaraan Jerman. Biro Pusat Statistik Federal Jerman menunjukkan, pada 2019, sekitar 128.900 orang asing memperoleh kewarganegaraan Jerman, peningkatan 15 persen dari tahun sebelumnya. Setengah dari jumlah peningkatan itu ternyata berasal dari proses naturalisasi dimana terdapat 14.600 warga negara Inggris dinaturalisasi pada 2019 (Voa Indonesia, 2020).

Smith dalam *“Global citizenship and the importance of education in a globally integrated world”* menjelaskan bahwa Ketika batas-batas negara menghilang dan teknologi memungkinkan budaya dan kebangsaan yang berbeda untuk berkomunikasi secara teratur, semakin banyak individu yang mengidentifikasi diri sebagai warga global. Menggunakan Analisis Jaringan Sosial dan pemodelan multi-level, studi ini mengeksplorasi faktor-faktor yang terkait dengan afinitas warga global. Kajian tersebut menemukan bahwa pendidikan memainkan peran penting dalam menguatkan individu untuk melakukan identifikasi diri. Hasil menunjukkan bahwa pendidikan lebih membangun dan menguatkan identitas positif individu sebagai warga global. Pendidikan mempunyai efek lebih

besar dalam masyarakat yang lebih terintegrasi secara sosial. Pendidikan tentang pluralisme, multikulturalisme menjadi poin penting untuk bisa membangun kesadaran positif sebagai warga global (Smith et al., 2017).

Pendidikan sebagai instrumen untuk membangun kesadaran global dan menguatkan integrasi sosial diterapkan oleh Korea Selatan. Bagaimana gagasan kewarganegaraan tentang bangsa, identitas nasional, dan hak konstitusional ketika kurikulum nasional memasukkan gagasan tentang kewarganegaraan global, identitas nasional, keragaman, dan hak asasi manusia melalui metode campuran. Pola yang dilakukan adalah dengan menganalisis sifat perubahan dalam buku teks pendidikan kewarganegaraan Korea Selatan. Dari perubahan kurikulum dan buku teks ditemukan bahwa tema kewarganegaraan nasional yang elemen inti penekanannya telah melemah, sementara tema kewarganegaraan global telah meningkat secara dramatis, terutama pada tahun 1990-an dan 2000-an. Perubahan isi buku tersebut mendorong siswa untuk menjadi individu yang mandiri dan berdaya dalam masyarakat global. Data informasi dari akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan di Korea Selatan menunjukkan bahwa faktor global dan lokal berkontribusi pada perkembangan konsep kewarganegaraan global (Moon & Koo, 2011)

Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa munculnya konsep kewarganegaraan dipengaruhi banyak faktor, baik internal negara tersebut dengan kewarganegaraan nasionalnya, migrasi, isu-isu sosial politik dan perdamaian. Dengan perkembangan masyarakat tanpa batas, maka etika global harus diterima dimana hak dan kewajiban sebagai manusia satu dengan lainnya dalam konteks komunitas politik tidak sama. Menjadi warga negara global tidak dipahami hanya sebagai penegasan etika global dan kewarganegaraan dunia sebagai hubungan antar warga dunia, namun adanya berkomitmen bersama untuk menciptakan perdamaian dunia.



Daftar Pustaka

- Castles, S. (2010). Understanding global migration: A social transformation perspective. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 36(10), 1565–1586. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2010.489381>
- Delanty, G. (2000). Citizenship in a global age: Society, Culture. In *Politics* (Vol. 0335204899, pp. 2001–2002). University of California Press: Berkeley, CA 2001 0520228138 (pb) x. Retrieved from http://scholar.google.co.uk/scholar?q=gerard+delanty&btnG=&hl=en&as_sdt=0%2C5#5
- Dower, N. (2000). The idea of global citizenship - a sympathetic assessment. *Global Society*, 14(4), 553–567. <https://doi.org/10.1080/713669060>
- Falk, R. (2000). The decline of citizenship in an Era of globalization. *Citizenship Studies*, 4(1), 5–17. <https://doi.org/10.1080/136210200109997>
- Karlberg, M. (2008). Discourse, identity, and global citizenship. *Peace Review*, 20(3), 310–320. <https://doi.org/10.1080/10402650802330139>
- Lough, B. J., & McBride, A. M. (2014). Navigating the boundaries of active global citizenship. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 39(3), 457–469. <https://doi.org/10.1111/tran.12035>
- Moon, R. J., & Koo, J. W. (2011). Global citizenship and human rights: A longitudinal analysis of social studies and ethics textbooks in the Republic of Korea. *Comparative Education Review*, 55(4), 574–599. <https://doi.org/10.1086/660796>
- Prayetno. (2017). Jurnal Pusham Unimed Volume VII, Nomor 1 Juni 2017 WARGA NEGARA GLOBAL; TANTANGAN, PELUANG DAN TANGGUNG JAWAB BERSAMA. *Jurnal Pusham Unimed*, VII, 1–20.
- Smith, W. C., Fraser, P., Chykina, V., Ikoma, S., Levitan, J., Liu, J., & Mahfouz, J. (2017). Global citizenship and the importance of education in a globally integrated world. *Globalisation, Societies and Education*, 15(5), 648–665. <https://doi.org/10.1080/14767724.2016.1222896>
- Voa Indonesia. (2020). semakin-banyak-warga-inggris-miliki-kewarganegaraan-jerman. Retrieved from <http://www.voaindonesia.com/info/faq/2166.html>

Bab 4

TRANSNATIONAL MARRIAGE: KONSEP DAN ISU

Wanda Kiyah George Albert & Adi Fahrudin

Universiti Malaysia Sabah & Universitas Muhammadiyah Jakarta

Pendahuluan

Peningkatan imigrasi internasional dan proses koneksi antar budaya di berbagai Negara pada umumnya membuat beberapa tantangan sosial yang penting bagi nasionalisme. Berbanding isu globalisasi dan nasionalisme yang kurang mendapat perhatian adalah soal perkawinan antara Negara. Perkawinan antara Negara yang dimaksud adalah perkawinan antara dua anak manusia, lelaki dan perempuan berbeda kewarganegaraan. Meskipun isu ini bukan baru sama sekali dalam kajian ilmu sosial, namun fokus kajian lebih banyak membicarakan perkawinan diantara imigran dengan penduduk setempat suatu Negara. Padahal masih banyak jenis perkawinan antar Negara yang terjadi tidak semata karena berstatus sebagai imigran suatu Negara. Ada banyak pula fenomena perkawinan yang melibatkan hubungan perkenalan dan percintaan melalui media sosial, perkawinan sesama pekerja profesional yang bekerja dalam dan di luar perusahaan, perkawinan sesama mahasiswa dari dua Negara berbeda yang sedang belajar di suatu Negara. Bahkan ada pula perkawinan yang terjadi karena diatur oleh agen atau pihak tertentu. Terlepas dari pro dan kontra dari berbagai



jenis pola perkawinan tersebut, tulisan ini hanya mencoba melihat dari aspek positif dan negatif dari perkawinan antara Negara baik terhadap pasangan maupun anak yang mereka lahirkan. Kajian selama ini lebih menekankan dinamika perubahan sosial-budaya, pembentukan multi budaya dan identitas transcultural tetapi penelitian tentang dinamika internal hubungan antar etnis, dinamika budaya, proses asimilasi dan segregasi dan bahkan meminjam istilah Favell dan Geddes (1999) tema 'politik kepemilikan' para imigran dan keturunan mereka masih jarang dibicarakan.

***“Transnational Marriage”*: Konsep Dan Pengertian**

Gudykunst (1994) mendefinisikan *“Transnational Marriage”* sebagai perkahwinan antara budaya sebagai perkahwinan antara dua individu yang mempunyai latar belakang budaya dan etnik yang berbeza. Perkahwinan transnasional berlaku apabila seseorang mempunyai pasangan yang sesuai dengan negara selain negara kelahirannya. Manakala menurut Kim dan Stodolska (2013) menyatakan bahawa *“Transnational Marriage”* ini sebagai perkahwinan perkahwinan yang melibatkan penyatuan antara dua belah pihak yang berlainan kewarganegaraan.

Faktor Penyebab Kepada *“Transnational Marriage”*

Banyak penyelidik telah berusaha untuk memahami mengapa seseorang individu mengahwini seseorang dengan ciri-ciri yang berbeza seperti bangsa, etnik, dan kewarganegaraan (Edwards, 1969; Schoen, Wooldredge, & Thomas, 1989; Spickard, 1989). *“Transnational Marriage”* ini sering dikaitkan dengan faktor modal sosial serta budaya, dan daya tarikan wanita dan lelaki dari asli kewarganegaraan (Lomsky-Feder & Leibovitz, 2010). Namun terdapat juga faktor lain yang menyebabkan hal ini berlaku iaitu inginkan pasangan yang mempunyai keseragaman atau persamaan dengan mereka dari segi pencapaian pendidikan yang sama, homogami, dan minat riadah yang serupa (Jo-Pei, Buharuddin, Juhari, & Krauss, 2008). Peningkatan perjalanan antarabangsa, migrasi, dan rangkaian transnasional, dan penerimaan kesatuan

antara kaum memberikan banyak peluang untuk membina hubungan silang budaya yang intim hubungan yang menghasilkan lebih banyak perkahwinan antara budaya (Kim & Stodolska, 2013; Zhang & Van Hook, 2009).

Kelebihan *Transnational Marriage*

Di antara kebaikan "*Transnational Marriage*" ini adalah kedua-dua pasangan itu berpeluang untuk mengenali perbezaan budaya, adat, bahasa, agama dan keunikan negara pasangan masing-masing Troy, Lewis-Smith, dan Laurenceau (2006). Keunikan yang ada pada negara itu juga akan membuatkan pasangan ini teruja untuk mempelajari dan mengamalkan adat resam dan budaya berbeza. Keinginan untuk mempelajari bahasa, budaya dan juga adat di dalam sesebuah negara yang mereka duduki akan membuatkan pasangan berusaha untuk mempelajarinya agar mereka dapat diterima oleh pasangan masing-masing ataupun keluarga pasangan. Situasi ini boleh diterangkan di dalam konsep psikologi iaitu "*confirmity*". Istilah "*confirmity*" ini merujuk kepada kesanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu yang dilakukan oleh sesebuah kumpulan agar mereka dapat diterima di dalam kumpulan tersebut. Kesanggupan untuk mempelajari perbezaan ini akan meningkatkan kemahiran mereka bertutur dalam Bahasa asing selain dari Bahasa sendiri.

Seterusnya, kelebihan "*Transnational Marriage*" ini juga akan meningkatkan kelahiran anak yang terdiri dari campuran budaya. Situasi ini membuatkan pasangan ini mempunyai anak yang memiliki rupa paras yang agak berbeza dengan kanak-kanak tempatan. Rupa paras yang berbeza hasil dari perkahwinan campur ini akan membuatkan keluarga tersebut menjadi perhatian dan kebanggaan di sesebuah tempat yang mereka duduki kerana keunikkan yang dimiliki (Falicov, 1995).

Dalam pada itu juga, "*Transnational Marriage*" ini seringkali dianggap sebagai satu perjuangan dan dakwah yang besar bagi sesebuah kaum. Hal ini berlaku apabila pasangan tersebut berkahwin



berbeza agama contohnya di antara kaum lain dan Islam. Mereka boleh dikira sebagai penyelamat khususnya jika pasangan tersebut sebelum berkahwin bukan seorang Muslim. Ini kerana mereka telah berjaya meyakinkan pasangannya dengan agama yang sebenar iaitu Islam yang telah mengubah hidup mereka dari kegelapan kepada cahaya Islam.

Walaupun terdapat banyak bukti mengenai cabaran di dalam "*Transnational Marriage*", beberapa penyelidik telah menumpukan perhatian pada kekuatan dalam "*Transnational Marriage*" ini. Pasangan yang terlibat dengan "*Transnational Marriage*" ini dapat mengembangkan strategi mereka sendiri untuk menangani cabaran hidup yang berkaitan dengan perbezaan budaya mereka. Buktinya pasangan ini menyatakan bahawa ikatan yang lebih mendalam dengan pasangan mereka dan lebih akrab dengan pasangan dan ikatan kasih sayang juga dikatakan erat di mana ia dapat menyumbang kepada peningkatan kepuasan perkahwinan (Biever et al., 1998; Falicov, 1995).

Seterusnya menurut Troy, Lewis-Smith, dan Laurenceau (2006) mendedahkan bahawa pasangan yang terlibat di dalam "*Transnational Marriage*" ini mempunyai kepuasan yang lebih tinggi dalam perkahwinan mereka terutamanya dari segi hubungan dan tidak ada perbezaan corak konflik. Selain itu, Bustamante, Nelson, Henriksen, dan Monakes (2011) menyimpulkan bahawa pasangan seperti itu telah mengenal pasti strategi mengatasi yang berkesan, seperti peranan gender yang lebih lembut, budaya yang lebih baik pemahaman dan pengiktirafan persamaan mereka, dan penghargaan terhadap perspektif budaya orang lain, yang dapat mengukuhkan ikatan dan keakraban dan meningkatkan kepuasan perkahwinan.

Tantangan Dalam "*Transnational Marriage*"

Kebanyakan kajian mendapati bahawa, "*Transnational Marriage*" ini mampu mewujudkan pelbagai masalah dan kebimbangan disebabkan halangan dari segi perbezaan budaya dan bahasa (Fu & Heaton, 2000; Hsu, 2001). Lewis (2013) turut

menyatakan kesukaran terbesar kepada individu yang terlibat di dalam *“Transnational Marriage”* adalah penerimaan sosial yang berbeza, persepsi negatif dan pandangan perkahwinan antara kaum, dan perbezaan perlakuan yang dirasakan terhadap perkahwinan antara budaya. Perbezaan budaya dan bahasa ini memerlukan mereka untuk beradaptasi dengan perbezaan tersebut. Menurut kajian oleh Bustamante, Nelson, Henriksen, dan Monakes (2011), mereka mendapati bahawa pasangan yang terlibat di dalam *“Transnational Marriage”* ini mengalami sedikit kesukaran untuk beradaptasi dengan perbezaan dalam nilai dan kepercayaan budaya dan pandangan dunia yang akhirnya akan menimbulkan masalah serta konflik di dalam perkahwinan sehingga menyebabkan berlakunya penceraian. Setiap individu yang berkahwin berlainan kewarganegaraan tidak dapat lari dari mempelajari nilai perkahwinan antara budaya mempunyai nilai dan kepercayaan keluarga yang berbeza.

Selain itu juga gaya komunikasi dan pandangan yang bercanggah mengenai perbezaan budaya mereka akan menjadi punca tekanan kepada pasangan yang terlibat dengan *“Transnational Marriage”*. *“Transnational Marriage”* Penemuan ini menyokong kenyataan bahawa pasangan dari budaya yang sama mungkin lebih memahami pasangan mereka terutamanya dari segi tingkah laku dan sikap dan menyumbang kepada kurang konflik dalam kehidupan berkahwin berbanding dengan mereka yang terlibat dengan *“Transnational Marriage”*.

Dalam pada itu juga, apa yang sering menjadi isu adalah daripada pengonsepsian dari segi beberapa perkataan antara budaya barat dan timur. Perkataan *“self”* atau *“diri”* dalam budaya Barat sendiri seringkali menimbulkan lebih banyak tekanan hidup dan cabaran hidup dalam perkahwinan antara negara ini. Menurut kajian oleh Markus dan Kitayama (1991) telah membuktikan bagaimana individu dalam masyarakat Barat menekankan nilai individualisme dan menganggap diri sebagai bebas daripada diri yang lain ataupun budaya timur. Konsep ini amatlah bercanggah dengan konsep yang dipegang oleh budaya barat di mana budaya



timur lebih menekankan pentingnya saling bergantung dan kolektivisme (Ward, Bochner, & Furnham, 2001). Percanggahan ini seringkali menjadi punca perdebatan dan perbalahan antara pasangan yang terlibat dengan "*Transnational Marriage*" ini.

Kajian terdahulu juga mendapati bahawa halangan bahasa sebagai masalah utama bagi pasangan dalam perkahwinan antara budaya (Fu et al., 2001; Hsu, 2001). Mengikuti budaya setiap individu, dia mempunyai gaya komunikasi yang berbeza yang boleh menyebabkan konflik (Oetzel, Dhar, & Kirschbaum, 2007). Sebagai contoh, masyarakat individualistik seperti Amerika Syarikat dan Eropah lebih fokus pada "I" dan menggunakan gaya pertuturan langsung, sementara Budaya Asia menekankan pentingnya "Kami" dan menggunakan gaya pertuturan tidak langsung (Gudykunst, 1994; Hall, 1976). Halangan bahasa dan gaya pertuturan yang berbeza, yang menyebabkan tekanan dan perasaan terasing dari orang lain. Di samping itu, laras Bahasa menghalang peserta daripada menyampaikan perasaan emosi yang mendalam kepada orang lain dan hasilnya, mereka merasakan kesepian.

Selain itu, terdapat juga beberapa kajian terdahulu telah mengenal pasti kesan negatif lain hasil daripada "*Transnational Marriage*" ini terutamanya berkaitan dengan isu silang budaya di dalam perkahwinan seperti tahap sokongan sosial yang lebih rendah (Walker, 2005) dan kepuasan perkahwinan (Anderson, 1993), kesukaran komunikasi (Sharaievskaya, JunGeun, & Stodolska, 2013), konflik budaya (Huijnk, Verkuyten, & Coenders, 2013), dan kadar perceraian atau gangguan perkahwinan yang lebih tinggi (Bratter & King, 2008). Isu silang budaya ini berlaku disebabkan oleh perbezaan budaya. Semua pasangan yang terlibat dengan isu silang budaya disebabkan oleh "*Transnational Marriage*" terpaksa berhadapan dengan halangan di dalam berbahasa dan memahami budaya yang berbeza (Fu, Tora, & Kendall, 2001; Hsu, 2001) dan akan menghadapi cabaran apabila nilai dan kepercayaan budaya mereka tidak sesuai dengan yang lain.

Stolorow, Atwood, dan Orange (2002) menyatakan bahwa seseorang individu cenderung menilai cara orang lain berkelakuan, berfikir, dan berinteraksi berdasarkan sudut budaya mereka sendiri. Kajian-kajian ini menunjukkan bahwa setiap pasangan cenderung untuk menilai interaksi dan komunikasi berdasarkan nilai budayanya sendiri dan situasi ini mengheret mereka kearah konflik dan merasakan tekanan dari segi psikologi. Walaupun budaya adalah konstruk yang kompleks dan pelbagai aspek, terdapat perbezaan mendasar antara masyarakat Barat dan Timur (Hofstede, 1980). Kajian terdahulu telah menyokong idea bahawa pendatang Asia cenderung mengekalkan budaya mereka nilai dan kepercayaan, sehingga menimbulkan konflik dengan orang asli dan juga keluarga anggota, yang jelas sangat terkulturasi (Ishii-Kuntz, 1997; Sung, 2001; Weisman et al., 2005). Kajian ini juga menunjukkan bahawa peserta menyatakan kecenderungan untuk mempertahankan nilai budaya dan kepercayaan mereka, yang menghasilkan perkahwinan dan konflik keluarga: Hasil kajian menunjukkan bahawa mereka menunjukkan nilai kolektivistik dan kepercayaan dan saling bergantung. Tinjauan literatur menunjukkan bahawa banyak individu yang menjadi anggota dua budaya berjaya mengembangkan identiti budaya yang serasi (LaFromboise, Coleman, & Gerton, 1993; Padilla, 1994; Phinney & Devich-Navarro, 1997; Rotheram-Borus, 1993; Sue, Ino, & Sue, 1983). Contohnya, bila individu berbudaya diminta untuk menggambarkan identiti etnik mereka, mereka cenderung katakan, “kami” atau “Kami orang Asia” (Phinney & Devich-Navarro, 1997). Walau bagaimanapun, kajian ini menunjukkan bahawa walaupun mereka mempunyai kemampuan untuk mengembangkan identiti budaya yang serasi, mereka masih berjuang untuk mengenal pasti dengan mana-mana identiti etnik tertentu.

Dari sudut pandangan perkauman, penyelidikan yang dilakukan oleh Lewis dan Yancey (1995) dan Lewis (1994) menunjukkan bukti bahawa pasangan dalam “*Transnational Marriage*’ seringkali terlibat dengan kejadian diskriminasi kaum dan



dilaporkan mempunyai kadar yang lebih tinggi berbanding dengan mereka yang berkahwin dalam kumpulan etnik yang sama. Kajian-kajian ini juga menunjukkan bahawa pengalaman yang dilalui ini merupakan cabaran boleh memberi kesan negatif terhadap kesihatan dan kesejahteraan individu tersebut. Contohnya, Fu et al. (2001) berpendapat bahawa "*Transnational Marriage*" menghadapi cabaran yang lebih besar daripada perkahwinan homogamous kerana perbezaan budaya dan halangan bahasa, yang menimbulkan ketegangan keluarga dan mengakibatkan lebih rendah kebahagiaan dan kepuasan perkahwinan. Di samping itu, Bustamante et al. (2011) melaporkan bahawa perbezaan yang mendalam dalam nilai budaya dan kepercayaan dan norma sosial juga persepsi sosial yang negatif menjadi isu utama dalam perkahwinan antara budaya. Kajian terdahulu juga mendapati bahawa "*Transnational Marriage*" ini sekaligus telah menyebabkan pasangan cenderung mengalami tahap social, kesihatan fizikal dan psikologi berada pada paras yang rendah (Jang & Kim, 2012; Yang & Shin, 2013). Kajian oleh Yang & Shin (2013) yang telah mengkaji hubungan antara kesihatan dan perkahwinan antarabangsa mendapati bahawa isu utama wanita di dalam "*Transnational Marriage*" adalah konflik budaya dan persepsi sosial negatif terhadap perkahwinan antarabangsa.

Seterusnya, Jang dan Kim (2012) mengenal pasti cabaran penyesuaian yang dialami oleh wanita dalam perkahwinan antarabangsa di Asia sendiri adalah disebabkan oleh struktur keluarga yang berbeza, kurangnya pemahaman budaya, perbezaan budaya, dan halangan bahasa, yang menimbulkan kegelisahan sosial, kesepian, dan tahap ekspresi diri yang lebih rendah. Kajian oleh Yang dan Wang (2011) yang mengkaji hubungan antara demografi dan kualiti hidup mempunyai perkaitan dengan dengan kesihatan, dan akulturasi wanita tersebut dengan "*Transnational Marriage*". Kajian mereka mendapati bahawa wanita-wanita ini cenderung mempertahankan nilai dan kepercayaan budaya mereka sendiri daripada menyesuaikan diri dengan budaya dan perspektif baru yang menyebabkan tahap akulturasi rendah. Kajian mereka

juga mendapati bahawa fungsi fizikal, mental, dan social berada pada tahap yang rendah.

Kesimpulan

Kesimpulannya, “*Transnational Marriage*’ yang diterangkan dalam bab dalam buku ini secara umumnya menunjukkan amalan kahwin berlainan negara sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat di seluruh dunia terutamanya di negara barat dan juga timur. Berdasarkan kepada kajian-kajian terdahulu, terdapat cabaran yang dialami oleh pasangan daripada pelbagai negara terutamanya dari segi isu yang melibatkan silang budaya di dalam perkahwinan seperti kesukaran untuk komunikasi, tahap sokongan sosial yang lebih rendah, kepuasan perkahwinan rendah, konflik budaya, kadar perceraian tinggi dan gangguan perkahwinan. Isu yang berlaku ini perlu ditangani dengan usaha daripada pelbagai pihak berkuasa dengan memberikan beberapa keistimewaan kepada pasangan yang mengambil keputusan untuk menjalani kehidupan “*Transnational Marriage*’ ini. “*Transnational Marriage*’ telah mencetuskan satu fenomena kepada pasangan yang mengambil keputusan untuk melakukannya. Fenomena positif mahupun negatif yang dicetuskan tidak menghalang usaha, sokongan dan perhatian daripada pihak berkaitan akan memberikan kesan yang positif keatas kualiti dan kesejahteraan hidup mereka.

Daftar Pustaka

- Anderson, E. (1993). *Sex codes and family life among poor inner-city youths*. In R. I. Lerman & T. J. Ooms (Eds.), *Young unwed fathers: Changing roles and emerging policies* (pp. 74–98). Philadelphia, PA: Temple University Press.
- Bratter, J. L., & King, R. B. (2008). “But will it last?”: Marital instability among interracial and same race couples. *Family Relations*, 57(2), 160–171.



- Biever, J. L., Bobele, M., & North, M. W. (1998). Therapy with intercultural couples: A postmodern approach. *Counseling Psychology Quarterly*, 11(2), 181–188.
- Bustamante, R. M., Nelson, J. A., Henriksen, R. C., & Monakes, S. (2011). Intercultural couples: Coping with culture-related stressors. *The Family Journal*, 19(2), 154–164.
- Falicov, C. J. (1995). *Cross-cultural marriages*. In *Clinical handbook of couple therapy* (pp. 231–246). New York, NY: Guilford.
- Fu, X., & Heaton, T.B. (2000). Status exchange in intermarriage among Hawaiians, Japanese, Filipinos and Caucasian in Hawaii: 1983–1994. *Journal of Comparative Family Studies*, 31 (1), 45–61.
- Fu, X., Tora, J., & Kendall, H. (2001). Marital happiness and interracial marriage: A study in a multi-ethnic community in Hawaii. *Journal of Comparative Family Studies*, 32(1), 47–60.
- Gudykunst, W. (1994). *Bridging difference: Effective intergroup communication*. London, UK: Sage.
- Huijnk, W., Verkuyten, M., & Coenders, M. (2013). Family relations and the attitude towards ethnic minorities as close kin by marriage. *Ethnic and Racial Studies*, 36(11), 1890–1909.
- Hsu, J. (2001). *Marital therapy for intercultural couples*. In W. S. Tseng, & J. Streltzer (Eds.), *Culture and psychotherapy: A guide to clinical practice* (pp. 225–242). Washington, DC: American Psychiatric Press.
- Jang, M., & Kim, Y. H. (2012). The effect of group sandplay therapy on the social anxiety, loneliness, and self-expression of migrant women in international marriages in South Korea. *The Arts in Psychotherapy*, 39(1), 38–41.
- Jo-Pei, T., Baharuddin, R., Juhari, R., & Krauss, S. E. (2008). *Socio-demographic characteristics of intercultural marriage: A study of a multi-ethnic community in Malaysia*. Editorial Advisory Board, 5(4), 30.
- Kim, J., & Kim, H. (2013). The experience of acculturative stress-related growth from immigrant's perspectives. *International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being*, 8, 1–11.

- Lewis, R. (2013). Status of interracial marriage in the United States: A qualitative analysis of interracial spouse perceptions. *International Journal of Social Studies*, 2(1), 16–25.
- Lomsky-Feder, E., & Leibovitz, T. (2010). Inter-ethnic encounters within the family: Competing cultural models and social exchange. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 36(1), 107–124.
- Markus, H. R., & Kitayama, S. (1991). Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation. *Psychological Review*, 98(2), 224.
- Oetzel, J., Dhar, S., & Kirschbaum, K. (2007). Intercultural conflict from a multilevel perspective: Trends, possibilities, and future directions. *Journal of Intercultural Communication Research*, 36(3), 183–204
- Sharaievska, I., JunGeun, K., & Stodolska, M. (2013). Leisure and marital satisfaction in intercultural marriages. *Journal of Leisure Research*, 45(4), 445–465.
- Stolorow, R. D., Atwood, G. E., & Orange, D. (2002). *Worlds of experience*. New York, NY: Basic.
- Troy, A. B., Lewis-Smith, J., & Laurenceau, J. P. (2006). Interracial and interracial romantic relationships: The search for differences in satisfaction, conflict, and attachment style. *Journal of Social and Personal Relationships*, 23(1), 65–80.
- Ward, C. A., Bochner, S., & Furnham, A. (2001). *The psychology of culture shock*.
- Walker, E. M. (2005). *Interracial couples: The impact of race and gender on one's experience of discrimination based on the race of the partner* (Master's thesis). Retrieved from <http://drum.lib.umd.edu/bitstream/handle/1903/2556/umi-umd-2440.pdf;sequenceD1>.
- Yang, J. A., & Shin, K. H. (2013). Vulnerability, resilience, and well-being of intermarriage: An ethnographic approach to Korean women. *Journal of International Women's Studies*, 10(2), 46–63.
- Yang, Y. M., & Wang, H. H. (2011). Acculturation and health-related quality of life among Vietnamese immigrant women in transnational marriages in Taiwan. *Journal of Transcultural Nursing*, 22(4), 405–413.



Zhang, Y., & Van Hook, J. (2009). Marital dissolution among interracial couples. *Journal of Marriage and Family*, 71(1), 95–107.

Bab 5

GENERASI MUDA DAN NASIONALISME

Husmiati Yusuf

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Pendahuluan

Generasi muda dan nasionalisme mengandung arti yang dalam. Generasi muda adalah generasi penerus yang diharapkan dapat menggantikan generasi sekarang dalam mengurus negara dimasa yang akan datang. Generasi muda yang ada saat ini dipersiapkan untuk menjadi generasi menjaga negara Indonesia. Untuk itu perlu ditanamkan rasa nasionalisme, rasa cinta dan rasa memiliki Indonesia. Bangga menjadi warga negara Indonesia. Serta hormat pada para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Artikel ini merupakan kajian Pustaka yang membahas generasi muda dan kadar nasionalisme yang mereka miliki. Terdiri dari membahas tentang nasionalisme, potret generasi muda saat ini, kemudian konsep nasionalisme dikalangan generasi muda. Diakhir tulisan ini menyimpulkan isu generasi muda dan nasionalisme.

Pengertian Nasionalisme

Dalam kelangsungan suatu negara, semangat nasionalisme sangat diperlukan, dengan itu diharapkan dapat memunculkan kesatuan dan persatuan bangsa. Kecintaan terhadap Tanah Air dan bangsa merupakan semangat Nasionalisme yang terkandung dalam



sikap bangga terhadap bangsa dan bertanah air Indonesia, sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara dan sikap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nasionalisme menonjol sejak revolusi Perancis, sebagai respon terhadap kekuatan-kekuatan imperium Barat yang berhasil meluaskan penetrasinya ke berbagai belahan bumi. Dengan slogan “liberte, egalite, fraternite”, nasionalisme menjadi ideologi baru yang sangat penting dan disejajarkan dengan demokrasi, dikarenakan tanpa sebuah negara nasional demokrasi akan sulit terwujud (Anggraeni & Faturahman, 2014). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme adalah kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu; semangat kebangsaan

Menurut Hara (dalam Anggraeni & Faturahman, 2004) nasionalisme adalah kebanggaan seseorang untuk menampilkan identitasnya sebagai suatu bangsa. Nasionalisme merupakan suatu kesadaran atau keinsyafan rakyat sebagai suatu bangsa. Beberapa tujuan nasionalisme di antaranya menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap bangsa, negara, serta tanah air. Selain itu untuk membangun sebuah hubungan yang harmonis dan rukun antara masyarakat dan individu lainnya.

Pada masa sekarang, nasionalisme dapat dilihat pada generasi muda yang berprestasi dan membawa harum nama bangsa Indonesia di kancah internasional dengan memperoleh penghargaan baik dari negara maupun pihak lain. Sebagai bangsa dan negara di tengah bangsa lain di dunia membutuhkan identitas kebangsaan dan nasionalisme yang tinggi dari warga negara Indonesia. Mereka dapat dikatakan juga sebagai pahlawan. Semangat nasionalisme membuat mereka rela berkorban, mengutamakan kepentingan negara dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan, ikhlas, demi cinta tanah air tercinta. Nilai-nilai yang baik ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai yang

terkandung dalam semangat nasionalisme dapat menjadi inspirasi dan motivasi. Dengan semangat nasionalisme yang tinggi maka akan rela berkorban, tanpa pamrih, percaya pada kemampuan sendiri, dan pantang mundur. Nilai yang terkandung dalam semangat nasionalisme harus dapat direvitalisasi dan diaktualisasikan dijadikan sebagai nilai-nilai spirit dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Selain contoh sisi positif dari semangat nasionalisme yang dimiliki para generasi muda, ada juga sisi negatif dengan beberapa kecenderungan menipisnya jiwa nasionalisme dikalangan generasi muda. Hal ini dapat dilihat dari beberapa tolak ukur yaitu pola dan gaya hidup remaja yang tidak mencerminkan budaya Indonesia, kurang apresiasinya generasi muda terhadap kebudayaan asli Indonesia, dan sebagainya. Kondisi ini sedikit banyak dipengaruhi oleh pesatnya arus globalisasi yang melanda dunia. Nasionalisme generasi muda dapat terkikis karena tuntutan jaman yang sanggup mengubah gaya hidup seseorang. Apalagi untuk generasi muda yang memang hidup di jaman yang serba cepat dan serba modern. Segala aktivitas bahkan karakter manusia pun dapat berubah. Semakin majunya arus globalisasi membuat rasa cinta dan bangga terhadap budaya dapat berkurang, dan secara perlahan rasa bangga terhadap budaya sendiri bisa menghilang. Selain itu membuat berkurangnya rasa memiliki terhadap bangsa sendiri. Dengan kata lain jiwa nasionalisme generasi muda asli Indonesia menjadi taruhannya.

Nasionalisme adalah rasa cinta terhadap tanah air. Saat ini Nasionalisme dapat diwujudkan dengan terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan, disiplin membuang sampah ditempatnya, tidak menyebarkan berita hoaks, menasehati orang berbuat salah atau sekedar menjadi pribadi yang menghargai dan tepat waktu. Saat ini perang yang terjadi bukanlah perang fisik, tetapi perang opini di media sosial, untuk itu generasi muda melawannya dengan menjadi pribadi yang berpikir kritis, analitis dan tidak mudah terbawa arus. Karena membentuk diri menjadi pribadi yang memiliki rasa nasionalisme yang baik, maka akan sangat berguna bagi bangsa dan negara. Bukan tidak mungkin dimasa depan, semua generasi



muda di adalah generasi muda yang berkarakter dan memiliki jiwa nasionalisme yang kuat dalam berbangsa.

Potret Generasi Muda Saat Ini

Klasifikasi penduduk Indonesia berdasarkan generasi, didominasi oleh Generasi Z dan Generasi Y (Milenial), dengan proporsi masing-masing 27,94 persen dan 25,87 persen. Generasi Z adalah mereka yang lahir tahun 1997-2012, yang saat ini diperkirakan berusia 8-23 tahun, sementara Generasi Milenial (gen Y) lahir di tahun 1981-1996 dan saat ini diperkirakan berusia 24-39 tahun (BPS,2020).

Generasi millennial (gen Y) terbiasa dengan kehidupan yang berbasis digital application, dan saat ini menjadi isu utama dalam berbagai lini. Akan tetapi di sisi lain, generasi millennial rentan akan *social media harassment* hingga persoalan *cybercrime* yang memberikan pengaruh negatif terhadap kematangan pikir generasi muda. Generasi Y dikenal dengan sebutan generasi millennial atau milenium. Generasi Y ini banyak menggunakan teknologi komunikasi instant seperti email, SMS, instant messaging dan lain-lain. Hal ini dikarenakan generasi Y merupakan generasi yang tumbuh pada era internet booming (Putra, 2016). Tidak hanya itu saja, generasi Y ini lebih terbuka dalam pandangan politik dan ekonomi, sehingga mereka terlihat sangat reaktif terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di sekelilingnya. Generasi Z lahir saat internet dan media sosial sudah menjadi bagian keseharian dalam kehidupan. Generasi Z dari kecil mereka terbiasa memegang *gadget* serta menerima arus informasi terus-menerus dari media sosial dan internet. Aplikasi-aplikasi populer digunakan oleh Gen Z (Cosmopolitan,2021). Menurut berbagai sumber generasi milineal atau generasi Y yang lahir antara tahun 1981 – 1996 memiliki karakteristik optimistik, idealis, individualis, tumbuh besar saat era digital mulai berkembang, mencari pekerjaan yang sesuai *passion*, dan mudah bosan. Pola pikirnya cenderung idealis sehingga jika ada aturan yang tidak sesuai maka tak ragu ditinggalkan. Mereka juga selalu menggunakan sosial media dalam

kehidupan kesehariannya. Generasi ini tidak hanya unggul dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, kaum muda ini kini mulai menjadi trendsetter dalam bidang sosial dan politik (Prasetyanti & Prasetyo, 2017).

Bagi generasi Z informasi dan teknologi adalah hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka, karena mereka lahir dimana akses terhadap informasi, khususnya internet sudah menjadi budaya global, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap nilai – nilai, pandangan dan tujuan hidup mereka (Putra ,2016). Keterampilan dan kemahiran dalam mengakses informasi dengan cepat merupakan ciri khas generasi muda saat ini. Mereka dengan mudah mengadopsi berbagai informasi dari internet. Sehingga seringkali terjadi mereka terlibat masalah dikarenakan ketidakmampuannya dalam menyaring informasi yang diterima. Bagaikan makan buah simalakama, menjadi tidak gagap teknologi sudah merupakan tuntutan dijamin sekarang, akan tetapi dengan teknologi juga menyebabkan seseorang mengalami masalah. Tidak jarang generasi muda ini menggadaikan nasionalismenya karena salah menyaring informasi ini. Menyebarkan berita hoax, melakukan bisnis illegal seperti prostitusi online, menghasut atau bahkan membuat gambar meme yang jelas-jelas merupakan pertanda krisis rasa nasionalisme dikalangan generasi muda.

Konsep Nasionalisme Generasi Muda

Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah seharusnya memiliki rasa nasionalisme atau rasa cinta pada bangsa dan tanah air. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam hidup bermasyarakat kita selalu bertemu dengan banyak orang yang memiliki perbedaan latarbelakang sosial, Pendidikan, asal daerah, dan perbedaan pola pikir. Tetapi bila rasa nasionalisme masih melekat dalam diri, maka perbedaan ini bukan menjadi halangan, sebaliknya menjadi suatu yang indah untuk dipahami bersama-sama. Perbedaan ini diselaraskan bersama-sama karena sama-sama memiliki nasionalisme, rasa cinta pada bangsa Indonesia. Tantangan keragaman yang ada di Indonesia adalah sangat rentan



terkikisnya rasa nasionalisme, karena generasi muda tidak lepas dengan adanya teknologi dan media sosial. Pengaruh media sosial rentan membangun pemikiran yang cenderung salah kaprah dan ekstrim. Oleh sebab itu bagi generasi muda, nasionalisme dapat diwujudkan melalui prestasi akademis, prestasi pada kegiatan-kegiatan di sekolah, mematuhi hukum yang berlaku, melestarikan budaya, mencintai produk dalam negeri, serta bersedia melakukan aksi nyata dalam membela negara.

Kesimpulan

Di era globalisasi seperti saat ini, rasa nasionalisme mulai berkurang dikalangan generasi muda. Dalam kehidupan keseharian, mereka mulai dihiasi oleh budaya dan teknologi dari luar. Apabila pengaruh budaya dan teknologi luar ini sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia tidak menjadi masalah. Masalahnya apabila kebiasaan ini bertentangan dengan kebudayaan Indonesia dan memunculkan permasalahan sampai mempengaruhi nasionalisme seseorang. Generasi muda Indonesia adalah generasi penerus bangsa. Suatu bangsa akan menjadi maju bila generasi mudanya memiliki sikap nasionalisme yang tinggi. Akan tetapi dengan perkembangan zaman yang semakin maju, ada fenomena semakin mudarnya rasa nasionalisme. Hal ini dapat mengancam dan menghancurkan bangsa Indonesia, ketahanan nasional akan menjadi lemah dan dengan mudah dapat ditembus oleh pihak luar. Diperlukan sekali upaya-upaya untuk meningkatkan semangat nasionalisme pada generasi muda sebagai penerus bangsa ini. Upaya ini dilakukan dalam system berkelanjutan, dilakukan pembiasaan dan tidak hanya dilakukan satu atau dua kali saja. Dengan demikian rasa nasionalisme generasi muda akan terus ada dan berkembang.

Daftar Pustaka

Amrah. (2016). Mengulik Pengembangan Nasionalisme Generasi Muda Di Era Globalisasi. *Jurnal Publikasi Pendidikan* <http://ojs.unm.ac.id/index.php/pubpend> Volume VI Nomor 2 Juni 2016 ISSN 2088-2092. Halaman 90-97.

- Anggraeni K dan Faturochman. (2004). Nasionalisme. Buletin Psikologi, Tahun XII, No. 2, Desember 2004. ISSN : 0854 – 7108. Halaman 61-72.
- <https://www.cosmopolitan.co.id/article/read/7/2020/21101/ini-dia-8-perbedaan-antara-generasi-millennial-dengan-gen-z>. diakses 8 Februari 2021.
- Pohlman, A. (2018). Women and Nationalism In Indonesia. *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 12(1), 13. <https://doi.org/10.17509/historia.v12i1.12114>
- Prasetyanti, R., dan Prasetyo, S. (2017). Generasi Millennial Dan Inovasi Jejaring Demokrasi Teman Ahok. *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta*. Vol. 3 No. 1 (Maret-Agustus 2017).
- Putra,YS. (2016). Theoretical Review : Teori Perbedaan Generasi. *Among Makarti* Vol.9 No.18, Desember 2016. Halaman 123-134.



Halaman ini bukan sengaja untuk dikosongkan

Bab 6

NASIONALISME PADA GENERASI MILENIAL INDONESIA

Sakroni

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Pendahuluan

Nasionalisme di berbagai negara telah menjadi perbincangan yang pelik sejak dekade 90-an. Banyak kalangan yang mulai meragukan keberadaan nasionalisme dari satu negara (Syamsurijal, 2019). Salah satu orang tersebut adalah Omae, *et al* (1995), dalam tulisan *The end of nation state* dengan sinis menyatakan negara bangsa sudah tidak ada lagi, Nasionalisme telah berakhir. Dunia yang semakin terbuka akibat globalisasi telah membuat batas antara negara makin kabur. Sekat-sekat antara negara itu bahkan telah sirna dalam perdagangan dan perputaran ekonomi. Kristeva (1993) melontarkan konsep yang nyaris sama yaitu *nation without nationalism*. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ghandi (1998), yang menjelaskan *Nation without nationalism* ini sebagai masyarakat yang masih terikat secara formal dalam satu negara, tetapi mengingkari ikatan nasionalismenya dengan negara tersebut. Fenomena ini tidak hanya terjadi di luar negeri, tetapi juga terjadi di Indonesia.

Di Indonesia, fenomena tersebut dapat terlihat dari berbagai hal seperti: 1) mulai melemahnya ikatan-ikatan sosial yang terbentuk



di masyarakat; 2) persatuan dan komitmen mempertahankan keutuhan wilayah mulai sirna (Syamsurijal, 2019). Hal ini semakin mengkhawatirkan, karena fenomena ini banyak terjadi di kalangan generasi milenial Indonesia, padahal mereka adalah generasi penerus bangsa. Fenomena ini dapat memudahkan sikap nasionalisme dan merubah *mindset* generasi milenial Indonesia sehingga lupa akan budaya dan tradisi yang sudah diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia (Sholekhah, & Suwanda, 2020). Salah satu yang memengaruhi persoalan ini adalah banjirnya informasi bagi generasi milenial dengan kemudahan mengakses internet. Hanya saja, informasi itu menyajikan soal-soal kebangsaan secara banal. Hal tersebut dapat dilihat dari maraknya berita post truth atau hoax dan perang opini yang dapat dilihat melalui media sosial.

Penyebaran informasi yang tidak sesuai dan tidak berimbang juga beredar dengan luas dan seolah-olah generasi milenial tidak peduli apakah hal tersebut akan berdampak bagi orang lain atau tidak, selama mereka menganggapnya sebagai sebuah trend untuk mendapatkan titel kekinian. Oleh sebab itu, tidak mengherankan *bullying* berujung pada pemaksaan opini pada orang lain sering terjadi. Hal tersebut pada akhirnya mengakibatkan, Pancasila, UUD, NKRI, dan Kebinekaan hanya sebatas simbol yang perlu dijaga dan dipertahankan, namun tidak memahami apalagi mempraktikkan nilai yang dikandungnya. Menurut Syamsuddin (2011) terkait memudar nasionalisme dikalangan generasi milenial Indonesia dapat disebabkan oleh dua hal yaitu: 1) efek globalisasi yang tak mampu dibendung yaitu kemajuan teknologi informasi, dimana generasi muda dengan mudahnya mampu mengakses informasi; 2) peran institusi keluarga tidak efektif dalam memberikan pengajaran dan pelajaran, padahal sebagai institusi kecil dalam relasi sosial, keluarga merupakan benteng terakhir sebuah bangsa.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mencoba menggambarkan bagaimana nasionalisme dikalangan generasi milenial akibat kemajuan teknologi dan informasi. Berdasarkan objek kajian, tulisan ini bersifat *litere* atau kepustakaan (*library research*). Menurut Subagyo (1991), *library research* adalah

suatu penelitian atau tulisan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, informasi dan berbagai macam data-data lainnya yang terdapat dalam kepustakaan. Teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, literatur, ensiklopedia, karangan ilmiah, serta sumber-sumber lain yang terpercaya baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan, serta menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan dalam rangka mengkaji dan menetapkan berbagai kebijakan terkait dengan nasionalisme dikalangan generasi milenial.

Pengertian Nasionalisme

Nasionalisme pada hakikatnya merupakan suatu ideologi negara modern, seperti halnya demokrasi dan komunisme. Bahkan kolonialisme dan imperialisme merupakan bentuk dari nasionalisme yang bersifat ekspansif (Hosbawm, 1992). Mulyana (dalam Martaniah, 1990) mendefinisikan nasionalisme dengan kesadaran bernegara atau semangat nasional. Nasionalisme atau kebangsaan bukan sekedar instrumen yang berfungsi sebagai perekat kemajemukan secara eksternal, namun juga merupakan wadah yang menegaskan identitas yang bersifat plural dalam berbagai dimensi kulturalnya.

Nasionalisme menuntut adanya perwujudan nilai-nilai dasar yang berorientasi kepada kepentingan bersama dan menghindarkan segala legalisasi kepentingan pribadi yang merusak tatanan kehidupan bersama. Selain itu, nasionalisme sebagai suatu ideologi, memerlukan aktualisasi sesuai perubahan zaman dan tantangan yang dihadapi. Musuh nasionalisme tidak lagi terbatas pada imperialisme, kolonialisme, separatisme atau ideologi-ideologi lain, namun meluas kepada hal-hal di luar itu, seperti kemiskinan, keterbelakangan, penindasan hak asasi dan sebagainya (Rachmat, 1996).



Menurut Crano (dalam De Dreu & De Vries, 2001), nasionalisme berfungsi untuk memberikan identitas sosial pada diri seseorang, yaitu apakah ia termasuk bagian suatu kelompok. Keanggotaan tersebut akan melahirkan suatu konsekuensi yang harus ditanggung oleh para anggota kelompok tersebut. Salah satu konsekuensinya yakni para anggota kelompok berupaya secara aktif mempertahankan keutuhan kelompok dari ancaman yang datang dari luar. Crano menambahkan, nasionalisme sebagai suatu identitas sosial tidak berarti sebagai suatu upaya penyeragaman para anggotanya. Setiap anggota dibebaskan memilih posisi dan porsinya sendiri, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dan tidak membahayakan keutuhan kelompok

Nasionalisme Indonesia

Nasionalisme dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dikenal sebagai sebuah kata sakti yang mampu membangkitkan kekuatan berjuang melawan penindasan yang dilakukan kaum kolonialis selama beratus-ratus tahun lamanya. Perasaan senasib dan sepenanggungan yang dialami mampu mengalahkan perbedaan etnik, budaya dan agama sehingga lahirlah sejarah pembentukan kebangsaan Indonesia (Kusumawardani, *et al*, 2004). Nasionalisme Indonesia menurut Soekarno (dalam Irwan, 2001), bukanlah *jingonasionalisme* atau *chauvinisme*, dan bukan pula suatu tiruan atau kopi dari nasionalisme barat. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang menerima rasa hidupnya sebagai wahyu. Rumusan nasionalisme Indonesia khas dan berbeda dengan nasionalisme bangsa lain, karena tujuan nasionalisme secara umum adalah memberikan label identitas terhadap suatu bangsa. Meskipun dimungkinkan ada kesamaan antara konsep suatu bangsa dengan bangsa lain, namun karena dasar setiap negara berbeda maka tiap negara akan memiliki konsep berbangsa yang unik atau khas (Martaniah, 1990).

Tonggak sejarah yang terpenting dalam proses nasionalisme di Indonesia adalah ketika lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908 yang pada masa itu merupakan organisasi modern pertama di

Indonesia. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan pemerintah sebagai hari Kebangkitan Nasional, yang perayaannya sendiri pertama kali pada tahun 1938, ketika lahirnya Parindra (Abdullah, 2001). Fakta lain yang menunjukkan perkembangan nasionalisme di Indonesia adalah pada saat kongres nasional *Centrale Sarekat Islam* (CSI) di Bandung pada tahun 1916. Tjokroaminoto, salah seorang tokoh inspirator kebangsaan Indonesia, menggunakan kata-kata “nasional” untuk menggalang persatuan yang kuat di antara semua kelompok penduduk Hindia Belanda dalam rangka mencapai tingkat kebangsaan yang mampu mendirikan pemerintahan sendiri (Rachmat, 1996).

Proses nasionalisme tersebut berlanjut dan melandasi perjuangan-perjuangan berikutnya seperti ikrar Sumpah Pemuda pada tahun 1928, yang mengilhami lahirnya konsep bertanah air Indonesia, berbangsa Indonesia dan berbahasa Indonesia. Dan dilanjutkan lahirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah melalui proses yang sangat panjang dan berat. Keberhasilan bangsa Indonesia lepas dari penjajahan melalui perjuangannya sendiri juga melahirkan pengakuan dunia bahwa nasionalisme Indonesia termasuk salah satu yang terkuat karena hanya sedikit negara dari dunia ketiga yang mampu merdeka melalui proses revolusi (Welianto, 2019).

Generasi Milenial

Penulis Elwood Carlson di dalam bukunya *The Lucky Few: Between the Greatest Generation and the Baby Boom* yang terbit pada tahun 2008, mendefinisikan Milenial lahir di antara tahun 1983–2001 berdasarkan lonjakan kelahiran setelah tahun 1983 dan berakhir dengan perubahan politik dan sosial yang terjadi setelah serangan teroris 11 September. Pada tahun 2016, lembaga U.S Pirc mendefinisikan Milenial sebagai orang yang lahir antara tahun 1983 dan 2000 (Dutzik *et al*, 2014).

Menurut Yuswohady (2016) generasi milenial (*millennial generation*) adalah generasi yang lahir dalam rentang waktu awal tahun 1980 hingga tahun 2000. Generasi ini sering disebut juga



sebagai *Gen-Y*, *Net Generation*, *Generation WE*, *Boomerang Generation*, *Peter Pan Generation*, dan lain-lain. Mereka disebut generasi milenial karena merekalah generasi yang hidup di pergantian milenium (Hidayatullah, *et al*, 2018). Secara bersamaan di era ini teknologi digital mulai merasuk ke segala sendi kehidupan.

Berdasarkan hasil penelitian dari Lancaster & Stillman (2002) generasi Y dikenal dengan sebutan generasi milenial atau milenium. Ungkapan generasi Y mulai dipakai pada editorial koran besar Amerika Serikat pada Agustus 1993. Generasi ini banyak menggunakan teknologi komunikasi instan seperti email, SMS, *instant messaging* dan media sosial seperti *facebook* dan *twitter*, IG dan lain-lain, sehingga dengan kata lain generasi Y adalah generasi yang tumbuh pada era *internet booming*. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Taylor dan Keeter (dalam Turner, 2013) yang mengatakan bahwa generasi milenial merupakan generasi pertama yang memiliki kontak rutin dengan seluruh informasi yang diakses melalui internet. Generasi ini menjadikan globalisasi sebagai referensi utama dalam menjawab isu kekinian; mengetahui fakta kekinian; mengetahui perkembangan video, lagu-lagu, film dan berita dalam waktu yang bersamaan.

Suryati Veronika, *et al*, (2016) dalam kajian menjelaskan bahwa beberapa macam karakteristik dari generasi milenial yaitu: 1) milenial lebih percaya *user generated content* (UGC) daripada informasi searah; 2) milenial lebih memilih ponsel dibanding TV; 3) milenial wajib punya media sosial; 4) milenial kurang suka membaca secara konvensional; 5) milenial cenderung tidak loyal namun bekerja efektif; 6) milenial cenderung melakukan transaksi secara *cashless*; 7) milenial lebih tahu teknologi dibanding orang tua mereka; 8) milenial memanfaatkan teknologi dan informasi; 9) milenial cenderung lebih malas dan konsumtif.

Studi mengenai generasi millennial telah banyak dilakukan oleh pada akademisi baik secara individu maupun kelompok. Seperti riset yang dilakukan oleh Pew Research Center (2010) yang merilis hasil riset dengan judul *Millenials: A Portrait of Generation Next*. Hasil riset tersebut secara rinci menjelaskan keunikan dari generasi

milennial dibanding dengan generasi sebelumnya yaitu dalam penggunaan teknologi dan budaya pop atau musik. Kehidupan generasi millennial tidak bisa lepas dari teknologi terutama internet, entertainment atau hiburan sudah menjadi kebutuhan pokok bagi generasi ini (Nado, 2018).

Nasionalisme Pada Generasi Milennial di Indonesia

Nasionalisme perlu ditanamkan kepada generasi milennial Indonesia kerana mereka merupakan penerus tonggak perjuangan bangsa. Namun, saat ini nasionalisme pada generasi milennial di Indonesia mengalami ancaman terbesar karena banjirnya informasi yang didapatkan oleh generasi milennial yang disebabkan oleh kemudahan mengakses informasi di internet. Hanya saja, informasi itu menyajikan soal-soal kebangsaan secara banal. Mereka mudah mendapatkan informasi soal kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, dan Kebinekaan), tapi hanya sebatas informasi permukaan. Tak jarang hanya sekedar saling ejek-mengejek berupa meme. Banjir informasi tidak berbanding lurus dengan meningkatnya pengetahuan, soalnya informasi itu justru menyajikan realitas *post truth* (Syamsurijal, 2019).

Post truth adalah informasi yang tidak berbasis pada kebenaran fakta, tapi lebih menekankan emosional informatif (Alimi, 2018). Informasi tersebut lebih banyak bernuansa sentimen etnis dan kepentingan politik tertentu tapi dikemas sedemikian rupa sebagai kebenaran dan pengetahuan (Syamsurijal, 2019). *Post truth* banyak dimanfaatkan untuk kepentingan politik (Kresnoadi, 2019). Hal tersebut dapat dilihat dari maraknya berita *post truth* atau *hoax* dan perang opini yang dapat dilihat melalui media sosial. Tidak mengherankan *bullying* berujung pada pemaksaan opini pada orang lain. Penyebaran informasi yang tidak sesuai dan tidak berimbang juga beredar dengan luas dan seolah-olah generasi milennial tidak peduli apakah hal tersebut akan berdampak bagi orang lain atau tidak, selama mereka menganggapnya sebagai sebuah *trend* untuk mendapatkan *titel* kekinian.



Pada umumnya *post truth* melahirkan sentimen terhadap etnis dan agama tertentu. Hal ini dapat memunculkan *sektarianisme*, yaitu nasionalisme yang menganggap etnis atau agamanya yang paling juara (Hashemi, & Postel, 2017). Lalu menuju pada *ghettoisme*, yaitu hilangnya kepercayaan pada etnis atau agama lain, atas dasar superioritas atau sebaliknya merasa inferior. Puncaknya akan berakhir menjadi nasionalisme yang *tribalisme*, yaitu hanya percaya dan mengandalkan persatuan internal kelompoknya di saat yang sama tidak mau menerima keberadaan yang lain.

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam kurun waktu 2015-2018, telah melakukan penelitian tentang bagaimana posisi nasionalisme kalangan milenial dengan kehadiran teknologi informasi dan komunikasi 4.0. Hasil penelitian menunjukkan, kehadiran teknologi itu menciptakan ruang publik baru, tetapi sekaligus membentuk pula komunitas *on line* yang mendasarkan dirinya pada ikatan *primordialisme* (LIPI, 2018). Thung Ju Lan, yang mengomandoi penelitian ini menyebutkan, media sosial malah seakan-akan membelah masyarakat dalam kotak-kotak. Sering kali hal ini malah menjadi pembuka pintu untuk menyebar kebencian (Santo, 2018).

Sedangkan menurut riset yang dilakukan oleh Alvara Research Center (2014) menyatakan bahwa salah satu perilaku kaum milenial adalah kecanduan internet. Delapan dari sepuluh kaum milenial sangat aktif menggunakan internet. Penggunaan internet itu di antaranya untuk *searching* (*googling*) berbagai berita, untuk bermedia sosial dan juga digunakan bermain game. Dari menggunakan internet secara aktif ini, kebanyakan mereka mendapatkan realitas omong kosong (*bullshit*) atau hal yang bersifat subjektif-emosional yang diproduksi secara massal dan terstruktur. Informasi ini akhirnya sebagai ancaman bagi eksistensi negara Indonesia. Hal ini berakibat pada tiga hal yaitu: 1) ikatan kebangsaan semakin memudar; 2) ideologi Pancasila sebagai (*collective consciousness*) kehilangan vitalitasnya sejak bergulirnya reformasi; 3) cita-cita terwujudnya negara kebangsaan yang adil

dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 pun kehilangan maknanya (Muttaqin, 2006)

Usaha Meningkatkan Nasionalisme Generasi Milenial Indonesia

Adanya ancaman terkait nasionalisme pada generasi milenial di Indonesia maka perlu usaha untuk menanganinya. Salah satu usaha tersebut adalah dengan mengarusutamakan (mainstreaming) nilai-nilai kebangsaan (nasionalisme) dalam hal ini Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Kebinekaan pada generasi milenial. Sudah barang tentu metodenya tidak mengulangi cara-cara indoktrinasi orde baru, melalui penataran atau pelajaran yang membosankan di kelas. Menurut Syamsurijal (2019), mainstreaming ini dapat dilakukan dengan cara-cara *pop culture*. Pembuatan film pendek, komik, meme, dengan memanfaatkan media sosial (facebook, youtube, instagram, dan lainnya).

Selain itu, kemajuan teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan keragaman budaya dan nilai Indonesia, berbagai aplikasi dapat dirancang untuk menjelaskan sejarah menjadi lebih interaktif dan menarik sehingga generasi milenial menaruh minat besar dengan adanya media lain pembelajaran sejarah mereka. Pola pembelajaran yang lebih interaktif, berwarna, dan merangsang rasa ingin tahu dibutuhkan untuk menarik minat terkait budaya-budaya tradisional yang dikemas dalam penyampaian yang moderen. Dari sanalah kalangan milenial tersebut dibangun rasa nasionalisme dan pengetahuan tentang nasionalisme itu sendiri.

Kesimpulan

Perubahan zaman merupakan hal yang akan selalu terjadi seiring perkembangan masyarakat dunia, tidak terkecuali Indonesia Hal tersebut dikarenakan arus globalisasi dan kemajuan teknologi yang mempengaruhi kehidupan setiap individu masa kini. Tak terkecuali, gerak evolusi generasi muda yang saat ini dikenal dengan sebutan Generasi milenial atau Y (dan Z yang sedang berkembang). Generasi milenial adalah generasi yang hidup pada era globalisasi dan pasar bebas tak terbatas, difasilitasi oleh akses



kemajuan teknologi dan informasi tanpa batas. Kalangan milenial sendiri adalah kelompok masyarakat yang merupakan pengguna media sosial aktif sehingga generasi milenial dengan kemudahan mengakses informasi. Hanya saja, informasi itu menyajikan soal-soal kebangsaan secara banal. Pada umumnya generasi milenial menerima informasi tersebut sebagai satu hal yang benar karena bersifat *common sense* (pengetahuan umum di masyarakat). Padahal nasionalisme yang diperoleh dari media sosial maupun internet penjelasannya kurang menitik dalam menggali nilai-nilai yang terkandung dalam nasionalisme itu sendiri. Bahkan dalam banyak kasus, di media sosial, informasi soal nasionalisme itu lebih banyak bersifat *post truth*. Realitas omong kosong (*bullshit*) atau hal yang bersifat subjektif-emosional yang diproduksi secara massal dan terstruktur sehingga terkesan sebagai pengetahuan atau kebenaran. Oleh sebab itu penting mengarusutamakan (*mainstreaming*) nilai-nilai kebangsaan (nasionalisme) dalam hal ini Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Kebinekaan pada generasi milenial. *mainstreaming* ini bisa dilakukan dengan cara-cara *pop culture*. Selain itu berbagai aplikasi dapat dirancang untuk menjelaskan sejarah menjadi lebih interaktif dan menarik sehingga generasi yang baru tumbuh menaruh minat besar dengan adanya media lain pembelajaran sejarah mereka.

Daftar Pustaka

- Abdullah, T. (2001). *Nasionalisme dan Sejarah*. Bandung: Satya Historika.
- Alimi, M. Y. (2018). *Mediatisasi agama, Post Truth Dan ketahanan Nasional: Sosiologi Agama Era Digital*. Yogyakarta: LKiS
- Alvara Research Center. (2014). *Mengenal Generasi Millennial Lewat "Millennial Nusantara"*. Diakses dari <http://alvara-strategic.com/mengenalgenerasi-milenial-lewat-millennial-nusantara/> . (6 Maret 2021)
- De Dreu, C. K., & De Vries, N. K. (2001). *Group consensus and minority influence: Implications for innovation*. Blackwell Publishing.

- Dutzik, T., Inglis, J., & Baxandall, P. (2014). Millennials in motion: Changing travel Habits of young Americans and the implications for public policy.
- Gandhi, L. (1998) *Postcolonial Theory. A Critical Introduction* .NSW: Allen Unwin.
- Hashemi, N., & Postel, D. (2017). Sectarianization: Mapping the new politics of the Middle East. *The Review of Faith & International Affairs*, 15(3).
- Hidayatullah, S., Devianti, R. C., & Wibowo, I. A. (2018). Perilaku generasi milenial dalam menggunakan aplikasi Go-food. *Jurnal Manajemen dan kewirausahaan*, 6(2), 240-249.
- Hobsbawm, EJ. (1992). *Nasionalisme Menjelang Abad 21*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Irwan, A. (2001). *Nasionalisme Etnisitas*. Yogyakarta: Dian/Interfidei.
- Kristeva, J. (1993). *Nations Without Nationalism*. New York City : Columbia University Press.
- Kresnoadi (2019). Apa itu Post Truth, Dampak, dan yang Harus Kita Perbuat. Diakses dari <https://www.ruangguru.com/blog/post-truth>. (6 Maret 2021)
- Kusumawardani, A., & Faturochman, M. A. (2004). Nasionalisme. *Buletin Psikologi*, 12(2).
- Lancaster, L. C., & Stillman, D. (2002). *When Generations Collide: Who They Are. Why They Clash. How to Solve the Generational Puzzle at Work*. New York: HarperCollins.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2018). *Memaknai Nasionalisme dalam Sudut Pandang "Millenial"*. Diakses dari <http://lipi.go.id/siaranpress/Memaknai-Nasionalisme-dalam-Sudut-Pandang-Millenial/21360>. (6 Maret 2021)
- Martaniah, S.M. (1990). Konsep dan Alat Ukur Kualitas Berbangsa dan Bernegara. *Laporan Penelitian*. Tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
- Muttaqin, T. (2006). Membangun Nasionalisme Baru: Bingkai Ikatan Kebangsaan Indonesia Kontemporer. *Jakarta: Bappenas [Badan Perancang Pembangunan Nasional]*.



- Naldo, N., & Satria, H.W. (2018). Studi Observasi terhadap Penggunaan Aplikasi LINE oleh Generasi Millennial. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1).
- Omae, K. I., & Ohmae, K. (1995). *The end of the nation state: The rise of regional economies*. Simon and Schuster
- Rachmat, H.S.D. (1996). *Biduk Kebangsaan di Tengah Arus Globalisasi*. Jakarta: PT Tema Baru.
- Santo, B.S.P. (2018). *Kemajuan TI Ciptakan Ruang Publik Baru, Tapi Minim Dialog Nasionalisme*. Diakses dari <https://m.suarakarya.id/detail/81027/Kemajuan-TI-Ciptakan-Ruang-Publik-Baru-Tapi-Minim-Dialog-Nasionalisme>. (6 Maret 2021).
- Sholekhah, T. F., & Suwanda, I. M. (2020). *Pembentukan Sikap Nasionalisme Siswa Melalui Ekstrakurikuler Karawitan Di Man 2 Banyuwangi*. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 8(3), 902-916.
- Subagyo, P. J. (1991). *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, Cet Ke-1, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Syamsuddin, A. (2011). *Api Nasionalisme Kaum Muda*. Jakarta: Rmbooks PT. Wahana Semesta Intermedia.
- Syamsurijal, S. (2019). *Nasionalisme Milenial; Membaca Paham Kebangsaan Generasi Muda Di Parepare*. *MIMIKRI*, 5(2), 141-155.
- Turner, A.R. (2013). *Generation Z: Technology's Potential Impact in Social Interest of Contemporary Youth*. *The Faculty of the Adler Graduate School*
- Veronika, & Yuswohady. (2016). *Millennial Trends 2016*. Diakses dari <https://www.yuswohady.com/2016/01/17/millennial-trends-2016/> . (6 Maret 2021).
- Welianto, A. (2019). *Nasionalisme: Arti, Sejarah, dan Tujuan*. Diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/29/180000269/nasionalisme-arti-sejarah-dan-tujuan?page=all> . (6 Maret 2021)
- Yuswohady. (2016). *Millennial Trends 2016*. Diakses dari <https://www.yuswohady.com/2016/01/17/millennial-trends-2016/> . (6 Maret 2021).

Bab 7

GENERASI MILENIAL DI ERA SOCIETY 5.0 DALAM BINGKAI NILAI-NILAI NASIONALISME

Abu Huraerah

Universitas Pasundan

Pendahuluan

Sebagian masyarakat kita sudah tidak asing lagi dengan Revolusi Industri 4.0 yang berawal dari konsep industri era digital/era teknologi informasi dan komunikasi di Jerman dengan 6 pilar utama yaitu masyarakat digital, energi berkelanjutan, mobilitas cerdas, hidup sehat, keamanan sipil, dan teknologi di tempat kerja. Indonesia pun sudah menerapkan Industri 4.0 tersebut. Konsep Revolusi Industri 4.0 menggunakan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dalam penerapannya. Bagaimana dengan *Society 5.0*? *Society 5.0* adalah revolusi industri yang dirumuskan oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada bulan Maret 2017 di pameran CeBIT, Hannover, Jerman untuk menangani segala permasalahan yang terjadi di Jepang dan baru diresmikan pada 21 Januari 2019. Saat itu Jepang sedang mengalami sebuah tantangan berkurangnya populasi yang membuat penduduk/pekerja usia produktif berkurang, sehingga Jepang berusaha memperbaiki kondisi tersebut dengan menerapkan *Society 5.0*.

Society 5.0 sendiri menjadi sebuah “solusi” dari Revolusi Industri 4.0, dimana masyarakat beranggapan bahwa Industri 4.0



akan menggunakan mesin-mesin berteknologi canggih yang akan menekan jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga manusia. *Society 5.0* ini diharapkan dapat menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi canggih dapat mengurangi kesenjangan antara manusia dengan masalah ekonomi ke depannya.

Generasi milenial merupakan modal manusia (*human resource*) yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa. Generasi milenial seharusnya memberikan kontribusi yang besar untuk bangsanya. Untuk itu, generasi milenial Indonesia harus memiliki semangat nasionalisme yang tinggi dalam meneruskan dan mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai hasil perjuangan dan pengorbanan para pendiri bangsa (*the founding fathers*) dan para pejuang kemerdekaan lainnya dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Nilai-nilai nasionalisme sejatinya terus-menerus ditumbuhkembangkan pada generasi milenial agar mengakar dalam diri mereka. Nilai-nilai nasionalisme senantiasa harus dibingkai untuk generasi milenial agar tantangan-tantangan yang ditimbulkan dari perkembangan era *Society 5.0* dapat diatasi secara tepat.

Konsep Generasi Milenial

1. Pengertian Generasi Milenial

Konsep generasi memiliki dua makna dasar. Generasi dapat merujuk pada generasi keluarga atau generasi sosial, yaitu sekelompok orang yang lahir pada rentang tanggal yang sama. Namun, kelompok bukan merupakan generasi berdasarkan usianya saja, tetapi juga dalam arti statistik. Dalam penggunaan konsep sosiologis, generasi terdiri dari lapisan yang lahir dalam rentang waktu terbatas dan yang berbagi tidak hanya tanggal lahir yang sama, tetapi juga pengalaman sosial budaya yang serupa (Edmunds & Turner, 2002; Eyerman & Turner, 1998).

Kelompok generasi hanyalah salah satu cara untuk mengkategorikan sekelompok orang yang memiliki kemiripan — dalam hal ini era di mana individu dilahirkan dan ketika mereka dewasa. Tulisan ini menggunakan tahun kelahiran 1980 hingga

1999 untuk mendefinisikan kelompok milenial. Berikut adalah tabel mengenai generasi hari ini, termasuk kelompok generasi milenial.

Table 1. Today's Generations

	Born Age	(in 2012)
GI Generation	1901-1924	88-111
Silent Generation	1925-1946	66-87
Baby Boom Generation	1946-1964	48-65
Generation X	1965-1979	33-47
Millennial Generation	1980-1999	13-32
Generation Z	2000-	12 and under

Sumber: Seppanen & Gualtieri (2012)

2. Tipe Generasi Milenial

Utomo & Noormega (2020) mengungkapkan beberapa tipe generasi milenial sebagai berikut:

a. Petualang (*the adventurer*)

Ramah, energik, dan senang menjelajahi hal dan pengalaman baru. Mereka memiliki gagasan yang tak terhitung jumlahnya melayang di kepala mereka pada waktu tertentu dan mereka memprioritaskan kebebasan kreatif dalam jalur karir mereka. Menginspirasi, meyakinkan, dan penuh warna, mereka adalah pemimpin kelompok yang alami, menarik semua orang di jalur yang jarang dilalui, membawa kehidupan dan kegembiraan ke mana pun mereka pergi - perwujudan dari *'babat alas'* (membabat hutan). Petualang sangat vokal tentang pendapat dan ide mereka, termasuk tentang pandangan politik dan agama mereka. Mereka senang menyebarkan energi positif kepada keluarga dan memutuskan untuk menikah hanya jika sudah siap. Mereka mengonsumsi berita terutama dari televisi, media sosial, dan media digital. Sebagai konsumen, mereka membeli produk yang memproyeksikan citra sosial (sosial), meningkatkan akses (fungsional), dan mengurangi kerumitan (fungsional).



b. Visioner (*the visionary*)

Menginspirasi, karismatik, ekspresif, dan bersemangat. Visioner cenderung menjadi karyawan berprestasi dengan rasa yang tak terpadamkan akan pengetahuan dan menjadi wirausahawan hebat. Mereka melompat sebelum mereka melihat, memperbaiki kesalahan mereka saat mereka pergi, daripada duduk diam, mempersiapkan kemungkinan dan rencana - perwujudan dari 'tak ada rotan, akar pun jadi'. Mereka adalah pemrakarsa dalam keluarga mereka. Visioner toleran dalam pandangan agama dan politik mereka. Mereka mengonsumsi konten dari surat kabar, media digital, televisi, dan media sosial. Visioner adalah konsumen yang sangat fungsional di mana mereka membeli produk atau layanan yang memberikan informasi (fungsional), mengurangi kerumitan (fungsional), atau meningkatkan akses (fungsional).

c. Artis (*the artist*)

Penuh ide, memiliki sudut pandang yang unik, dan orientasi estetika yang kuat. Kepribadian ini bersukacita dalam menafsirkan kembali keadaan, menemukan kembali dan bereksperimen dengan diri mereka sendiri dan perspektif baru. Hal ini menimbulkan rasa spontanitas, membuat artis tampak tidak terduga, bahkan bagi teman dekat dan keluarga mereka. Mereka menggunakan estetika, intuisi, dan desain untuk membuat pilihan dan tindakan dalam mendorong batas konvensi sosial - perwujudan 'air tenang menghanyutkan'. Hal ini membuat sekolah dan lingkungan yang sangat terorganisir menjadi tantangan bagi artis. Bukan karena mereka tidak pintar, tetapi pendekatan pendidikan formal yang teratur dan ceramah sangat jauh dari pembelajaran langsung yang dinikmati artis. Sebagian besar artis unggul dalam lingkungan kerja yang individualistis dan ambigu. Seniman terbuka dalam mengungkapkan pandangan mereka tentang agama dan politik. Mereka adalah pengguna berat media sosial, media digital, dan terkadang televisi. Sebagai

konsumen, mereka membeli produk dengan cerita otentik yang kuat dan memilih bentuk daripada fungsi.

d. Pemimpin (*the leader*)

Karismatik, berorientasi pada tujuan, dan memiliki keterampilan kepemimpinan yang kuat. Para pemimpin merangkul nilai-nilai kejujuran, dedikasi, dan martabat di mana mereka dengan senang hati memimpin di jalan yang sulit - perwujudan dari 'berakit rakit ke hulu berenang renang ke tepian, bersakit sakit dahulu, bersenang-senang kemudian'. Mereka mampu melihat gambaran yang lebih besar, dengan tetap memperhatikan detail, sehingga sesuai untuk berada di posisi manajerial atau menjadi pengusaha. Para pemimpin selalu memperbarui diri dengan berita harian dan isu terkini melalui televisi, media digital, surat kabar, dan media sosial. Mereka cenderung memiliki opini yang kuat tentang politik dan agama, tetapi bertindak sangat hati-hati dalam menyampaikan pandangan mereka di depan umum. Pemimpin adalah orang tua yang peduli dan disiplin kepada anak-anaknya. Sebagai konsumen, pemimpin membeli produk yang mengedepankan kebugaran (emosional), memberikan informasi (fungsional), dan menawarkan hiburan (emosional).

e. Sosializer (*the socializer*)

Menyenangkan, ramah, dan pembuka percakapan. Tidak ada tipe lain yang bermurah hati dengan waktu dan energi mereka seperti para *socializer* dalam hal menyemangati orang lain, dan tidak ada tipe kepribadian lain yang melakukannya dengan gaya yang begitu menarik. Mereka melakukan kegiatan sosial seperti 'nongkrong', arisan, 'maen bareng', arisan dengan sangat serius dan menempatkannya pada prioritas yang tinggi, perwujudan dari '*mangan ora mangan sing penting ngumpul*' (makan tidak makan, yang penting kumpul). Sosialisator memiliki keterampilan manajemen proyek yang hebat dan bekerja paling baik di perusahaan



dengan hierarki dan batasan yang jelas. Mereka berada dalam peberitaan, karena mereka menganggapnya sebagai pembuka percakapan yang berguna. Sosialisator sering menyembunyikan pendapat mereka yang sebenarnya tentang agama dan politik, dan cenderung setuju dengan pandangan orang lain agar sesuai dengan pemikiran kelompok. Sosialisator tertarik pada produk yang menawarkan penghargaan (emosional), menciptakan nostalgia (emosional), atau memproyeksikan citra sosial (sosial).

f. Konservatif (*the conservative*)

Andal dan sederhana - perwujudan dari '*alon alon asal kelakon*' (pelan-pelan asalkan terlaksana). Kepribadian konservatif benar-benar tidak masuk akal, dan ketika mereka telah membuat keputusan, mereka akan menyampaikan fakta-fakta yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka, mengharapkan orang lain untuk segera memahami situasi dan mengambil tindakan. Mereka vokal dalam pandangan politik dan agama dan mereka berorientasi pada keluarga. Dalam lingkungan kerja, mereka bekerja paling baik sebagai pengontrol - sumber daya manusia, keuangan, atau operasional. Mereka mengonsumsi konten dari televisi dan media sosial untuk terus diperbarui. Sebagai konsumen, konservatif lebih mengutamakan produk dengan keaslian dan keterjangkauan dibandingkan dengan citra merek.

g. Kolaborator (*the collaborator*)

Sangat toleran, penuh ide, dan senang menciptakan kerjasama tim yang hebat di masyarakat. Kolaborator akan bertindak dengan kreativitas, imajinasi, keyakinan, dan kepekaan untuk memberdayakan dan menciptakan keseimbangan - perwujudan '*tut wuri handayani*' (dari belakang, seseorang harus bisa memberikan dorongan). Meskipun bersuara lembut, mereka memiliki pendapat yang sangat kuat dan akan berjuang tanpa lelah untuk ide yang mereka yakini. Mereka selalu *up-to-date* dengan berita dan tren terkini, tetapi

jarang berbagi pandangan mereka tentang politik dan agama secara terbuka. Kolaborator mengonsumsi konten melalui media sosial, media digital, dan radio. Sebagai konsumen, kolaborator membeli produk untuk memproyeksikan citra sosial (sosial), menciptakan rasa memiliki atau afiliasi (sosial), dan meningkatkan akses (fungsional).

3. Nilai dan Karakteristik Generasi Milenial

Penelitian menunjukkan bahwa generasi milenial memiliki harga diri dan ketegasan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya pada usia yang sama (Deal, Altman, & Rogelberg, 2010). Milenial dikenal fokus pada pencapaian. Mereka memiliki kebutuhan tidak hanya untuk melakukannya dengan baik, tetapi untuk unggul dan melampaui semua tujuan dan aspirasi (Kaifi et al., 2012; Kowske et al., 2010). Hal ini menuntun mereka untuk mencari peluang belajar tentang hal baru. Hauw & Vos (2010) menemukan bahwa milenial lebih bersedia untuk memberikan upaya ekstra untuk membantu organisasi agar berhasil. Mereka lebih rela pergi bekerja lembur untuk membantu organisasi. Milenial tidak hanya fokus pada pencapaian, tetapi mereka juga merasa bertanggung jawab atas tindakan mereka. Kowske et al. (2010) menjelaskan bahwa sistem pendidikan kita telah menanamkan rasa akuntabilitas dan menyebabkan generasi milenial fokus pada pencapaian tujuan. Milenial senang bekerja dalam tim dan lebih toleran dibandingkan generasi sebelumnya. Deal et al. (2010) menemukan, seperti halnya mempelajari bahasa baru, orang yang memanfaatkan teknologi pada usia dini menjadi lebih mahir daripada orang yang belajar pada usia dewasa.

Konsep *Society 5.0*

Society 5.0 adalah suatu konsep *society* yang berpusat pada manusia (*human-centered*) dan berbasis teknologi (*technology based*) yang pertama kali dikembangkan oleh Jepang. Konsep ini lahir sebagai pengembangan dari revolusi industri 4.0 yang dinilai berpotensi mendegradasi peran manusia. Melalui *Society 5.0*, kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* akan mentransformasi *Big*



Data yang dikumpulkan melalui *internet* pada segala bidang kehidupan (*the Internet of Things*) menjadi suatu kearifan baru, yang akan didedikasikan untuk meningkatkan kemampuan manusia membuka peluang-peluang bagi kemanusiaan. Transformasi ini akan membantu manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna.

Di dalam *Society 5.0*, sejumlah besar informasi dari sensor di ruang fisik terakumulasi di dunia maya. Di dunia maya, data besar ini dianalisis oleh kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), dan hasil analisisnya diumpungkan kembali ke manusia dalam ruang fisik dalam berbagai bentuk. Dalam *Society 4.0*, praktik umum adalah mengumpulkan informasi melalui jaringan dan menganalisisnya oleh manusia. Namun, dalam *Society 5.0*, orang, benda, dan sistem semuanya terhubung di dunia maya dan hasil optimal yang diperoleh oleh *Artificial Intelligence* melebihi kemampuan manusia diberi *feedback* ke ruang fisik. Proses ini membawa nilai baru bagi industri dan *society* dengan cara yang sebelumnya tidak terjadi.

Society 4.0 adalah mengumpulkan informasi melalui jaringan dan dianalisis lebih lanjut oleh manusia. Di dalam *Society 5.0*, manusia, benda dan sistem semuanya terhubung di dunia maya dan hasil optimal yang diperoleh oleh *Artificial Intelligence* (melebihi kemampuan manusia) diberi *feedback* ke ruang fisik. Proses ini membawa nilai baru bagi industri dan masyarakat dengan cara yang tidak mungkin dilakukan di era sebelumnya. Di dalam *Society 5.0* bukan lagi modal, namun data yang menghubungkan dan menggerakkan segalanya, membantu mengisi kesenjangan antara yang kaya dan kurang beruntung. *Society 5.0* merupakan kelompok yang menerapkan teknologi yang berfokus pada kehidupan manusia, yang berlandaskan pada kebiasaan *Society 4.0*.

Salah satu dampak dari Revolusi Industri 4.0 dan *Society 5.0* adalah dunia yang semakin terkoneksi sehingga tidak ada “batas” lagi antara sistem yang satu dengan sistem yang lain. Sebagai contoh adalah bocornya data personal *society* Indonesia, seperti contoh *smartphone* yang secara tidak sadar merekam segala aktivitas pengguna lalu dihimpun di dalam *Big Data*. Hal mengerikan lainnya

adalah potensi bocornya rahasia/privasi negara. Dengan adanya ini, pemerintah perlu memperkuat sistem keamanan bangsa Indonesia agar data-data rahasia mengenai negara tidak mudah diretas. Awalnya, pada *Society 4.0* mengandalkan otomatisasi, robot, *internet*, rantai pasok secara global, dan juga *Big Data* yang terbentuk dari informasi *internet*, tetapi di *Society 5.0*, *Big Data* berkembang secara signifikan. *Big Data* terbentuk dari sensor, terhubung melalui *Internet of Things*, dianalisis menggunakan *Artificial Intelligence* dan dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakat.

Nilai-nilai Nasionalisme

Nilai diartikan sebagai hal-hal atau sifat-sifat yang bermanfaat atau penting untuk kemanusiaan (KBBI, 2005). Barsky (2010) menyatakan bahwa nilai adalah “refer to the ideals to which an individual, family, group, organization, or community aspires” (merujuk pada yang hal yang dicita-citakan oleh individu, keluarga, kelompok, organisasi atau masyarakat). Sementara, menurut Mustasyir, Rizal, & Munir (2013), nilai adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Teori tentang nilai dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika.

Secara etimologi, “nasionalisme” berasal dari kata “nasional” dan “isme”, yaitu paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki kebanggaan sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa, memiliki rasa solidaritas terhadap musibah dan kekurangberuntungan saudara setanah air, sebangsa dan senegara, persatuan dan kesatuan (Budiyanto, 2006). Menurut Ensiklopedia Indonesia, nasionalisme adalah sikap politik dan sosial dari sekelompok bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan bahasa dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan dengan meletakkan kesetiaan yang mendalam terhadap kelompok bangsanya (Budiyanto, 2006).

Nilai nasionalisme dan nilai patriotisme adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air,



kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 45.

Nasionalisme adalah ajaran atau paham untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme dapat juga diartikan sebagai kesadaran suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan bangsa itu, serta semangat kebangsaan. Sementara, nasionalis adalah orang yang mencintai bangsa dan tanah airnya atau mereka yang memperjuangkan kepentingan bangsanya (KBBI, 2000).

Membingkai Nilai-nilai Nasionalisme Generasi Milenial

Dengan semakin canggih atau mutakhirnya teknologi, baik informasi maupun komunikasi serta transportasi dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Begitupun dalam bidang informasi, masyarakat sangat mudah mengakses informasi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri melalui media internet. Dalam bidang komunikasi, munculnya media komunikasi yang dari ke hari menawarkan kemudahan bagi penggunaannya dan dari waktu ke waktu yang terus berkembang menawarkan inovasi-inovasi yang bersifat efektif dan efisien, seperti *gadget*, *smartphone*, *handphone*, dan lain-lain). Dalam bidang transportasi, semakin canggihnya alat transportasi, seperti alat transportasi laut, darat, dan udara. Namun, dampak positif ini akan menjadi pintu kehancuran bagi generasi milenial, jika tidak digunakan dan dimanfaatkan dengan bijak.

Generasi milenial mempunyai tantangan yang berat di masa depan, meski kehidupannya diselimuti dengan kecanggihan teknologi. Generasi milenial ditandai dengan dengan gaya hidup *cyber*. Kehidupan sehari-hari diselimuti dengan habit berselancar di dunia maya. Mereka banyak menghabiskan waktu untuk

beraktivitas daring (dalam jaringan), dengan berselancar di media sosial seperti *streaming*, dan relasi media sosial lainnya. Bahkan salah satu lembaga riset ternama yakni *The Neilsen Global Survey* (2019), juga melakukan pengamatan kepada generasi milineal tentang habit baru belanja generasi milenial dan menyimpulkan bahwa generasi ini lebih cenderung menggunakan media internet untuk belanja (Aji, 2020).

Seiring dengan waktu, perjalanan distribusi dari segi umur dan keterampilan kelompok ini akan menciptakan penurunan rasio ketergantungan penduduk muda (*youth dependency ratio*). Kondisi ini bisa dimaknai sebagai keadaan ideal untuk menghasilkan bonus demografi. Secara terminologi disebutkan oleh Moertiningsih bahwa maksud bonus demografi adalah situasi dimana jumlah penduduk usia kerja berlipat dua kali dibandingkan dengan jumlah penduduk di bawah 15 tahun. Bahkan, *United Nation Population Division* (2020), memperkirakan 2020-2030 adalah masa jendela kesempatan (*windows of opportunity*) bagi Indonesia untuk meningkatkan dan memacu produktivitas kohor tenaga kerja produktif. Jika tidak disadari oleh generasi milineal ini, maka kesempatan itu akan hilang begitu saja, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang tidak maksimal. Dari sisi tradisi, budaya dan karakter bangsa Indonesia, sesungguhnya generasi milenial merupakan generasi yang di pundaknya ada tanggungjawab melestarikan nilai identitas bangsa yang merupakan identitas nasionalisme (Aji, 2020).

Disamping itu, dampak negatif dari kemajuan teknologi antara lain (1) banyaknya tenaga manusia yang digantikan dengan mesin akan menimbulkan pengangguran, (2) alat komunikasi yang semakin canggih akan menjadi pintu masuk bagi lahirnya kejahatan (*cyber crime*), dan lain-lain, dan (3) lunturnya kecintaan terhadap budaya sendiri karena terlalu banyak budaya asing yang masuk dan dianggap lebih modern dan bersifat kekinian serta dianggap lebih mewakili keinginan generasi muda yang mereka menyebutnya dengan istilah “kids zaman now”. Hal ini menjadi tugas kita kemudian untuk terus-menerus saling mengingatkan bahwa bangsa kita yang besar ini lahir melalui perjuangan para



bapak pejuang dengan pengorbanan dan perjuangan yang sangat panjang. Untuk itu, perlu penanaman jiwa segenap rakyat Indonesia untuk menumbuhkembangkan rasa nasionalisme.

Generasi milenial sangat bergantung pada media sosial, tetapi mereka belum memiliki filter yang kuat untuk dapat menyaring informasi yang diterima. Hal ini nampak terlihat kecenderungan pengguna internet yang sering tidak memperdulikan nilai-nilai moral dan etika dalam berkomunikasi dan menyebarkan informasi di media sosial. Padahal etika sangat berperan guna menghindari terjadinya konflik dalam bersosialisasi. Terkait dengan hal tersebut, sejatinya diperlukan upaya untuk mbingkai nilai-nilai nasionalisme pada generasi milenial di era *Society 5.0* dengan nilai-nilai yang konstruktif seperti tekad yang kuat, kecintaan terhadap tanah air, kesadaran yang tinggi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, serta memiliki kerelaan untuk berkorban demi bangsa dan negaranya. Selain itu, generasi milenial perlu mengembangkan ide-ide yang kreatif dan inovatif, serta membangun visinya jauh ke depan (*visioner*) demi kemajuan bangsanya. Dalam konteks yang lebih luas, mereka harus senantiasa adaptif terhadap perubahan global, terutama perubahan teknologi dan informasi yang semakin cepat. Dalam hal ini, mereka juga perlu membangun jaringan kerja dan kolaborasi yang luas dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mempermudah dan mempercepat proses pembangunan bangsa, baik pembangunan fisik, mental, sosial, maupun spiritual.

Kesimpulan

Kecanggihan teknologi dan informasi di era *Society 5.0*, di satu sisi dapat memberikan peluang yang lebih bermakna bagi kehidupan manusia, seperti mempercepat akses informasi, karena dunia yang semakin terkoneksi “tanpa batas” antara sistem yang satu dengan sistem yang lainnya. Namun, di sisi lain, hal tersebut membawa perubahan pada nilai-nilai baru yang relatif tidak terjadi di era sebelumnya yang menuntut manusia untuk dapat menciptakan

ide-ide segar, aksi-aksi cepat, adaptasi yang fleksibel, dan inovasi yang kreatif.

Mencermati hal tersebut, generasi milenial adalah modal manusia (*human resource*) yang sangat penting dan strategis untuk menjawab tantangan perubahan nilai-nilai baru tersebut. Hal ini adalah selaras dengan nilai-nilai nasionalisme yang perlu dikonstruksi pada generasi milenial, seperti tekad yang kuat, kecintaan terhadap tanah air, kesadaran yang tinggi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, serta memiliki kerelaan untuk berkorban demi bangsa dan negaranya. Selain itu, generasi milenial perlu mengembangkan ide-ide yang kreatif dan inovatif, serta membangun visinya jauh ke depan (*visioner*) demi kemajuan bangsanya. Dalam konteks yang lebih luas, mereka harus senantiasa adaptif terhadap perubahan global, terutama perubahan teknologi dan informasi yang sangat cepat. Mereka juga perlu membangun jaringan kerja dan kolaborasi yang luas dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mempermudah dan mempercepat proses pembangunan bangsa, baik pembangunan fisik, mental, sosial, maupun spiritual.

Daftar Pustaka

- Aji, R., H., S. *Kebangkitan nasional: merawat nasionalisme kaum muda Indonesia*. Buletin Hukum dan Keadilan. ISSN: 2338 4638 Volume 4, Nomor 1, 2020
- Barsky, A.E. (2010). *Ethics and values in social work: An Integrated Approach for a Comprehensive Curriculum*. New York: Oxford University Press
- Budiyanto. (2006). *Pendidikan kewarganegaraan*. Jakarta: Erlangga.
- Deal, J., Altman, D., & Rogelberg, S. (2010). *Millennials at work: what we know and what we need to do (if anything)*. *Journal of Business & Psychology*, 25(2), 191-199
- Edmunds, J., & Turner, B. S. (Eds.). (2002). *Generational consciousness, narrative and politics*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield



- Eyerman, R., & Turner, B. S. (1998). *Outline of a theory of generations*. *European Journal of Social Theory*, 1, 91-106
- Hauw, S., & Vos, A. (2010). *Millennials' career perspective and psychological contract expectations: does the recession lead to lowered expectations?* *Journal of Business & Psychology*, 25(2), 293- 302
- Kaifi, T. A., Nafei, W. A., Khanfar, N. M., & Kaifi, M. M. (2012). *A multi-generational workforce: managing and understanding millennials*. *International Journal of Business & Management*, 7(24), 88-93
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2000). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Kowske, B., Rasch, R., & Wiley, J. (2010). *Millennials' (lack of) attitude problem: an empirical examination of generational effects on work attitudes*. *Journal of Business & Psychology*, 25(2), 265-279
- Mustasyir, Rizal, & Munir, M. (2013). *Filsafat ilmu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Seppanen, S., & Gualtieri, W. (2012). *The millennial generation research review*. National Chamber Foundation-The U.S. Chamber of Commerce
- Utomo, W., P., & Noormega, R. *Indonesia millennial report 2020*. Research Institute

Bab 8

PEMBENTUKAN KARAKTER NASIONALISME

Meiti Subardhini

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Pendahuluan

Sejatinya globalisasi merupakan jalan bagi setiap bangsa untuk memperkenalkan identitas dan membanggakannya di kancah internasional. Namun, tanpa disadari banyak pengaruh negatif yang ditimbulkan akibat globalisasi tersebut. Salah satu pengaruh negatif tersebut adalah lunturnya nilai nasionalisme di kalangan generasi muda (Saputra, 2013). Lunturnya nilai tersebut dapat merubah *mindset* generasi muda sehingga lupa akan budaya dan tradisi yang sudah diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia (Sholekhah, & Suwanda, 2020). Hal tersebut merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia dalam penyiapan generasi muda sebagai sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang mampu bersikap bijaksana dalam menyikapi globalisasi karena kesejahteraan bangsa sangat tergantung pada kualitas SDM nya (Muslich, 2011; Utami, 2014). Dalam penyiapan generasi muda sebagai SDM berkualitas, maka nilai nasionalisme harus ditanamkan kepada mereka agar mereka lebih mengetahui betapa pentingnya nilai nasionalisme terhadap bangsa Indonesia (Sulistyowati, & Jatingingsih, 2012; Samudra, et.al, 2018).



Nilai nasionalisme merupakan suatu sikap akan kecintaan individu terhadap bangsa atau negaranya. Wujud dari sikap nasionalisme tersebut dapat berupa sikap ingin membela tanah air dalam melindungi penguasaan dari bangsa asing. Nilai nasionalisme ini salah satunya ditentukan oleh pembentukan karakter (Subardhini, 2020). Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (*virtues*) yang diyakininya dan digunakannya sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak (Puskur, 2010). Lingkungan adalah salah satu tempat yang menentukan proses pembentukan karakter. Lingkungan yang positif dapat membentuk pribadi berkarakter positif, sebaliknya lingkungan yang negatif dan tidak sehat bisa membentuk pribadi yang negatif.

Pembentukan karakter menjadi sebuah jawaban yang tepat dalam penyiapan generasi muda sebagai SDM berkualitas yang mampu bersikap bijaksana dalam menyikapi globalisasi. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Nasionalisme melalui pembentukan karakter. Tulisan ini dilakukan melalui kajian pustaka dengan cara menelaah sumber terpercaya baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan tanpa turun langsung kelapangan. Adapun langkah-langkah dalam kajian pustaka ini adalah: pemilihan topik, eksplorasi informasi, menentukan fokus, pengumpulan sumber data, persiapan penyajian data, dan penyusunan laporan. Instrumen penulisan dalam artikel ini adalah daftar *check list* klasifikasi bahan tulisan, skema/peta penulisan dan format catatan penulisan. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode analisis isi, dimana penulis melakukan proses memilih, membandingkan, menggabungkan dan memilah berbagai pengertian hingga ditemukan yang relevan. Tulisan ini diharapkan memberikan manfaat dan masukan, serta menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan dalam rangka mengkaji dan menetapkan berbagai kebijakan terkait nasionalisme.

Pembahasan Nasionalisme

Nasionalisme dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dikenal sebagai sebuah kata sakti yang mampu membangkitkan kekuatan berjuang melawan penindasan yang dilakukan kaum kolonialis selama beratus-ratus tahun lamanya. Perasaan senasib dan sepenanggungan yang dialami mampu mengalahkan perbedaan etnik, budaya dan agama sehingga lahirlah sejarah pembentukan kebangsaan Indonesia. Nasionalisme Indonesia khas dan berbeda dengan nasionalisme bangsa lain, karena tujuan nasionalisme secara umum adalah memberikan label identitas terhadap suatu bangsa. Meskipun dimungkinkan ada kesamaan antara konsep suatu bangsa dengan bangsa lain, namun karena dasar setiap negara berbeda maka tiap negara akan memiliki konsep berbangsa yang unik atau khas (Martaniah, 1990). Pendapat yang tidak jauh berbeda disampaikan oleh Affan (2016), nasionalisme bangsa Indonesia merupakan nasionalisme yang integralistik. Yakni nasionalisme yang memiliki arti tidak membedakan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya atas dasar suku, golongan, ras, agama dan lain sebagainya. Meskipun nasionalisme Indonesia memiliki kekhasan tersendiri, tetapi pada era modern ini, nasionalisme yang tercipta di antara masyarakat Indonesia semakin memudar terutama pada generasi muda. Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya pelestarian budaya yang ada di Indonesia. Contohnya, generasi muda lebih tertarik dengan budaya kebebasan dalam pergaulan, cara berpakaian, tingkah laku dan lain sebagainya.

Menurut Syamsuddin (2011), memudar nasionalisme dikalangan generasi Indonesia dapat disebabkan oleh : 1) efek globalisasi yang tak mampu dibendung yaitu kemajuan teknologi informasi, dimana generasi muda dengan mudahnya mampu mengakses model kehidupan generasi muda yang berasal dari tempat dimana globalisasi lahir dan berkembang; 2) peran institusi keluarga tidak efektif dalam memberikan pengajaran dan pelajaran, padahal sebagai institusi kecil dalam relasi sosial, keluarga merupakan benteng terakhir sebuah bangsa dalam menangkal budaya-budaya



yang tidak diharapkan. Oleh sebab itu peran aktif dari kaum intelektual dalam meningkatkan nilai nasionalisme pada generasi muda sangatlah penting. Sebab, generasi mudalah yang harus menjaga dan meneruskan sebuah cita-cita yang telah diperjuangkan oleh generasi-generasi sebelumnya. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan oleh kaum intelektual dalam meningkatkan nilai nasionalisme pada generasi muda adalah dengan mengotimalkan pembentukan karakter.

Pembentukan Karakter

Menurut Muslich (2011), karakter adalah cara berfikir dan berperilaku seseorang yang menjadi ciri khas dari tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam keluarga, masyarakat dan negara. Karakter dapat terbentuk dari kebiasaan seseorang, dimana kebiasaan saat anak-anak dapat bertahan sampai masa remaja (Lickona, 2012). Hasil penelitian Ginanjar (2013), menyatakan bahwa keberhasilan orang tua dalam penanaman nilai-nilai kebajikan dan pembentukan karakter pada anak sangat tergantung pada jenis pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya, baik pemenuhan kebutuhan fisik (makan dan minum), kebutuhan psikologis (penuh kasih sayang, adil dan menciptakan rasa aman), serta sosialisasi norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungannya. Hal lain yang mempegaruhi keberhasilan pembentukan karakter anak di lingkungan keluarga adalah perkembang kognitif anak. Piaget (1954) membagi skema perkembang kognitif anak untuk memahami dunianya melalui empat periode utama yaitu: 1) periode sensorimotor, pada usai usia 0–2 tahun; 2) periode praoperasional, pada usia 2–7 tahun; 3) periode operasional konkrit, pada usia 7–11 tahun; 4) periode operasional formal, pada usia 11 tahun sampai dewasa.

Selain teori perkembangan kognitif dari Piaget, pembentukan karakter dapat dilihat dari teori perkembangan kognitif dari Vygotsky. Menurut Vygotsky dalam Santrock (2008), ada tiga asumsi yang menjadi inti perkembangan kognitif yaitu: 1) keahlian kognitif anak dapat dipahami apabila dianalisis dan diinterpretasikan secara

developmental dengan memeriksa asal usulnya dan transformasi dari bentuk awal ke bentuk selanjutnya; 2) kemampuan kognisi dimediasi dengan kata, bahasa yang berfungsi sebagai alat psikologis untuk membantu dan mentransformasi aktivitas mental; 3) kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi latar belakang sosiokultural. Dua teori perkembangan kognitif telah, telah menjadi kajian dalam teori belajar sosial. Menurut Bandura (1977), suatu perilaku belajar adalah hasil dari kemampuan individu memaknai suatu pengetahuan atau informasi, memaknai suatu model yang ditiru, kemudian mengolah secara kognitif dan menentukan tindakan sesuai tujuan yang dikehendaki. Dalam belajar setiap individu dapat menyadari bahwa, perilaku yang dilakukan memiliki tujuan dan konsekuensi. Selain pola asuh dan perkembangan kognitif, pembentukan karakter juga dipengaruhi oleh lingkungan. Hal tersebut karena manusia merupakan makhluk sosial. Ia hidup dan menjadi bagian tidak terpisah dari lingkungan. Hal tersebut dapat dari teori Skinner ini disebut teori "S-O-R" atau Stimulus – Organisme – Respon. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa tingkah laku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari lingkungannya (Azwar, 2009).

Implemenatasi Nasionalisme Melalui Pembentukan Karakter

Nasionalisme melalui pembentukan karakter merupakan hal penting saat ini karena pembentukan karakter pada dasarnya adalah mendorong lahirnya karakter SDM yang berkualitas dan cinta tanah air. Menurut Subardhini (2020), ada empat lingkungan dalam pembentukan karakter yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan alam. Asumsi dasar terkait empat lingkungan tersebut dalam pembentukan karakter adalah : 1) manusia merupakan makhluk sosial, ia hidup dan menjadi bagian tidak terpisah dari lingkungan sehingga manusia memiliki kesadaran dirinya menjadi bagian dari lingkungan berusaha untuk berbuat sebaik mungkin untuk lingkungannya; 2) lingkungan yang positif dapat membentuk pribadi menjadi karakter yg positif dan sebaliknya lingkungan negatif membentuk karakter



yang negatif pula; 3) lingkungan keluarga merupakan pendidikan utama dan pertama dalam menumbuh-kembangkan potensi anak, dan pembentukan pribadi atau karakter anak; 4) lingkungan sekolah sebagai peran pengganti lingkungan keluarga dalam mendidik anak yang tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya; 5) lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat sebagai swahana pembentukan karakter sehingga anak dapat memahami dan menunjukkan eksistensinya dalam kehidupan. 6) nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan mengkristal dalam suatu sistem nilai menjadi sumber rujukan dalam pembentukan pribadi atau karakter anak dan membawa anak keluar dari lorong gelap.

Empat lingkungan dalam pembentukan karakter tersebut dapat diimplementasikan sebagai berikut:

a. Keluarga

Salah satu caranya orang tua menanamkan karakter nasionalisme pada anak dilingkungan keluarga adalah bersikap jujur dan terbuka pada anak, memberi kesempatan anak berpendapat dalam menentukan sebuah pilihan, mengajak anak berunding, dan mengajak anak untuk ikut berbagi peran dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga.

Pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anak hendaknya berorientasi pada kebutuhan anak sebagai makhluk biopsikososial religius serta menggunakan cara-cara yang sesuai dengan perkembangan anak, baik perkembangan fisik-biologisnya, perkembangan psikisnya, perkembangan sosial serta perkembangan religiusitasnya. Menurut Maslow dalam Tristante (2020), variasi kebutuhan manusia tersusun dalam bentuk hierarki atau berjenjang. Setiap jenjang kebutuhan dapat dipenuhi hanya kalau jenjang sebelumnya telah terpuaskan. Jenjang itu meliputi kebutuhan pada tingkatan yang lebih rendah menuju kebutuhan yang tingkatannya lebih tinggi. Teori tersebut dikenal dengan hierarki kebutuhan "*hierarchy of need*". Jenjang kebutuhan menurut teori hierarki kebutuhan tersebut yaitu: 1)

kebutuhan fisiologi (*physiological needs*); 2) kebutuhan rasa aman (*safety needs*); 3) kebutuhan kasih sayang (*love needs*); 4) kebutuhan penghargaan diri (*esteem needs*); 5) kebutuhan pengembangan diri (*self actualization needs*).

Selain itu, dalam keluarga juga harus dilakukan pembiasaan sifat atau sikap yang baik yang diperoleh dalam lingkungan sekolah atau masyarakat yang dapat membentuk karakter anak. Cara yang lain yang dapat dilakukan adalah dengan metode belajar pengalaman (*experiential learning*). Salah satu contoh pembiasaan sederhana membentuk karakter anak cinta tanah air dalam keluarga adalah dengan mengajarkan kepada anak untuk cinta produk dalam negeri. Pada intinya keluarga adalah lingkungan yang sangat penting dalam perkembangan pembentukan karakter pada anak ketika anak sudah tidak dalam lingkungan sekolah atau masyarakat.

b. Lingkungan sekolah

Dalam lingkungan sekolah seorang figur yang berperan penting dalam pembentukan karakter seorang anak adalah guru. Guru merupakan salah satu komponen yang vital dalam proses pendidikan. Hal tersebut dikarenakan proses pendidikan tanpa adanya guru akan menghasilkan hasil yang tidak maksimal. Fungsi guru bukan hanya sekedar tenaga pengajar tetapi juga merupakan tenaga pendidik. Mendidik dalam moral dan kualitas peserta didiknya. Di sekolah, pendidikan karakter juga hendaknya diwujudkan dalam setiap proses pembelajaran, seperti pada metode pembelajaran, muatan kurikulum, penilaian dan lain-lain. Selain itu di sekolah juga diajarkan beberapa macam hal yang dapat membentuk karakter pada anak diantaranya adalah tentang pendidikan religius, kedisiplinan, toleransi, jujur dan semangat kebangsaan. Salah satu contoh semangat kebangsaan yang diajarkan disekolah demi terciptanya seorang anak yang berkarakter cinta tanah air adalah dengan melaksanakan upacara bendera setiap senin pagi.



c. Lingkungan masyarakat

Lingkungan masyarakat adalah salah satu tempat yang menentukan proses pembentukan karakter anak. Lingkungan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam membangun karakter-karakter individu yang ada di dalamnya. Salah satu cara pembentukan pribadi yang positif dan cinta tanah air melalui lingkungan masyarakat adalah dengan mengikutkan dan biasakan anak untuk ikut gotong royong bersama.

d. Lingkungan alam.

lingkungan alam merupakan salah satu faktor penting untuk melatih anak bertanggung jawab karena manusia mempunyai kedudukan sederajat dan setara dengan alam dan semua makhluk lain di alam. Kenyataan ini membangkitkan dalam diri manusia perasaan solidier, perasaan sepenanggungan dengan alam dan dengan sesama makhluk hidup lain. Salah cara pembiasaan sederhana membentuk karakter anak cinta tanah air terkait dengan alam adalah mengajari anak hemat dalam penggunaan air, serta mengajari anak untuk menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan.

Berdasarkan gambaran implementasi di atas dapat diketahui bahwa proses pembentukan karakter terjadi dalam enam tahap yaitu: 1) pengenalan, maksud dari pengenalan ini adalah seorang anak diperkenalkan tentang hal positif dari lingkungan, maupun keluarga, seperti anak diajarkan tentang kejujuran, tanggung rasa, gotong royong, bertanggung jawab dan sebagainya. 2) pemahaman, maksud dari pemahaman disini adalah memberikan pengarahan atau pengertian tentang perbuatan baik yang sudah dikenalkan kepada si anak, tujuannya agar anak tahu dan mau melakukan hal tersebut dalam keluarga ataupun dalam masyarakat; 3) penerapan, maksud dari penerapan disini adalah memberikan kesempatan pada anak untuk menerapkan perbuatan baik yang telah diajarkan; 4) pengulangan, maksud dari pengulangan disini adalah setelah si anak telah paham dan menerapkan perbuatan baik yang telah kenalkan

kemudian dilakukan pembiasaan, dengan cara melakukan hal baik tersebut secara berulang ulang agar si anak terbiasa melakukan hal baik tersebut; 5) pembudayaan, disini harus diikuti dengan adanya peran serta masyarakat untuk ikut melakukan dan mendukung terciptanya pembentukan karakter baik yang telah diterapkan dalam masyarakat maupun di dalam keluarga; 6) internalisasi menjadi karakter, jika semua sudah tercapai maka akan ada kesadaran dalam diri seseorang untuk melakukan hal yang baik tersebut tanpa adanya paksaan atau dorongan untuk melakukannya.

Kesimpulan

Dalam penyiapan generasi muda sebagai SDM berkualitas yang mampu bersikap bijaksana dalam menyikapi globalisasi dapat dilakukan melalui pembentukan karakter. Karakter merupakan kualitas moral dan mental seseorang yang pembentukannya dipengaruhi oleh berapa faktor. Pertama pola asuh, dimana pola asuh tua yang baik dapat membentuk, membimbing dan mengarahkan anak-anak mereka agar dapat menempatkan diri dengan baik di lingkungan sekitarnya, sehingga mereka bisa berkembang dengan semestinya dalam bergaul di tengah masyarakat.

Kedua kognitif, merupakan unsur penting dalam pembentukan karakter karena di dalamnya terdapat seluruh program yang terbentuk dari pengalaman hidupnya, yang merupakan pelopor segalanya. Program ini kemudian membentuk sistem kepercayaan yang akhirnya dapat membentuk pola berpikir yang bisa mempengaruhi perilakunya. Jika program yang tertanam tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran universal, maka perilakunya berjalan selaras dengan hukum alam. Hasilnya, perilaku tersebut membawa ketenangan dan kebahagiaan. Sebaliknya, jika program tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip universal, maka perilakunya membawa kerusakan dan menghasilkan penderitaan.

Ketiga lingkungan, adalah kesatuan dengan segala sesuatu ruang, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilaku yang mempengaruhi kelangsungannya. ada empat lingkungan dalam pembentukan karakter yaitu lingkungan keluarga,



lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan alam. Empat lingkungan tersebut saling berperan penting dalam pembentukan karakter seorang anak karena dalam lingkungan tersebut banyak mengandung pembelajaran baik secara langsung atau tidak langsung.

Lingkungan keluarga merupakan faktor yang paling penting dalam pembentukan karakter anak karena merupakan lembaga pendidikan pertama anak. Sedangkan lingkungan sekolah, bukan hanya tempat mencetak siswa yang unggul dan berprestasi atau sekadar tempat transfer pengetahuan tetapi sekolah berperan sebagai tempat pembelajaran yang berorientasi pada nilai-nilai moral agar anak siap terjun ke lingkungan masyarakat yang beragam. lingkungan masyarakat, merupakan tempat anak mengintegrasikan diri di tengah masyarakat sehingga perilaku anak berangsur-angsur dapat berubah sesuai dengan kondisi lingkungan masyarakat. lingkungan alam merupakan salah satu faktor penting untuk melatih anak bertanggung jawab dengan mencintai alam, anak dituntut untuk memelihara dan merawatnya.

Pengaruh lingkungan terhadap perkembangan masyarakat antara lain: 1) mencerdaskan kehidupan bangsa; 2) membawa bibit pembaruan bagi perkembangan masyarakat; 3) menciptakan warga masyarakat yang siap dan terbekali bagi kepentingan kerja di lingkungan masyarakat; 4) memunculkan sikap-sikap positif dan konstruktif bagi masyarakat, sehingga tercipta integrasi sosial yang harmonis di tengah-tengah masyarakat

Daftar Pustaka

- Affan, M. H. (2016). *Membangun kembali sikap nasionalisme bangsa Indonesia dalam menangkal budaya asing di era globalisasi*. *Jurnal Pesona Dasar*, 3(4).
- Azwar, Saifuddin. (2009). *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

- Balitbang Puskur. (2010). *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah*. Jakarta: Kemdiknas Balitbang Puskur.
- Ginanjar. H.M. 2013. *Keseimbangan Peran Orang Tua Dalam Pembentukan Karakter Anak*. Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Isam Volume (2):230-242.
- Lickona, T. (2012). *Character Matters*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Martaniah, S.M. (1990). *Konsep dan Alat Ukur Kualitas Berbangsa dan Bernegara. Laporan Penelitian*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
- Muslich, M. (2011). *Pendidikan karakter: menjawab tantangan krisis multidimensional*. Bumi Aksara.
- Piaget, J. (1954). *"The construction of reality in the child"*. New York: Basic Books.
- Riadi, M. (2017). *Pengertian, Unsur dan Pembentukan Karakter*. Diakses dari <https://www.kajianpustaka.com/2017/08/pengertian-unsur-dan-pembentukan-karakter.html>. (16 Februari 2021)
- Samudra, N. B., Mansur, M., & Syahri, M. (2018). *Peran Kegiatan Pramuka Dalam Pengembangan Sikap Nasionalisme Siswa MAN 1 Banyuwangi*. *Jurnal Civic Hukum*, 3(2), 216-225.
- Santrock, J.W. (2008). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana
- Saputra, A. B. (2013). *Profil Nasionalisme Di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Desa Geneng Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri Tahun 2012)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Sholekhah, T. F., & Suwanda, I. M. (2020). *Pembentukan Sikap Nasionalisme Siswa Melalui Ekstrakurikuler Karawitan Di Man 2 Banyuwangi*. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 8(3), 902-916.
- Subardhini, M. (2020). *Modul Matakuliah Kajian Anak*. Bandung: STKSpres
- Sulistyowati, M., & Jatiningsih, O. (2013). *Peran kegiatan ekstrakurikuler karawitan untuk mengembangkan sikap kebersamaan siswa di SMPN 1 Tarik Sidoarjo*. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 2(1), 427-441.
- Syamsuddin, A. (2011). *Api Nasionalisme Kaum Muda*. Jakarta: Rmbooks PT. Wahana Semesta Intermedia.



- Tristanto, A. (2020). *Implikasi Teori Hierarki Kebutuhan Dalam Praktik Pekerjaan Sosial Anak*. Diakses dari <https://puspendos.kemensos.go.id/Publikasi/topic/583> . (16 Februari 2021)
- Utami, S., & Rahayu, A. Y. (2014). *Implementasi Teknik Klarifikasi Nilai Berbantuan Foklor dalam Pembentukan Karakter Ke-Indonesiaan Siswa Kelas V SD*. Sekolah Dasar: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan, 23(2).20
- Yustiani, Y. (2018). *Nasionalisme Melalui Pendidikan Di Sekolah Pada Siswa SMA Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat*. Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi), 4(1), 111-123.

Bab 9

STRATEGI PEMBENTUKAN IDENTITAS NASIONAL BHINEKA TUNGGAL IKA MELALUI INFLUENCER MILLENNIAL

Dian Din Astuti Mulia & Laila Meiliyandrie Indah Wardani

Universitas Mercu Buana

Pendahuluan

Salah satu negara dengan masyarakat multikultural terbesar adalah Indonesia. Hal ini didasari dari kondisi geografis yang luas serta sosiokultural yang beranekaragam (Kusumohamidjojo, 2000). Berdasarkan hasil sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa pada bulan Desember 2020 tercatat sebanyak 271.350.000 juta jiwa jumlah penduduk di Indonesia dengan 1.128 suku bangsa. Sementara itu, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2019) menyatakan bahwa terdapat 718 bahasa lokal yang ada di Indonesia. Selain keragaman budaya, Indonesia juga mengakui enam agama secara resmi, disamping kepercayaan lain yang telah dianut oleh masyarakat Indonesia sejak zaman nenek moyang. Keragaman budaya ini menunjukkan betapa besarnya sumber daya yang dimiliki Indonesia sehingga semestinya memberikan dampak yang positif, namun disisi lain realitas kemajemukan tersebut berpotensi besar pula menimbulkan konflik sosial. Suseno (2010) menyebutkan bahwa apabila keragaman tersebut diterima dan disalurkan dalam sebuah sistem politik dan sosial yang inklusif, maka bangsa Indonesia akan mendapatkan kesempatan dan kemampuan untuk



dapat mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi. Matsumoto dan Juang (2008) menambahkan bahwa lingkungan yang beragam merupakan lingkungan yang sangat baik untuk memfasilitasi perkembangan personal. Namun, sebagaimana dua sisi mata koin, keberagaman tersebut juga dapat menimbulkan salah paham dan konflik. Keragaman budaya pada akhirnya menjadi salah satu dari tantangan terbesar yang dihadapi oleh dunia (Matsumoto dan Juang, 2008). Oleh karena itu kemampuan untuk mengelola keragaman suku bangsa diperlukan guna mencegah terjadinya perpecahan yang mengganggu kesatuan bangsa.

Konflik yang terjadi di Indonesia umumnya muncul sebagai akibat keanekaragaman etnis, agama, ras, dan adat. Seperti konflik berdarah yang terjadi antara etnis Melayu-Madura di Sambas Kalimantan Barat. Konflik horizontal antara Dayak-Madura di Sampit Kalimantan Tengah, dimana masyarakat dayak yang termarginalisasi semakin terpinggirkan oleh kebijakan kebijakan yang diskriminatif. Sementara penegakan hukum terhadap salah satu kelompok tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan di Maluku dan juga di daerah Poso, Sulawesi Tengah terjadi konflik antaumat beragama. Lembaga Survei Indonesia (2012) menjelaskan bahwa selama 14 tahun pasca reformasi dilaporkan bahwa terdapat 2.398 kasus kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di Indonesia.

Dari kasus tersebut terlihat betapa perbedaan mampu memicu munculnya konflik sosial. Perbedaan-perbedaan yang disikapi dengan antipasi justru menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan banyak orang. Oleh karena itu, bagaimana kita bersikap dalam keanekaragaman benar-benar perlu diperhatikan. Keragaman budaya yang ada, apabila tidak dikelola dengan baik justru akan menjadi bumerang bagi keutuhan dan keberlangsungan negara. Budaya dapat menjadi peran yang sentral dalam konflik, baik sebagai penyebab maupun sebagai alat untuk penyelesaian konflik.

Langkah Dalam Mengatasi Tantangan Multikulturalisme

Pada masa kepemimpinan orde baru, telah dilakukan suatu langkah dalam mengatasi tantangan multikulturalisme di Indonesia.

Usaha integrasi bangsa dilakukan dengan meminimalkan pengaruh budaya lokal (etnis) demi mengedepankan identitas nasional. Dilakukannya rekategorisasi yang berupaya menggabungkan dua kelompok atau lebih yang masing-masing memiliki identitas yang berbeda-beda kemudian akan memiliki satu identitas kelompok yang umum. Semua kepentingan selain kepentingan nasional akan dihilangkan untuk menekankan homogenitas.

Penggabungan kelompok-kelompok menjadi satu dan identitasnya dileburkan sekilas tampak ideal tetapi dalam operasionalisasinya sangat kompleks. Sebelum kelompok dileburkan dengan kelompok lain tentu memiliki tujuan, karakteristik dan homogenitas yang berbeda-beda. Salah satu yang pasti penggabungan tersebut sama saja memaksakan perbedaan yang besar masuk dalam kelompok kategori baru. Menurut Faturochman (2008) strategi ini memiliki nilai positif dan negatif. Peluang yang tercipta dengan diberlakukannya langkah ini akan menghasilkan suatu keputusan yang komprehensif, kreatif dan kuat. Namun sisi negatifnya antara lain berpotensi memunculkan konflik internal, proses pengambilan keputusan yang lambat, dan kinerjanya relatif lambat.

Langkah ini telah ditempuh dalam masa kepemimpinan orde baru, dan terbukti menimbulkan hasil akhir yang negatif. Masih segar di ingatan kita di zaman Orde Baru, pemerintahan Soeharto menggabungkan partai-partai politik yang ada dan menjadi kontestan Pemilu 1971 dari sepuluh partai menjadi 3, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pada masa orde baru salah satu kelompok etnis yang mengalami proses rekategorisasi adalah kelompok etnis Tionghoa. Anggota kelompok etnis Tionghoa bahkan diharuskan untuk melakukan proses pembauran dengan masyarakat disekitarnya. Salah satunya dengan mengubah nama dan penampilan sehingga tampak akomodatif dengan pembauran yang menjadi program pemerintah saat itu. Hal tersebut ditambah dengan tekanan yang bermuatan politis, yang ternyata justru membuat etnis



Tionghoa menjadi eksklusif. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik antara etnis Tionghoa dengan etnis lain (Hendro, 2010).

Tidak hanya rekategorisasi yang terjadi tapi cenderung mengarah pada homogenisasi. Nasionalisme mulai menjadi alat penting dalam memperkuat rezim pemerintahan dan penataan sosial. Nasionalisasi kemudian berarti homogenisasi kehidupan dalam segala aspeknya untuk menuju pada suatu tatanan yang bersifat total. Perbedaan-perbedaan bukan saja dihilangkan tetapi diperangi sebagai sebuah kesalahan melalui bahasa dan teknik politik asa tunggal. Langkah yang ditempuh pada masa orde baru selama 32 tahun tersebut dalam melakukan rekategorisasi atau seragamisasi ternyata gagal dan justru menimbulkan berbagai konflik antar etnis diberbagai wilayah, diskriminasi politik terhadap beberapa etnisitas yang dianggap membangkang terhadap pembangunan akan dilenyapkan.

Model mutual differensial melalui influencer millennial: Strategi pembentukan identitas nasional bhineka tunggal ika

Bhineka Tunggal ika merupakan suatu semboyan yang mengakui kesamaan derajat dari fenomena budaya yang beragam. Ungkapan tersebut menunjukkan suatu keinginan yang kuat untuk mengakui perbedaan tapi sekaligus memelihara kesatuan atas dasar pemeliharaan keragaman, tidak dengan menghapus atau mengingkari keragaman tersebut. Toleransi akan terhadap diversivitas atau perbedaan dihayati sebagai realitas kehidupan, hal ini menjadi asumsi dasar dari model mutual diferensial. Apabila dipahami dengan menggunakan perspektif psikologi sosial, maka model bhineka tunggal ika dapat diintegritaskan dengan menggunakan model diferensiasi mutual. Menurut Faturochman (2008) model ini menekankan pada aspek kerjasama tanpa mengabaikan kategorisasi yang ada. Struktur ini diperlukan karena komplemen yang akan dibangun adalah komplemen antar kelompok, bukan antar individu. Model ini akan memunculkan identitas ganda yang bersifat hierarkis, dengan artian seseorang tidak akan melepaskan identitas asalnya dan memiliki suatu identitas

bersama yang lebih tinggi nilainya. Secara operasional identitas yang dimaksud bisa horizontal atau sejajar ataupun vertikal, dengan demikian identitas kesukuan atau kedaerahan ditempatkan pada level yang lebih rendah dibanding identitas nasional (Faturachman, 2008). Sebagai contoh seseorang tidak melupakan asalnya sebagai orang Bugis, Minang, Batak, China atau Jawa, dan lain-lain, namun memiliki suatu kesatuan bersama yang lebih diutamakan, yaitu sebagai rakyat Indonesia. Dengan demikian, identitas kesukuan atau daerah lebih rendah nilai dan keutamaannya daripada identitas nasional. Sesuai dengan makna Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, dimana persatuan adalah harga mati.

Sisi paling penting dari model ini adalah penghargaan terhadap eksistensi kelompok- kelompok yang sudah ada. Adanya kelompok yang lebih umum dan lebih superior posisinya akan mendorong peningkatan kontak antar kelompok. Ketika hal ini terjadi maka sikap positif terhadap kelompok lain akan tumbuh. Kontak yang terus berkembang di dalam inklusivitas kelompok superior akan mengikat kelompok-kelompok tersebut untuk berasimilasi dan diharapkan prosesnya berlanjut menjadi integrasi. Prinsip utama dalam melakukan pendekatan model tersebut adalah dengan menumbuhkan pengakuan atas keragaman budaya dan penghargaan atas berbagai sistem tata nilai (Brown, 2000; Faturachman, 2008). Dalam hal ini Verkuyten (2010) menjelaskan mengenai bagaimana kontak antar budaya dalam sebuah masyarakat multikultur dapat memberikan manfaat. Melalui kontak dengan anggota kelompok budaya lain, anggota kelompok mayoritas terutama akan mendapatkan *insight* bahwa tradisi, kebiasaan, norma dan nilai yang dimiliki oleh kelompoknya (*in group*) bukanlah merupakan satu-satunya cara pandang mengenai dunia. Kontak dengan kelompok lain dapat mendorong munculnya evaluasi positif terhadap kelompok lain.

Dalam menerapkan model ini memang mendapatkan tantangan yang tidak mudah untuk diterapkan ke dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia. Di antara berbagai cara untuk mewujudkan masyarakat multikultur dan mengembalikan



bhineka tunggal ika ke arasnya adalah dengan menggunakan peran *influencer millennial*. Advokasi penerapan model mutual differensial Bhineka Tunggal ika melalui *influencer millennial* merupakan salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan akibat konflik keberagaman di Indonesia. Badan Pusat Statistik Indonesia (2020) menyatakan struktur umur Penduduk Indonesia didominasi oleh milenial dan generasi Z yaitu sebanyak 53,81 %, hal ini tentunya dapat menjadi alasan bahwa untuk menanamkan sikap toleransi terhadap keberagaman tersebut, sangat efektif jika dilakukan menggunakan media yang paling sesuai dengan karakteristik generasi millennial. Selain itu Schattke, Ferguson, dan Paulin (2014) menambahkan bahwa generasi ini merupakan generasi yang sejak lahir telah terpapar dunia digital, intensitas mereka untuk menggunakan teknologi dibandingkan generasi sebelumnya cenderung lebih tinggi. Mediakix (2018) menambahkan bahwa sebanyak 40% generasi millennial menyatakan bahwa influencer online favorit mereka lebih memahami diri mereka dengan baik daripada teman di kehidupan nyata. Hal ini lah yang menyebabkan generasi millennial memiliki ikatan unik dengan influncer online tersebut. Penelitian oleh Arnold (2018) juga menunjukkan bahwa generasi milenial bersedia membeli suatu produk jika terdapat *influencer online* favorite mereka yang berperan dalam sebuah konten sponsor.

Online Influencer didefenisikan sebagai pembuat konten (*content creator*) dalam flatform media sosial yang mampu mempengaruhi tindakan pada komunitas dengan minat yang sama (Trivedi, 2018). More and Lingam (2017) juga menambahkan bahwa opini seorang *influencer* memiliki kekuatan pendorong (*motivating force*) dalam mempengaruhi komunitas dengan memanipulasi suatu tren agar diikuti oleh *network* mereka. *Influencer online* lebih mampu mempengaruhi suatu komunitas dibandingkan seorang selebriti karena dapat menyesuaikan konten yang dibuat secara alami dan terlibat dengan pesan yang disampaikan (Trivedi, 2018).

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, penulis memberikan gagasan untuk membentuk suatu komunitas yang berisikan *influencer online* yang sebelumnya diberikan proses pelatihan dan pembimbingan. *Influencer online millennial* diberikan project dalam membuat konten mengenai model mutual diferensial Bhineka Tunggal Ika sesuai kreativitas mereka. Project tersebut bertujuan untuk menjadikan *influencer online millennial* sebagai agen perubahan untuk Indonesia yang damai dan bersatu.

Daftar Pustaka

- Arnold, A. 2018, Millennials Hate Ads But 58% Of Them Wouldn't Mind If It's From Their Favorite Digital Stars diunduh pada : <https://www.forbes.com/sites/andrewarnold/2018/01/21/millennials-hate-ads-but-58-of-them-wouldnt-mind-if-its-from-their-favorite-digital-stars/#51291db659ca>.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Potret Sensus Penduduk 2020 menuju Satu Data Kependudukan Indonesia. Diunduh pada <https://www.bps.go.id/publication/2021/01/21/213995c881428fef20a18226/potret-sensus-penduduk-2020-menusu-satu-data-kependudukan-indonesia.html>
- BPBP Kemendikbud. 2019. Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia. Diunduh pada https://petabahasa.kemdikbud.go.id/infografisdir/783Leflet_Peta_Bahasa_2019.pdf
- Brown, R. 2000. *Group Processes, second Edition*. Malden: Blackwell Publishing.
- Faturochman. 2008. *Model-model psikologi kebhinekatunggalikaan dan penerapannya di Indonesia*. Diunduh <http://fatur.staff.ugm.ac.id/file/JURNAL-kebhinekaan.pdf>.
- Hendro, E. P. 2010. *Multikulturalisme sebagai model integrasi etnik Thionghoa, Tinjauan dari Aspek Historis*. Dipetik 15 April 2014, dari <http://eprints.undip.ac.id/3249/2/7/artikel/P%27Eko.pdf>.
- Kusumohamidjojo, B. (2000). *Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*. Jakarta: Grasindo.



- Lembaga Survei Indonesia. (2012). Dicari Capres 2014 yang melindungi keberagaman. Diunduh pada <http://www.lsi.or.id/>.
- Matsumoto, D. & Juang, L. 2008. *Culture and Psychology, Fourth Edition*. Belmont: Wadsworth/ Thomson Learning Radar Malang. *Dongeng Kembangkan Kognitif Anak*. Selasa, 21 November 2010.
- Mediakix Team 2018, The Top 10 Millennial Marketing Statistics You Must Know [ONLINE] diunduh pada <http://mediakix.com/2017/03/millennial-marketing-statistics-everyone-must-know>
- More, J. S., & Lingam, C. (2017). A SI model for social media influencer maximization. *Applied Computing and Informatics*. <https://doi.org/10.1016/j.aci.2017.11.001>
- Schattke, K., Ferguson, R.J., Paulin, M. (2014). Millenials Social Behavior within a sosial media context-gender differencec count. *Academy of Management Annual Meeting Proceedings*. DOI: 10.5465/AMBPP.2014.14239
- Suseno, F. M. (2010). *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Kanisius.
- Trivedi, J. P. (2018). Measuring the comparative efficacy of an attractive celebrity influencer vis-à-vis an expert influencer – a fashion industry perspective. *Int. J. Electronic Customer Relationship Management*, 11(3), 256-271. DOI:10.1504/IJECRM.2018.093771
- Verkuyten, M. 2010. Multiculturalism and Tolerance, An Intergroup Perspective. Dalam Richard J. Crisp. *The Psychology of Social and Cultural Diversity*. Malden:Blackwell Publishing.

Bab 10

NASIONALISME DAN NILAI KEPAHLAWANAN PADA VETERAN PEJUANG

Istiana Hermawati & Warto

*Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)
Yogyakarta*

Pendahuluan

Nasionalisme dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dikenal sebagai sebuah kata sakti yang mampu membangkitkan spirit berjuang melawan penindasan yang dilakukan oleh kaum kolonialisme terhadap bangsa Indonesia selama ratusan tahun lamanya. Perasaan senasib dan sepenanggungan yang dialami mampu mengalahkan perbedaan etnik, budaya dan agama sehingga lahirlah sejarah pembentukan kebangsaan Indonesia (Kusumawardani & Faturochman, 2004). Jadi, nasionalisme Indonesia awalnya muncul sebagai reaksi terhadap kolonialisme dan pengalaman penderitaan bersama sebagai kaum terjajah selama ratusan tahun pada akhirnya menumbuhkan semangat solidaritas sebagai satu komunitas yang mendorong kesadaran bersama untuk bangkit dan hidup menjadi bangsa merdeka.

Kahin (1995) mengemukakan, bahwa nasionalisme Indonesia merupakan suatu fase yang baru mulai disebut dengan jelas dan terorganisir pada dasarwarsa abad ke 20, namun kebanyakan unsur pokok yang penting sudah ada jauh sebelumnya. Pada awal abad 20 sudah muncul kesadaran akan identitas bersama pada bangsa



Indonesia. Hal ini ditandai dengan didirikannya berbagai organisasi oleh para elite, baik yang bersifat politik, kultural maupun agama. Dapat disebutkan diantaranya, Sarekat Islam (1911), *Indische Party* (1912), Budi Utomo (1980), Taman Siswa, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Para elite itu kemudian membangun kesadaran nasionalisme melalui pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan Islam (Syaharuddin, 2017).

Kesadaran yang telah dibangun oleh para elite sehingga mampu menggerakkan berbagai elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke untuk berjuang bersama sebagai suatu bangsa ini, telah menghantarkan bangsa Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa perjuangan rakyat semesta dari berbagai daerah di Indonesia dalam upaya mengusir penjajah dan dalam memperoleh kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia merupakan implementasi dari nasionalisme yang tumbuh dan bergelora dalam sanubari para pejuang bangsa.

Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perjuangan mengusir penjajah di Indonesia terus dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana diketahui dari catatan sejarah, bahwa pada tanggal 19 Desember 1948 saat bangsa Indonesia sedang menikmati suasana merdeka selama sekitar tiga tahun, rakyat dikejutkan suara letusan senapan dan bom tentara Belanda dalam upaya menduduki kembali untuk yang kedua kali, setelah terlebih dahulu berhasil menduduki beberapa wilayah Indonesia seperti Madiun, Bojonegoro, Surakarta, Banten dan Banyuwangi. Tentara Belanda menduduki kembali wilayah Indonesia pertama kali pasca proklamasi pada tanggal 14 Juli 1947, yang kemudian dilakukan perjanjian *Renville*.

Pada tanggal 20 Desember 1948, aparat negara selaku penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia bersama masyarakat kota Yogyakarta mengungsi secara besar-besaran ke pelosok desa. Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang merupakan embrio Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga ikut mengungsi, bahkan mendirikan basis perjuangan di perdesaan. Pada saat itu,

terjadi reaksi spontan dari sebagian rakyat terutama generasi muda yang berani ikut berjuang dalam upaya mengusir kembali tentara pendudukan Belanda. Selama Kota Yogyakarta dalam pendudukan tentara Belanda, sebagian generasi pemuda pemberani tersebut ikut berjuang, misalnya sambil berjualan hasil bumi ke kota menjadi mata-mata BKR dengan memberikan informasi sasaran penyerangan BKR pada malam hari. Di samping itu juga membantu membawakan dan menyimpan senjata yang digunakan BKR dengan menyamar misalnya menjadi bakul jamu gendong, peminta-minta, dan penjual makanan keliling. Sebagian pemuda yang lain berjuang dengan menyediakan bahan logistik dan dapur umum atau menolong dan pengusahakan pengobatan bagi anggota BKR yang sakit ataupun terluka dalam medan pertempuran.

Perjuangan dan perlawanan mengusir penjajah dalam upaya mempertahankan kemerdekaan juga dilakukan oleh warga masyarakat Yogyakarta, tidak terkecuali masyarakat Kabupaten Bantul yang menjadi lokasi penelitian ini. Syahrowardi (95 tahun) selaku ketua Legiun Veteran Republik Indonesia Cabang Kabupaten Bantul menuturkan, bahwa perjuangan atau perlawanan rakyat waktu itu utamanya bermodal do'a dan semangat juang yang menggelora dengan prinsip *rawe-rawe rantas, malang-malang putung*, yang secara tersurat berarti semua yang merintang akan diberantas dan semua yang menghalangi akan dipatahkan. Sementara secara tersirat bermakna, bahwa dalam berperang atau melawan/mengusir penjajah tidak ada kata menyerah (pantang menyerah) sampai titik darah penghabisan, sekalipun harus berkorban pikiran, tenaga, harta benda, bahkan nyawa.

Ungkapan lokal yang merupakan semboyan masyarakat setempat pada masa itu mampu menggerakkan dan mengobarkan semangat juang rakyat Yogyakarta khususnya masyarakat Bantul dalam mengusir pendudukan kembali penjajah Belanda. Semboyan *rawe-rawe rantas, malang-malang putung* berlaku hingga pada saat sekarang dan masih melandasi daya perjuangan bangsa dan pengabdian warga masyarakat Bantul dalam berbagai aspek kehidupan. Pengalaman berjuang mempertahankan kemerdekaan



tentunya membuat para veteran pejuang sangat memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kepahlawanan dalam hidup sehari-hari, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara (Warto, 2016).

Menghadapi fenomena yang terjadi, sebagian masyarakat ada yang memiliki nyali besar dan berani ikut serta berjuang membantu BKR dalam mengusir penjajah. Risiko yang mereka alami jika perbuatan diketahui tentara pendudukan Belanda adalah hilangnya nyawa atau paling tidak dipenjarakan. Bermodal semangat juang membara, para pejuang ini bahu-membahu mengusir penjajah Belanda. Mereka tidak berpikir sedikitpun tentang imbalan atas perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan dalam upaya mengusir penjajah Belanda. Generasi muda yang mau berjuang dengan mempertaruhkan jiwa dan raga pantas dalam mengusir penjajah pasca proklamasi 17 Agustus 1945 ini disebut veteran pejuang. Para veteran pejuang ini merupakan seorang patriot sejati yang rela mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk kepentingan bangsa dan negaranya.

Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 adalah warga negara Republik Indonesia yang dalam revolusi fisik antara 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 telah ikut berjuang secara aktif untuk mempertahankan negara Republik Indonesia di dalam kesatuan bersenjata resmi atau kelaskaran yang diakui oleh pemerintah pada masa perjuangan tersebut. Berdasar data yang dicatat Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) cabang Kabupaten Bantul, jumlah veteran pejuang di wilayah kabupaten ini pada tahun 2019 sebanyak 477 orang. Sementara keberadaan janda/duda veteran pejuang bahkan lebih banyak yakni berjumlah 634 orang. Mereka rerata berusia antara 61 hingga 95 tahun, sehingga dapat dipastikan bahwa pada masa mendatang para veteran pejuang di Kabupaten Bantul ini berangsur-angsur secara alami akan terus semakin berkurang, bahkan suatu saat akan mengalami “kepunahan”.

Mencermati kondisi di lapangan, yakni dengan terus semakin berkurangnya jumlah para veteran pejuang karena faktor usia tersebut, maka dirasa perlu untuk mengidentifikasi profil veteran pejuang dan mengukur nilai-nilai kepahlawanan yang ada padanya. Pengukuran nilai-nilai kepahlawanan pada pelaku sejarah ini memiliki fungsi strategis terhadap pembentukan karakter bangsa (*nation character building*). Hal ini merupakan salah satu cara untuk membangun kesadaran sejarah dalam rangka memupuk nasionalisme/kebangsaan, terutama kepada anak muda yang akan menjadi pewaris bangsa.

Nilai kepahlawanan ini memiliki dayaguna bagi warga masyarakat, terutama generasi muda dalam pelaksanaan pembangunan guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sebagai pewaris dan penerus cita-cita bangsa, generasi muda diharapkan mampu merevitalisasi dan mengimplementasikan nilai-nilai kepahlawanan yang diwariskan para veteran pejuang. Revitalisasi dan internalisasi nilai kepahlawanan ini sangat diperlukan dalam menanamkan spirit nasionalisme pada generasi muda sehingga dapat menjadi modal dalam mengatasi berbagai permasalahan bangsa, termasuk permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang semakin masif.

Patriotisme, Nilai Kepahlawanan dan Nasionalisme.

Pada bahasan sebelumnya disebutkan, bahwa veteran pejuang merupakan seorang patriot sejati yang rela berjuang tanpa pamrih dengan mempertaruhkan jiwa dan raganya demi kepentingan bangsa dan negara. Patriot menurut *Oxford Learner's Dictionaries* (2021) dimaknai sebagai orang yang mempertahankan maupun memperjuangkan kebebasan atau hak tanah air atau pembela negara. Dalam *New Webster's Dictionary* patriot diartikan sebagai orang yang cinta tanah airnya dan akan melakukan apa saja demi untuknya (Muslim et al., 2004). Dengan demikian seorang patriot merupakan seorang yang cinta pada negaranya dan akan berbuat apa aja untuk mempertahankannya. Ia rela berkorban jiwa, raga, dan harta benda demi nusa dan bangsanya. Sikap berani, pantang



menyerah dan rela berkorban demi bangsa dan negara inilah yang disebut dengan patriotisme.

Patriotisme berasal dari kata "*patriot*" dan "*isme*" yang berarti sifat kepahlawanan atau jiwa pahlawan atau heroism dan patriotism (dalam Bahasa Inggris). Hal yang ditonjolkan dalam patriotisme adalah semangat juang yang tinggi, mendaulatkan kedudukan, status serta pengaruh bangsa dan negara. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2010) menjelaskan, bahwa nilai cinta tanah air atau patriotisme merupakan cara berfikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap Bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsa. Nilai patriotisme seperti kesetiaan, keberanian, rela berkorban, kesukarelaan, cinta akan bangsa dan negara perlu ditingkatkan untuk membentuk rakyat Indonesia yang patriotik dan bertanggungjawab pada bangsa dan negara (Rashid, 2004). Patriotisme ini banyak dimiliki oleh para pahlawan atau pejuang bangsa, termasuk veteran pejuang.

Pahlawan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2021) adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran atau pejuang yang gagah berani. Jadi pahlawan adalah orang yang dengan gagah berani memperjuangkan kebenaran, mengabdikan diri mereka dengan tanpa pamrih untuk kemaslahatan agama, negara dan bangsa. Adapun nilai Kepahlawanan menurut Firdiani (2015) adalah mutiara, makna, ataupun hikmah dari perjuangan para pahlawan yang dapat dikaji, dihayati, dan diteladani oleh setiap generasi muda saat ini dan pada masa mendatang. Kementerian Sosial (2017) merumuskan, nilai kepahlawanan sebagai suatu sikap dan semangat perjuangan dari para pahlawan yang menunjukkan keberanian secara luar biasa dengan bertindak tanpa pamrih, baik secara pribadi maupun golongan, serta memiliki moral, mental, dan perilaku yang mengandung suritauladan bagi bangsanya. Rumusan pengertian dari Kementerian Sosial tersebut dapat ditegaskan, bahwa nilai kepahlawanan adalah suatu sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh seorang pahlawan semasa hidupnya dalam berjuang, yang

meliputi: a) memiliki semangat dan sikap keberanian yang luar biasa. b) bertindak tanpa pamrih pribadi atau golongan. c) memiliki moral, mental, dan perilaku yang mengandung suritauladan.

Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Kepahlawanan yang dirumuskan Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial, Kementerian Sosial (2017) menyatakan, bahwa nilai-nilai kepahlawanan yang perlu ditumbuhkembangkan kepada generasi muda penerus cita-cita bangsa mencakup sejumlah sikap dengan ciri-ciri: a) memiliki sikap militansi. b) berjiwa gagah berani. c) sanggup berkorban tanpa pamrih demi kepentingan nusa, bangsa, dan negara. d) memiliki kepercayaan pada kemampuan diri sendiri. e) memiliki tanggung jawab yang besar. f) bercita-cita tinggi. g) mempunyai wibawa serta pengaruh besar. h) berkepribadian kuat. i) mempunyai kemampuan menghimpun semangat perjuangan. Kesembilan sikap dari dimensi nilai kepahlawanan tersebut merupakan indikator untuk menentukan kadar nasionalisme veteran pejuang yang menjadi subjek dalam penelitian ini.

Secara etimologis, term nasionalisme (*natie* dan *national*) berasal dari Bahasa Latin (*natio*) yang berarti berbangsa yang dipersatukan karena kelahiran. Kata *natio* itu sendiri berasal dari kata *nascie* yang berarti dilahirkan. Nasionalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimaknai sebagai paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Jadi, nasionalisme dapat diartikan sebagai suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (*nation*) dengan mewujudkan suatu konsep identitas Bersama untuk sekelompok manusia yang memiliki tujuan dan cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional. Nasionalisme juga dimaknai sebagai rasa ingin mempertahankan negaranya, baik secara internal maupun secara eksternal (wikipedia.org).

Prasetyawati (2014) mengemukakan, bahwa nasionalisme berasal dari kata “nasional” dan “isme” yaitu paham kebangsaan yang mengandung makna, kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki kebanggaan sebagai bangsa atau memelihara kehormatan bangsa, memiliki rasa solidaritas terhadap masalah dan



kekurangberuntungan saudara setanah air, sebangsa, senegara, serta persatuan dan kesatuan. Menurut Rupert Emerson, nasionalisme merupakan komunitas orang-orang yang merasa bahwa mereka bersatu atas dasar elemen-elemen penting yang mendalam dari warisan bersama dan mereka memiliki takdir bersama menuju masa depan (Dault, 2005).

Hans Kohn mengemukakan, bahwa nasionalisme adalah paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan (Zaidatunniaamah, 2013). Jadi, nasionalisme adalah sebuah paham atau ajaran tentang cinta dan kesetiaan terhadap negara kebangsaan. Moesa (2007) menegaskan, bahwa nasionalisme mengandung suatu sikap mental di mana loyalitas tertinggi dari individu adalah untuk bangsa dan negara. Anwar (2014) menyatakan, bahwa nasionalisme merupakan konsep yang diyakini berfungsi untuk menjaga keutuhan. Nilai-nilai nasionalisme dapat dikatakan sebagai perasaan yang mendalam yang hanya dapat dipikirkan dan dihayati oleh manusia dalam membela serta mempertahankan negara (Sholichiyah, 2014).

Sartono Kartodirjo mengungkapkan, bahwa terdapat lima prinsip yang terkandung dalam nasionalisme, di mana antara satu prinsip dengan prinsip yang lain saling terkait dalam membentuk wawasan nasional. Kelima prinsip tersebut antara lain: (1) kesatuan (*unity*), yang dinyatakan sebagai *conditio sine qua non*, syarat yang tidak bisa ditolak; (2) kemerdekaan (*liberty*), termasuk kemerdekaan untuk mengemukakan pendapat; (3) persamaan (*equality*), bagi setiap warga untuk mengembangkan kemampuannya masing-masing; (4) kepribadian (*personality*) yang terbentuk oleh pengalaman budaya dan sejarah bangsa; (5) *performance*, dalam arti kualitas atau prestasi yang dibanggakan kepada bangsa lain (Moesa, 2007).

Bertitik tolak dari beberapa pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa veteran pejuang merupakan seorang patriot bangsa yang telah mendedikasikan dirinya untuk berjuang dalam mencapai kemerdekaan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia serta mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para veteran pejuang ini ditetapkan pemerintah sebagai penerima Tanda

Kehormatan Veteran Republik Indonesia karena terbukti memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme yang tinggi.

Studi Tentang Nilai Kepahlawanan Pada Veteran Pejuang di Bantul Yogyakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan profil veteran pejuang di Kabupaten Bantul dan mengukur nilai-nilai kepahlawanan yang ada padanya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan gabungan (*mix methods*). Creswell (2016) mengemukakan, dalam penggunaan *mixed method* peneliti melakukan studi kuantitatif, melakukan analisis, dan membangun penjelasan terhadap hasilnya, dan memberikan penjelasan lebih detail melalui studi kualitatif. Tashakkori & Teddlie (2020:73) menyatakan, dalam desain metode campuran, peneliti melakukan studi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam tingkat sepadan untuk memahami fenomena yang sedang diteliti. Jenis metode penggabungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah paralel konvergen, dimana data kuantitatif dan kualitatif dikumpulkan pada waktu yang bersamaan, kemudian diinterpretasikan hasilnya secara keseluruhan sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan objektif (Creswell, 2016; Sugiyono, 2014). Pertimbangan memadukan metode kuantitatif dan kualitatif agar ditemukan hasil penelitian yang lebih komprehensif dibanding hanya menggunakan salah satu metode.

Bantul dipilih sebagai lokasi penelitian karena berdasar hasil penjajakan awal di wilayah tersebut tersedia data yang dibutuhkan. Data pada tahun 2020 menunjukkan, bahwa di Kabupaten Bantul terdapat organisasi mantan pejuang bernama Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) yang beranggotakan sebanyak 477 veteran pejuang dan 634 orang janda/duda veteran. Untuk kepentingan analisis, peneliti menetapkan 30 responden (veteran pejuang) yang merupakan pengurus organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) ranting kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Bantul (17 Kecamatan). Di samping itu, peneliti juga melakukan pendalaman terhadap tujuh informan.



Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara triangulasi. Yunus (2016) menyatakan, bahwa metode triangulasi adalah suatu metode untuk mengumpulkan data dengan cara menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dengan maksud untuk memperoleh tingkat kebenaran yang tinggi. Dalam praktik di lapangan, pengumpulan data dilakukan secara triangulasi dengan menggunakan empat teknik yang berbeda yaitu kuesioner, wawancara per panduan, observasi, dan telaah dokumen. Penggunaan teknik triangulasi sebagai upaya untuk memperoleh gambaran permasalahan seobjektif mungkin, sehingga pendapatan kesimpulan yang juga objektif, lengkap dan akurat.

Data yang bersifat kuantitatif diolah menggunakan statistik deskriptif. Hal ini digunakan untuk menggambarkan distribusi sasaran penelitian dan nilai-nilai kepahlawanan, kemudian dilakukan pengategorian menurut (Azwar, 2017). Sementara data kualitatif secara deskriptif diberi makna dengan cara mereduksi data (pemilihan, pemusatan, penyederhanaan dan abstraksi data mentah) sesuai dengan tujuan penelitian. Proses analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data dan setelah pengumpulan data dengan mengacu model (Miles & Huberman, 1994).

Profil Veteran Pejuang di Kabupaten Bantul

Responden Berdasar Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden (90%) berjenis kelamin laki-laki. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012, bahwa veteran pejuang digolongkan menjadi tiga kategori, yaitu: (1) veteran pejuang kemerdekaan yang berjuang pada masa revolusi fisik pasca proklamasi antara 17 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949; (2) veteran pembela kemerdekaan yang berjuang ikut mempertahankan kedaulatan negara setelah 27 Desember 1949, yang meliputi: veteran pembela Trikora, veteran pembela Dwikora, dan veteran pembela Seroja; dan (3) veteran perdamaian yaitu pejuang yang menjadi pasukan internasional di

bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia.

Ketiga jenis perjuangan tersebut selain membutuhkan kondisi fisik yang kuat, juga memerlukan kesiapan mental dan ketahanan psikologis secara memadai serta memiliki keberanian yang luar biasa. Sehubungan dengan tuntutan persyaratan berat tersebut, maka kebanyakan kaum laki-laki yang banyak mengambil peran dan kesempatan ikut andil untuk melakukan perjuangan demi bangsa dan negara dibandingkan perempuan. Dengan demikian, keberadaan veteran pejuang yang kebanyakan berjenis kelamin laki-laki dapat dipahami.

Responden Berdasar Usia

Berdasarkan usia, responden penelitian berada pada rentang usia antara 61 tahun hingga 95 tahun dan mayoritas (83,33%) berada pada rentang usia 61-75 tahun. Rentang usia ini dalam kategori renta, dimana secara teori produktivitas seseorang pada rentang usia ini mulai menurun. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan, bahwa sebagian besar responden masih mampu mandiri, khususnya dalam aktivitas mengurus diri sendiri. Bahkan, berdasar hasil penelusuran ditemukan, bahwa mereka masih aktif mengelola kegiatan usaha yang bersifat ekonomi produktif, seperti mengelola tempat kos, memelihara ayam buras, bertani di sawah dengan menanam padi ataupun palawija, memelihara ikan/lele dengan media kolam, memelihara sapi dan kambing dan sebagainya.

Data tersebut di atas menunjukkan, bahwa veteran pejuang yang mayoritas berusia lanjut ternyata masih sehat dan dengan gigih mendayagunakan sisa tenaga dan pikirannya untuk melakukan kegiatan ekonomis produktif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidup dan menambah penghasilan keluarga. Menurut hasil wawancara, keuletan responden berjuang dalam hidup ini karena telah terinternalisasikannya nilai-nilai kejuangan atau patriotisme dalam diri mereka, sehingga apapun yang terjadi dan bagaimanapun kondisinya mereka pantang menyerah, tetap berjuang secara gigih dalam menghadapi masalah apapun, termasuk



dalam memperjuangkan kehidupannya agar mandiri dan tidak menyusahkan orang lain.

Responden Berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang mencerminkan keluasan pengetahuan atau wawasan serta kemampuan mengatasi berbagai permasalahan hidup yang dihadapi. Semakin tinggi pendidikan yang dicapai seseorang cenderung semakin dapat memahami suatu permasalahan kehidupan dan semakin terampil dalam memecahkan masalah. Berdasar hasil penelitian, mayoritas (89,97%) responden berpendidikan menengah, dengan rincian 53% SMP dan 36,67% SMA. Dengan merunut ke belakang, sebagian besar responden mengalami masa kanak-kanak di awal kemerdekaan, saat Bangsa Indonesia berjuang pada masa revolusi fisik, dengan kondisi pemerintah bersama rakyat berjuang untuk mempertahankan kedaulatan negara. Dalam kondisi yang serba terbatas pada waktu itu, ternyata responden masih berupaya mencari kesempatan untuk dapat mengenyam pendidikan formal tingkat menengah. Hal ini menunjukkan, tingginya kesadaran responden akan pentingnya pendidikan, sehingga meskipun banyak tantangan dan hambatan mayoritas responden tetap berupaya untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, meskipun penelitian ini juga menemukan sebanyak 10% responden hanya mengenyam Pendidikan Sekolah Rakyat (SR) atau jenjang Sekolah Dasar saat ini.

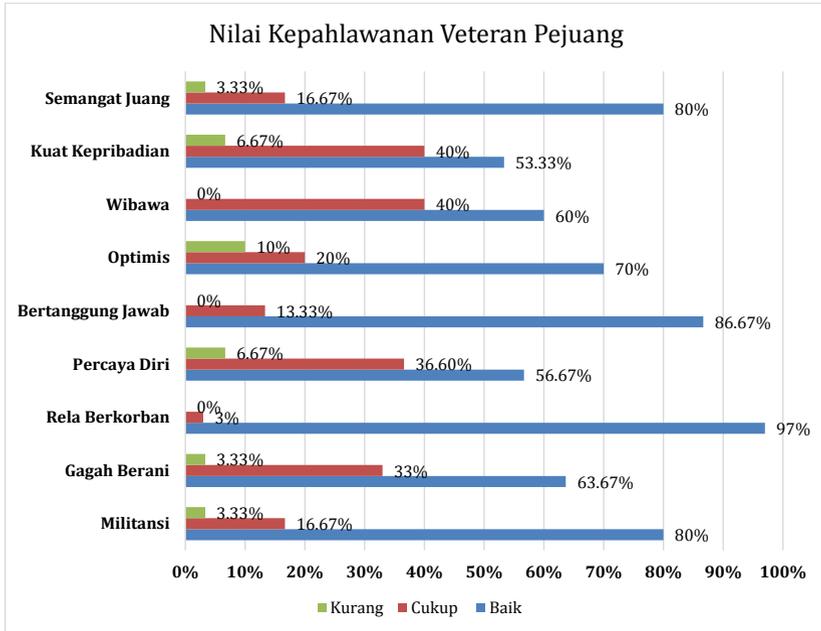
Responden Berdasarkan Pekerjaan

Melalui pekerjaan yang ditekuni, responden veteran pejuang dapat memperoleh tambahan penghasilan di luar tunjangan penghargaan (dana pensiun) yang mereka terima setiap bulan. Berdasar hasil penelitian diperoleh informasi, bahwa semua responden masih aktif bekerja atau memiliki usaha ekonomi produktif. Pekerjaan yang ditekuni responden dapat dikategorikan menjadi enam, yaitu: bertani, beternak, perikanan kolam, wirausaha, berdagang, dan menjadi karyawan.

Berdasar hasil wawancara, mayoritas responden menekuni usaha sebagai peternak (30%) dan petani (26%). Jenis peternakan yang dikelola responden adalah memelihara ayam buras, mentok (bebek), sapi dan kambing. Sedangkan pertanian yang dikelola responden meliputi: pengolah lahan sawah pengairan dengan tanaman padi, pengolah lahan pategalan dengan tanaman palawija/ sayuran, budidaya tanaman sayuran dengan media pot dan usaha warung hidup. Adapun 16,67% responden yang berwirausaha terdiri dari pengelola tempat kos, usaha catering, dan pengusaha warung makan. Selebihnya (20%) responden memiliki usaha perikanan kolam, memelihara lele dan ikan lain seperti gurameh mujair, dan nila.

Pengukuran Nilai Kepahlawanan Pada Veteran Pejuang

Pengukuran nilai kepahlawanan pada veteran pejuang ini mengacu pada sembilan indikator sikap sebagaimana termuat dalam Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Kepahlawanan Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial, Kementerian Sosial (2014). Kesembilan indikator sikap tersebut meliputi: (1) militansi, (2) gagah berani, (3) rela berkorban, (4) percaya kemampuan sendiri, (5) bertanggung jawab, (6) bercita-cita tinggi, (7) berwibawa, (8) berkepribadian kuat, dan (9) mampu menghimpun semangat perjuangan. Pengukuran nilai kepahlawanan terhadap veteran pejuang ini dilakukan terhadap sembilan indikator yang dijabarkan dalam sejumlah item pertanyaan. Skor penilaian kemudian dikategorikan ke dalam tiga tingkatan, yaitu baik, cukup dan kurang. Hasil pengukuran nilai kepahlawanan pada veteran pejuang di Kabupaten Bantul dapat disajikan pada Gambar 1 sebagai berikut.



Gambar 1. Hasil Pengukuran Nilai Kepahlawanan Responden

Berdasar data pada Gambar 1 diperoleh informasi, bahwa nilai-nilai kepahlawanan yang dimiliki responden secara umum berkategori baik (di atas 50%). Di antara sembilan indikator berkategori baik, yang paling besar diantaranya ada empat indikator yaitu: rela berkorban (97%), bertanggungjawab (86,67%), militansi (80%) dan menghimpun semangat juang yang tinggi (80%).

Penjelasan dari masing-masing indikator dapat dijabarkan sebagai berikut.

a. Sikap Militansi

Militansi dapat diartikan sebagai sikap individu yang senantiasa bersemangat tinggi dan memiliki ketangguhan dalam berjuang menghadapi kesulitan, pada konteks kajian ini adalah kesulitan dan bahaya peperangan. Hasil pengukuran sikap militansi responden menunjukkan, bahwa mayoritas responden (80%) termasuk kategori baik. Ini berarti, bahwa secara umum responden memiliki

penghayatan yang memadai atas sikap militansi. Sebagai seorang mantan pejuang, responden pernah merasakan atau mengalami berjuang mempertahankan kedaulatan negara dan membela kemerdekaan yang pada waktu itu jelas memerlukan suatu sikap atau tindakan yang militan.

Dari hasil wawancara dengan informan, diperoleh sejumlah perbuatan atau tindakan yang mengandung nilai sikap militansi yang melandasi tekad mereka dalam melakukan perjuangan, di antaranya: dalam berjuang berlandaskan do'a dan penuh kesabaran, dalam berjuang diperlukan semangat menggelora dengan penuh kegairahan, dalam melakukan perjuangan diperlukan kemampuan berkoordinasi, dan dalam berjuang perlu suatu ketegasan setiap memutuskan langkah. Beberapa sikap militansi sebagaimana dikemukakan lebih lanjut mereka implementasikan pada era mengisi kemerdekaan saat ini. Menurut pengakuan beberapa informan, sikap militansi selalu mereka terapkan dalam hidup bermasyarakat. Dalam mengatasi suatu permasalahan di lingkungan setempat senantiasa dilakukan berlandaskan do'a, kehati-hatian dan sikap sabar meskipun tetap dilakukan dengan semangat membara dan rasa senang hati. Koordinasi dan tindakan tegas dalam melangkah sebagaimana "budaya" tentara juga terus mereka kembangkan dalam mengikuti kegiatan di masyarakat.

Berkait dengan sikap militansi ini Purnomodjati (2018:16) menyatakan, generasi penerus bangsa dalam mengisi kemerdekaan harus mampu meneladani sikap militansi yang kuat untuk menghadapi berbagai ancaman pada masa mendatang. Selain itu, sikap cinta tanah air, jiwa pengorbanan, dan sikap mau berdarma bakti tanpa kenal batas akhir juga perlu dimiliki. Kesemuanya itu merupakan salah satu aktualisasi dan implementasi dari sikap militansi generasi penerus dalam bela negara. Pernyataan narasumber tersebut pada dasarnya menegaskan, bahwa dalam mengisi kemerdekaan generasi penerus wajib meneladani sikap



militansi seperti siap berkorban dan berdarmabakti terutama jika negara dalam keadaan menghadapi ancaman.

b. Sikap Gagah Berani

Gagah berani yang dimaksud dalam kajian ini adalah kondisi individu yang secara fisik bertenaga kuat dan secara mental psikologis bernyali mantap (tanpa rasa takut dan tidak gentar) dengan sikap percaya diri yang besar dalam menghadapi marabahaya termasuk risiko berperang. Hasil pengukuran sikap gagah berani menunjukkan, bahwa mayoritas responden (63,33%) termasuk kategori baik. Menurut hasil wawancara terhadap informan diperoleh informasi, bahwa nilai sikap gagah berani dalam berjuang antara lain mencakup: secara fisik bertenaga kuat dan secara mental memiliki nyali memadai untuk berperang melawan musuh demi kedaulatan negara. Secara psikologis tidak merasa takut untuk bertempur di medan laga sekalipun harus berada di garis terdepan. Tidak merasa gentar menghadapi bahaya perang meskipun harus bertaruh nyawa. Sejumlah sikap kegagahberanian tersebut menurut mereka harus ditunjukkan dalam berperang pada masa perjuangan untuk mempertahankan atau membela kemerdekaan dan kedaulatan negara pada saat itu.

Sejumlah sikap yang mengandung nilai gagah berani sebagaimana disebutkan menurut pengakuan informan selalu diimplementasikan pada kehidupan saat ini. Moeradji (71 tahun) selaku wakil ketua LVRI Cabang Bantul menyatakan, bahwa anggota legiun yang masih bertenaga kuat pernah ditugaskan untuk bergotong royong membantu warga masyarakat dalam pembangunan prasarana fisik. Menurut informan ini, dalam melaksanakan pengabdian pada era reformasi ini juga dibutuhkan sikap keberanian dan nyali yang memadai, terutama dalam rangka menegakkan suatu kebenaran. Seseorang harus memiliki nyali untuk berani menentang arus yang secara hakikat merupakan

suatu gerakan yang salah. Selain itu, seseorang juga harus memiliki sikap yang tegas dalam memberantas oknum yang cenderung membuat ketidakberesan tentang pengelolaan berbagai bidang kehidupan.

Dalam kaitan dengan sikap gagah berani tersebut Habib MS (2017:14) mengemukakan, bahwa sebagai bangsa Indonesia seseorang harus berjiwa patriotik. Jikalau di masa lalu pejuang harus membela dan menjaga kebenaran, keadilan, serta kerelaan berkorban, maka generasi penerus pada saat ini harus berani menentang dan melawan ketidakadilan, serta menegakkan kebenaran. Informan menegaskan, bahwa jiwa patriotisme sangat diperlukan dalam mengisi era kemerdekaan ini, terutama dalam memberantas ketidakadilan yang terjadi di masyarakat dalam rangka menegakkan suatu kebenaran.

c. Sikap Rela Berkorban

Rela berkorban adalah sikap individu atas kehendak atau kemauan sendiri yang bersedia (sudi) dan senang hati serta ikhlas berkorban dengan tidak mengharap imbalan. Dalam konteks penelitian ini adalah keikhlasan berjuang demi merebut dan mempertahankan kemerdekaan ataupun membela bangsa dan negara Indonesia. Hasil pengukuran sikap rela berkorban memperlihatkan, bahwa hampir seluruh responden (96,67%) dalam kategori baik.

Melalui wawancara kepada tujuh pengurus inti organisasi LVRI Cabang Kabupaten Bantul, diperoleh data berkait unsur sikap kerelaan berkorban meliputi: 1) bersedia dan siap menerima perintah atasan untuk melaksanakan tugas yang diamanatkan. 2) dalam bertugas dilakukan dengan rasa senang hati dan gembira tanpa merasa dipaksa. 3) keikhlasan berkorban mencakup pengorbanan tenaga, pikiran, harta benda, bahkan nyawa. 4) keikhlasan yang sebenarnya berlandaskan prinsip tanpa pamrih dan tidak mengharap imbalan. Sebagaimana disebutkan dalam



materi pelatihan nilai-nilai kejuangan (Abin, 2016:14), bahwa sebagai insan Indonesia harus berjiwa rela, ikhlas, dan berani berkorban, serta bekerja keras tanpa pamrih agar berdayaguna dan berhasil guna bagi bangsa dan negara.

Menurut informan, beberapa komponen sikap kerelaan berkorban sebagaimana dikemukakan mereka dayagunakan dalam berjuang melalui pertempuran baik pada masa revolusi fisik untuk mempertahankan kemerdekaan, membela kedaulatan bangsa dan negara dalam bingkai NKRI, ataupun dalam bertugas atas mandat PBB untuk mengemban misi menciptakan perdamaian dunia. Berkait dengan sikap rela berkorban, Djoko Sardjono (65 tahun) menyatakan, bahwa sebagai seorang pejuang, pada masa itu walaupun ada anggota keluarga yang sedang sakit bahkan keluarga baru berduka, apabila atasan memerintahkan bertugas, maka dirinya tetap bersedia melaksanakan tugas di medan laga. Pendalaman lanjut melalui wawancara diperoleh informasi, bahwa sikap kerelaan berkorban masih mereka dayagunakan dalam kehidupan keseharian.

Informan M. Akhir (67 tahun) mencontohkan beberapa kerelaan berkorban yang diterapkan dalam hidup bermasyarakat pada masa ini. Misalnya dirinya selalu ikhlas untuk senantiasa menanamkan nilai kejuangan bagi generasi muda pada saat mengisi agenda pertemuan unit karang taruna di dusun setempat. Menurut informan, kerelaan berkorban hendaknya terus ditumbuhkembangkan dalam kehidupan bermasyarakat seperti rela mengikuti gotong royong, kerja bakti di kampung, menolong siapapun yang membutuhkan pertolongan, membantu pelaksanaan pembangunan/kemajuan dusun baik bantuan berbentuk tenaga, pikiran, maupun harta benda. Perihal yang terpenting adalah, bahwa pertolongan atau bantuan itu hendaknya diberikan secara ikhlas tanpa mengharap imbalan, yang oleh masyarakat Jawa di istilahkan dengan ungkapan lokal *rame ing gawe sepi ing pamrih*, Ungkapan tersebut secara

tersurat berarti ramai dalam bekerja dan sepi (tidak ada) maksud tertentu yang terselubung. Sementara secara tersirat bermakna, bahwa perjuangan seseorang itu yang terpenting adalah beramai-ramai dalam melaksanakan tugas pekerjaan, dan menjauhkan diri dari maksud tertentu yang terselubung seperti ingin memperoleh pujian, mendapatkan penghargaan, atau mengharapkan suatu imbalan.

d. Sikap Percaya Kemampuan Sendiri

Percaya kemampuan sendiri adalah sikap individu yang merasa dirinya memiliki kelebihan, dan oleh karena itu mereka benar-benar yakin atas kemampuan sendiri sehingga memastikan dapat memenuhi atau mencapai target yang menjadi cita-cita dan harapannya. Hasil pengukuran sikap percaya kemampuan sendiri menunjukkan, bahwa mayoritas responden (93,33%) memiliki penghayatan yang memadai atas nilai percaya pada kemampuan sendiri, yakni sebesar 56,67% dalam kategori baik dan 36,66% dalam kategori cukup.

Melalui wawancara dengan sejumlah informan diperoleh informasi, bahwa semua informan menyatakan percaya diri atas kemampuan sendiri sangat diperlukan dalam suatu perjuangan. Berikut beberapa pandangan veteran pejuang atas sikap percaya kemampuan sendiri: 1) percaya kemampuan sendiri sangat diperlukan dengan tetap mengikuti petunjuk pimpinan. 2) percaya kemampuan sendiri ditunjukkan dengan selalu siap melaksanakan tugas atas perintah atasan. 3) sebagai bentuk tanggung jawab semua tugas dikerjakan dengan kemampuan sendiri. 4) sebagai veteran pejuang dirinya yakin mampu mewariskan jiwa, semangat, dan nilai. 5) sebagai mantan pejuang harus yakin dengan kemampuan sendiri dan siap melaksanakan tugas sosialisasi nilai-nilai perjuangan kepada generasi penerus cita-cita bangsa.



Lebih lanjut diperoleh informan, bahwa rata-rata informan masih memiliki rasa percaya diri yang memadai dan hal ini juga selalu mereka terapkan dalam kehidupan keseharian. Sebagai anggota LVRI setiap informan siap melaksanakan tugas sesuai amanat dan arahan pimpinan. Selaku warga masyarakat mereka berusaha untuk mandiri dalam melaksanakan berbagai tugas kemasyarakatan. Seorang mantan pejuang, mereka juga terus berusaha mewariskan nilai kepahlawanan yang antara lain dilakukan dalam setiap momen pertemuan warga. Sebagaimana dikemukakan Purnomodjati (2018:13), bahwa percaya kepada kekuatan sendiri yang dimaksud adalah memiliki kemandirian dalam menyelesaikan berbagai tugas yang menjadi kewajibannya. Pemateri sosialisasi nilai kejuangan ini lebih lanjut menegaskan, bahwa generasi muda penerus cita-cita bangsa hendaknya percaya dan yakin pada hari depan negara yang lebih baik mengingat potensi bangsa dan wilayah yang sangat besar. Observasi pada saat peneliti melakukan wawancara memperlihatkan, bahwa informan rata-rata masih melakukan pekerjaan secara mandiri, bahkan diantara informan ternyata juga masih mengemban tugas pengabdian menjadi pengurus kelembagaan desa seperti sebagai pengurus LVRI tingkat ranting di kecamatan, LPMD, PKK, RT, dan pengurus Gapoktan.

e. Sikap Bertanggung Jawab

Bertanggung jawab adalah sikap individu yang merasa memiliki kewajiban untuk memikul tanggung jawab atau menanggung segala sesuatunya atas risiko dari perbuatan/tindakan yang dilakukan. Hasil pengukuran sikap tanggung jawab, menunjukkan bahwa mayoritas responden (86,67%) berada pada kategori baik. Data ini menunjukkan, bahwa secara umum veteran pejuang memiliki penghayatan secara memadai atas sikap bertanggung jawab sebagai komponen nilai kepahlawanan.

Dari wawancara terhadap sejumlah informan diperoleh temuan, bahwa sikap bertanggung jawab meliputi: 1) berusaha melaksanakan kewajiban sehubungan dengan tugas seberat apapun yang diberikan. 2) berani menanggung segala risiko atas perbuatan/tindakan yang dilakukan. 3) menyadari dan mengakui setiap kesalahan yang dilakukan dan dengan berjiwa besar mau/siap meminta maaf atas kesalahan tersebut. 4) berupaya untuk tidak mengulangi kembali atas kesalahan yang diperbuat.

Sikap bertanggung jawab tersebut pada saat ini selalu diterapkan informan dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti, selalu berusaha melaksanakan kewajiban pengurus organisasi sesuai tugas yang diembannya. Sebagai rasa tanggung jawab sosial mereka selalu memberikan saran dan kritik demi kebaikan bersama agar kondisi masyarakat lebih baik. Apabila merasa salah dirinya senantiasa berjiwa besar mau meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan. Informan menambahkan, apabila setiap orang menghayati nilai atau sikap bertanggung jawab dan mau mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka terciptalah suatu kondisi masyarakat yang secara kolektif memiliki rasa bertanggung jawab yang memadai.

f. Sikap Optimis (Bercita-cita Tinggi)

Bercita-cita tinggi merupakan sikap individu yang berkehendak atau berkeinginan secara sungguh-sungguh untuk melaksanakan suatu perbuatan/tindakan dalam rangka meraih tujuan dengan target capaian yang sempurna. Hasil pengukuran sikap optimis (bercita-cita tinggi) menunjukkan, bahwa mayoritas responden (70%) dalam kategori baik. Data tersebut mengandung makna, bahwa responden pada umumnya memiliki sikap optimis dan memiliki cita-cita tinggi.



Berdasar wawancara diperoleh informasi, bahwa cita-cita tinggi yang mereka hayati pada dasarnya menyangkut eksistensi/kelestarian keberadaan organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) agar dapat lebih berperan dalam tiga hal berikut. Pertama, sebagai wadah responden untuk melanjutkan perjuangan dalam pembangunan pada berbagai bidang kehidupan. Kedua, sebagai wahana untuk mewariskan dasar negara Pancasila serta jiwa, semangat, dan nilai '45 (JSN '45) kepada generasi penerus cita-cita bangsa. Ketiga, melalui landasan operasional Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi LVRI, responden sebagai anggota dapat melaksanakan kewajiban, memenuhi hak, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Sikap optimis dan keberanian untuk bercita-cita tinggi tersebut ternyata diterapkan informan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Informan mencontohkan, dalam rangka mewariskan jiwa, semangat, dan nilai-nilai '45 (JSN '45), Markas Besar Legiun Veteran Republik Indonesia pada Mei tahun 2016 berhasil menyusun buku yang berisi materi pewarisan nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia. Materi yang dihimpun pada buku tersebut kemudian digunakan sebagai bahan sosialisasi untuk mewariskan nilai-nilai kejuangan kepada generasi penerus. Dalam sambutan penerbitan buku tersebut ketua umum DPP LVRI Letjen TNI (Purnawirawan) Rais Abin menyatakan, generasi penerus bangsa yang menerima tongkat estafet pengelolaan bangsa dan negara hendaknya mampu mengisi kemerdekaan melalui pelaksanaan pembangunan di segala bidang dengan berlandaskan aliran benang merah jiwa, semangat, dan nilai '45(JSN '45), yaitu semangat perjuangan tanpa pamrih. Dalam kaitan dengan penghayatan nilai sikap bercita-cita tinggi, Abin (2016:1) juga mengutip pernyataan Soeharto sewaktu menjabat presiden RI dalam Mubenas VI Angkatan '45 tahun 1980 di Palembang yang menyatakan, bahwa cita-cita untuk bebas dari penindasan bangsa lain

sudah muncul sejak lama dan tidak pernah padam, bahkan proses perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita tersebut berkesinambungan dari suatu generasi ke generasi penerus berikutnya.

g. Sikap Berwibawa

Berwibawa adalah sikap dan tingkah laku pembawaan individu yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik untuk dapat menguasai dan mempengaruhi sehingga disegani dan dipatuhi oleh orang lain. Hasil pengukuran sikap berwibawa menunjukkan, bahwa semua responden memiliki penghayatan yang memadai atas sikap berwibawa. Kondisi ini dibuktikan dengan 60% responden dalam kategori baik, dan selebihnya 40% berada dalam kategori cukup.

Sejumlah informan dalam wawancara menginformasikan, bahwa beberapa nilai yang termasuk dimensi kewibawaan antara lain berupa: (1) sikap dan perilaku yang menunjukkan tindakan kepemimpinan, (2) memiliki daya tarik sehingga orang lain mau mengikuti jejak dan langkahnya, (3) memiliki kemampuan untuk mengayomi sejumlah orang, dan (4) memiliki sikap dan atau tindakan terpuji sehingga senantiasa disegani dan dipatuhi orang lain. Sehubungan dengan sikap berwibawa tersebut Moelyono (2015: 14) menyatakan, seorang pemimpin bangsa harus berani mengambil keputusan yang penuh risiko, dan selanjutnya mampu melaksanakan secara konsisten dan konsekuen demi kepentingan nasional sesuai bidang tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya.

Berdasar hasil wawancara diperoleh informasi, bahwa penghayatan atas nilai sikap berwibawa sebagaimana disebutkan oleh informan hingga saat ini masih diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya responden/informan yang memiliki kedudukan terhormat di dalam masyarakat atau di wilayah mereka tinggal. Fakta secara terperinci menunjukkan, empat orang (13,33 %) responden sebagai tokoh masyarakat/tokoh



agama, 12 orang (40,00%) menjadi pengurus LPMD, enam orang (20,00%) menjabat menjadi ketua RT, tiga orang (10,00%) mengabdikan sebagai pengurus PKK tingkat desa, dan dua orang (6,67%) berperan menjadi pengurus gabungan kelompok tani (Gapoktan). Hanya enam orang (20,00%) responden yang sudah tidak lagi menduduki pengurus organisasi/lembaga sosial dan dalam peruntukan lanjut diperoleh informasi ketiganya tidak lagi menduduki jabatan dalam masyarakat karena faktor telah berusia lanjut (di atas 76 tahun).

h. Sikap Kepribadian Kuat

Berkepribadian kuat adalah sikap kokoh dan tegas yang merupakan cerminan dari sifat hakiki (karakter) individu yang ditunjukkan pada orang lain. Hasil pengukuran sikap kepribadian kuat memperlihatkan, bahwa mayoritas responden (53,33%) dalam kategori baik dan 40% dalam kategori cukup. Hanya sebesar 6,67% responden dalam kondisi kurang memiliki sikap kepribadian kuat.

Dalam penelusuran lebih lanjut dapat diungkapkan, bahwa kepribadian kuat menurut informan mencakup: (1) kokohnya sikap seorang pejuang veteran, diantaranya berkepribadian disiplin, jujur dan memiliki keteguhan hati, (2) tunduk pada perintah atasan/pimpinan, patuh pada aturan, serta menghormati hukum, (3) memiliki kematangan pribadi dan mampu menyesuaikan diri, serta selalu mempertimbangkan kritik, (4) memiliki sikap pantang menyerah dan terus berjuang untuk membangun bangsa dan negara. Sehubungan dengan sikap kepribadian kuat ini, Purnomodjati (2018:15) menegaskan bahwa, dalam mempertahankan, mengisi kemerdekaan, dan menjamin eksistensi NKRI secara berdaulat, maka disiplin dan tanggung jawab dalam tugas pengabdian tetap harus dilaksanakan secara patriotik.

Berdasar wawancara mendalam dengan sejumlah informan dapat diketahui, bahwa ternyata sejumlah sikap

sebagai komponen kepribadian kuat tersebut diamalkan dalam hidup bermasyarakat pada saat ini. Menurut informan, sejumlah prinsip yang terkandung dalam nilai/sikap kepribadian kuat senantiasa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bahkan harus diwariskan pada generasi penerus cita-cita bangsa. Seorang informan Supardjo (75 tahun) menyatakan, bahwa kedisiplinan, tunduk pada pimpinan, patuh pada aturan, dan ketaatan pada hukum perlu terus ditumbuhkembangkan pada setiap kelompok warga, agar tercipta suatu ketenteraman dan kedamaian dalam hidup bermasyarakat. Artinya, sebagai warga negara dengan apapun jabatannya seseorang wajib menumbuhkan budaya disiplin, tunduk pada pimpinan, dan patuh ataupun taat pada aturan hukum yang berlaku.

i. Sikap Menghimpun Semangat Juang

Semangat juang adalah roh kehidupan yang menjiwai seorang pejuang dalam suatu usaha peperangan yang penuh kesulitan dan bahaya. Sesuai konteks kajian ini adalah kesulitan dan bahaya berperang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan ataupun membela kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Berdasar hasil pengukuran sikap menghimpun semangat juang diperoleh kesimpulan, bahwa mayoritas responden (96,67%) memiliki penghayatan atas sikap menghimpun semangat juang yang memadai, dengan rincian 80% responden dalam kategori baik dan sebesar 16,67% dalam kategori cukup.

Berkait dengan penghayatan sikap menghimpun semangat juang, Suhardi (66 tahun) selaku bendahara LVRI Kabupaten Bantul menyatakan, bahwa menghimpun semangat juang harus senantiasa digelorakan dengan bermodal sikap tidak gentar, pantang mundur, dan tidak kenal menyerah. Informan mengemukakan, bahwa rakyat Indonesia hendaknya terus bersemangat dan bergairah dalam



berjuang, kalau dulu para pejuang dengan penuh semangat yang menggelora dan tidak kenal menyerah menghadapi penjajah, maka sekarang generasi penerus hendaknya juga memiliki semangat yang menggelora dan pantang menyerah dalam menghadapi permasalahan bangsa.

Menurut sejumlah informan, sikap menghimpun semangat juang tersebut pada saat ini juga diimplementasikan dalam kehidupan keseharian. Misalnya, selalu mengajak atau menghibau warga untuk selalu bersemangat dalam berkegiatan sosial, memelopori dan melibatkan diri untuk menyemangati warga dalam kegiatan bergotong royong, selalu berusaha memotivasi dan menggerakkan warga agar bersemangat dalam melaksanakan pembangunan.

Berkait dengan implementasi menghimpun semangat juang ini, Sahrawardi (95 tahun) selaku ketua LVRI Kabupaten Bantul mengemukakan, bahwa dalam mengimplementasikan nilai semangat juang di masyarakat hendaknya jangan sekali-kali menerapkan unsur paksaan. Menurutnya, pemimpin sebaiknya menggunakan filosofi Jawa yang dicetuskan oleh tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara yakni *“Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*. Maksudnya, seorang pemimpin dalam memberi semangat masyarakat untuk bergotong royong hendaknya dilakukan dengan memberi contoh/keteladanan, membangkitkan semangat juang, dan terus memotivasi setiap warga agar senantiasa giat berkarya sesuai kemampuan, bidang tugas, dan profesi mereka masing-masing.

Penutup

Kesimpulan

Veteran pejuang merupakan seorang patriot yang rela berkorban jiwa, raga, harta dan benda untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Para pejuang ini memiliki nilai-nilai kepahlawanan yang menjadi elemen penting dalam membentuk dan menanamkan

sikap nasionalisme bagi generasi muda penerus cita-cita bangsa. Nasionalisme ini akan mengantarkan warga negara, khususnya generasi muda sebagai orang yang tangguh dalam melaksanakan pembangunan dan dalam memecahkan permasalahan bangsa, termasuk di dalamnya permasalahan kesejahteraan sosial. Hasil studi terhadap veteran pejuang di Kabupaten Bantul menunjukkan, bahwa mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki, memiliki rentang usia antara 61 hingga 95 tahun, berpendidikan menengah, dan masih aktif bekerja atau memiliki usaha ekonomi. Meskipun responden berusia lanjut, namun sebagian besar masih mengabdikan sebagai pengurus LVRI Cabang Kabupaten Bantul ataupun LVRI ranting di kecamatan dan hampir semuanya memegang jabatan pada lembaga/organisasi kemasyarakatan atau sebagai tokoh masyarakat/agama. Sebagian besar responden merupakan veteran pembela kemerdekaan. Berdasar pengukuran terhadap nilai-nilai kepahlawanan, terdapat empat indikator nilai atau sikap yang paling menonjol (dalam kategori baik) yaitu: rela berkorban, bertanggungjawab, militansi dan semangat juang yang tinggi. Sedangkan lima indikator lain (gagah berani, percaya pada kemampuan sendiri, berwibawa, berkepribadian kuat dan bercita-cita tinggi) dalam kategori baik dan cukup. Implementasi nilai-nilai kepahlawanan responden terlihat dari spirit yang besar dari responden sehingga masih mampu bekerja atau berkarya, meskipun telah berusia lanjut. Pejuang veteran memiliki pekerjaan selaras dengan kondisi/kemampuan fisik masing-masing dan keterampilan yang dikuasai. Pekerjaan responden dapat dikelompokkan menjadi empat jenis yaitu jasa, berdagang, bertani, dan beternak.

Rekomendasi

Berpijak pada beberapa kesimpulan penelitian, maka diajukan rekomendasi untuk dapat ditindaklanjuti oleh berbagai pihak berkompeten. Tindak lanjut oleh pihak berkompeten tersebut sebagai wahana dalam pendayagunaan potensi responden sebagai ujung tombak pelaksanaan sosialisasi sikap kejuangan dan dalam upaya pelestarian nilai kepahlawanan serta penanaman nasionalisme pada



generasi penerus. Pertama, pemerintah melalui Kementerian Sosial cq Direktorat Kepahlawanan, Keberintisan, dan Kesetiakawanan Sosial bekerja sama dengan berbagai lembaga/instansi terkait perlu memfasilitasi kelompok pejuang veteran di seluruh wilayah Indonesia melalui organisasi LVRI pada tingkat cabang di setiap kabupaten/kota. Tujuan fasilitasi adalah agar semangat perjuangan dan nilai-nilai kepahlawanan terpelihara dan terimplementasi dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fasilitasi juga perlu diarahkan agar pejuang veteran baik secara organisatoris maupun secara individu mampu dan mau berperan dalam mewariskan nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan, dan keberintisan kepada generasi penerus cita-cita bangsa. Kedua, Kementerian Sosial melalui Sub Direktorat Kepahlawanan hendaknya menggali dan mengkaji nilai kepahlawanan/nilai kejuangan pejuang veteran dari setiap daerah di wilayah Indonesia. Nilai kepahlawanan dan atau nilai kejuangan ini perlu disosialisasikan secara berkelanjutan kepada generasi penerus cita-cita bangsa dalam upaya pelestarian dan internalisasi nilai yang melandasi semangat perjuangan bangsa Indonesia. Ketiga, Kementerian Sosial dengan Kementerian Pendidikan melalui direktorat terkait perlu bersinergi merumuskan kebijakan berkait dengan pewarisan nilai kepahlawanan/nilai kejuangan pada generasi muda penerus cita-cita bangsa. Strategi yang dapat ditempuh di antaranya adalah menyusun kurikulum penanaman nilai kepahlawanan bagi peserta didik pada setiap jenjang pendidikan. Apabila strategi tersebut tidak dimungkinkan, setidaknya nilai kepahlawanan tersebut dijadikan sebagai materi pembelajaran muatan lokal. Keempat, Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Cabang Kabupaten Bantul melalui seksi pendidikan hendaknya secara intensif melakukan sosialisasi pewarisan nilai kepahlawanan dan atau nilai kejuangan bangsa Indonesia. Pelaksana sosialisasi adalah pejuang veteran yang telah memperoleh pelatihan peningkatan kapasitas untuk melakukan sosialisasi pada siswa di sekolah dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan kepramukaan dan Palang Merah Remaja (PMR). Materi sosialisasi nilai kepahlawanan dan nilai kejuangan jika memungkinkan perlu dimodifikasi dalam bentuk

permainan sesuai dengan jenjang pendidikan siswa yang menjadi sasaran kegiatan. Sosialisasi nilai kepahlawanan/nilai kejuangan dapat pula dilakukan baik pada anggota kelembagaan desa seperti LPMD, Karang taruna, maupun pada kelompok organisasi sosial keagamaan yang ada di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abin, R. (2016). *Materi Pelatihan Calon Pelaksana Sosialisasi Pewarisan Nilai-Nilai Kejuangan Bangsa Indonesia (Buku 2)*. Markas Besar Legiun Veteran Republik Indonesia.
- Azwar, S. (2017). *Reliabilitas dan Validitas*. Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Dault, A. (2005). *Islam dan Nasionalisme*. PUSTAKA ALKAUTSAR.
- Firdiani, F. (2015). *Pahlawan Nasional Pangeran Diponegoro*. Bee Media.
- Habib MS. (2017). *Kepahlawanan dan Pujaan bagi Pahlawan*. Majalah Adzan edisi 2017.
- Kahin, G. M. T. (1995). *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Sebelas Maret University Press bekerjasama dengan Pustaka Sinar Harapan.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2021). *Pahlawan*. <https://www.kbbi.web.id/pahlawan>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2010). *Bahan Pelatihan: Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa*. Kemendikbud Balai Penelitian dan Pengembangan Pusat.
- Kementerian Sosial. (2017). *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Kepahlawanan*. Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial.
- Kusumawardani, A., & Faturachman. (2004). Nasionalisme. *Buletin Psikologi*, 2, 61–72.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis*. Sage Publications Ltd.



- Moesa, A. M. (2007). *Nasionalisme KIAI*. LKIS Pelangi Aksara.
- Muslim, Nazri, & Alias, J. (2004). Jurnal Patriotisme: Konsep dan pelaksanaannya di Malaysia. *Seminar Antarabangsa Nilai Dalam Komuniti Pasca Modenisme (SIVIC)*.
- Oxford Learner's Dictionaries. (2021). *Patriot*. <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/patriot?q=patriot>
- Prasetyawati, I. B. (2014). *Nilai-nilai Nasionalisme Dalam Film Garuda Di Dadaku dan Relevansinya Anak Usia MI (9-12 tahun)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Purnomodjati, P. (2018). *Jangan Sekali-Kali Meninggalkan Sejarah (Jasmerah)*. Markas Besar Legiun Veteran Republik Indonesia.
- Rashid, A. R. (2004). *Patriotisme: Agenda Pembinaan Negara*. Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd.
- Sholichiyah, I. (2014). *Nilai-Nilai Nasionalisme dalam Film Sang Kyai*. IAIN Wali Songo Semarang.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi (mixed methods)*. Alfabeta.
- Syahrudin. (2017). *Orang Banjar Menjadi Indonesia: Dinamika Organisasi Islam di Borneo Selatan, 1912-1942*. Eja Publisher.
- Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2020). *Mixed Methodology, Mengkombinasikan Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Pustaka Pelajar.
- Warto. (2016). Pewarisan Nilai Kepahlawanan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 4(3), 217–226. <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/mediainformasi/article/view/2297/1142>
- Yunus, H. S. (2016). *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer Cetakan Kedua*. Pustaka Pelajar.
- Zaidatunniamah. (2013). *Nilai-Nilai Nasionalisme Dalam Iklan (Analisis Semiotika Ferdinand de Saussure Pada Iklan Coca-Cola Versi "Sumpah Pemuda Reasons To Believe" di Televisi)*. UIN SUKA Yogyakarta.

Bab 11

NASIONALISME : MENURUNKAN EMISI, MENYELAMATKAN BUMI

Tria Patrianti

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Pendahuluan

Nasionalisme merupakan konstruksi dinamis sebagai respon terhadap tantangan zaman. Tantangan terbesar di abad ke-21 adalah perubahan iklim dan upaya menstabilkan iklim global membutuhkan semangat nasionalisme bagi seluruh negara di dunia karena perubahan iklim tidak memiliki batas negara. Perlindungan akan dampak bencana iklim, tidak dapat dilakukan oleh satu atau beberapa negara. Dibutuhkan rasa pengorbanan dari seluruh umat manusia untuk menyelamatkan bumi dari dampak bencana iklim karena suhu dunia sudah melewati batas rata-rata tahunan global selama 38 tahun berturut-turut. Dampaknya pun dirasakan di seluruh dunia, termasuk negara kepulauan terbesar, Indonesia. Fenomena yang terjadi akibat cuaca ekstrem semakin sering terjadi dan semakin mengerikan. Gelombang panas dan kekeringan menyerang berbagai negara, menghancurkan sektor pertanian, meningkatkan risiko kebakaran, dan membahayakan banyak kehidupan. Kepulauan dan garis pantai yang luas di Indonesia khususnya membuat 1500 pulau dan jutaan penduduk Indonesia berisiko tenggelam dan menyebabkan banjir rutin. Lebih dari 40 tahun yang lalu, para ilmuwan dari 50 negara bertemu pada Konferensi Iklim



Dunia Pertama di Jenewa (1979) dan sepakat bahwa tren perubahan iklim yang mengkhawatirkan membuat mereka perlu bertindak segera. Sejak itu, peringatan serupa telah dibuat melalui KTT Rio 1992, Protokol Kyoto 1997, dan Perjanjian Paris 2015, serta sejumlah majelis global lainnya. Namun emisi gas rumah kaca (GRK) masih meningkat pesat, dengan efek yang semakin merusak iklim bumi. Peningkatan skala yang sangat besar dalam upaya pelestarian biosfer kita diperlukan untuk menghindari penderitaan yang tak terhitung akibat krisis iklim. Berdasarkan hasil kajian dari ribuan peneliti yang tergabung dalam IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*), konsentrasi karbon dioksida di atmosfer adalah yang tertinggi dalam tiga juta tahun. Suhu permukaan rata-rata global bumi pada tahun 2020 setara dengan tahun 2016 sebagai tahun terpanas yang pernah tercatat, menurut analisis NASA. Melanjutkan tren pemanasan jangka panjang planet ini, suhu rata-rata global tahun ini adalah 1,02 derajat Celcius lebih hangat daripada rata-rata tahun 1951-1980, menurut para ilmuwan di Institut Goddard NASA untuk Studi Luar Angkasa (GISS) di New York. Secara pasti, empat tahun terakhir ini adalah empat tahun terpanas dalam catatan, melambungkan tren pemanasan yang sedang berlangsung dan dramatis. Di beberapa negara kepulauan seperti Indonesia, ditemukan bahwa permukaan air laut naik, terumbu karang sekarat, dan dampak perubahan iklim yang mengancam jiwa semakin jelas terlihat. Pada kesehatan, melalui polusi udara, gelombang panas, dan risiko terhadap ketahanan pangan. Kondisi ini menjadikan perubahan iklim sebagai kebangkitan kepedulian seluruh umat manusia untuk merawat dan menjaga bumi dari pemanasannya suhu yang menyelimutinya. Ribuan orang turun ke jalan, anak-anak muda di beberapa negara Eropa mogok sekolah karena menuntut pemerintah menyegerakan aksi untuk melindungi generasi mendatang dari dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Bangkitnya nasionalisme iklim ketika berhadapan dengan tantangan pemanasan global merupakan kesempatan negara kepulauan seperti Indonesia untuk bangkit sebagai bangsa yang mengambil peran dalam menurunkan emisi untuk menyelamatkan bumi.

Revolusi Industri dan Pemanasan Global

Para aktivis lingkungan meyakini bahwa Revolusi Industri di Inggris tahun 1880-an, merupakan era awal terjadinya konsumsi, produksi, serta industrialisasi yang menghasilkan gas-gas buang di atmosfer dan limbah secara massal di permukaan bumi. Sejak saat itu, dampak buruk pemanfaatan energi fosil terhadap lingkungan yang ditimbulkan oleh berbagai aktivitas manusia terus mengalami peningkatan eksponensial dan mengakibatkan peningkatan gas rumah kaca di atmosfer.

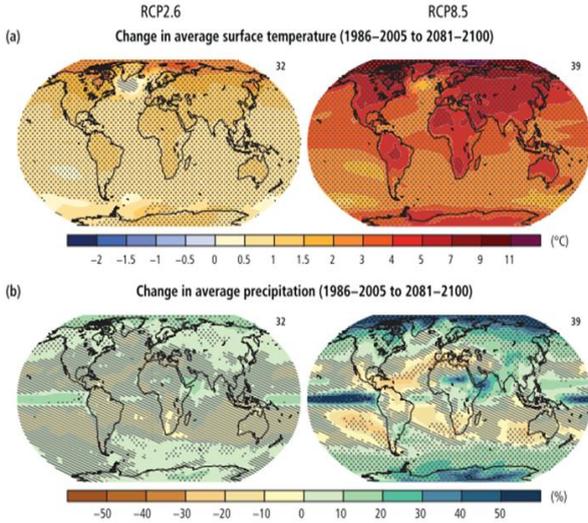
Gas rumah kaca memiliki banyak sumber. Sumber pertama adalah karbon dioksida, yang merupakan polutan iklim utama, adalah pembakaran bahan bakar fosil dan pembakaran biomassa (terutama penggundulan hutan dan memasak dengan kayu bakar). Untuk metana, sumbernya termasuk fosil produksi dan transportasi bahan bakar (gas alam), pertanian (budidaya padi), peternakan, pupuk kandang, tempat pembuangan sampah, dan pembuangan limbah. Berikutnya adalah Nitrous oksida terutama berasal dari pupuk, sedangkan sumber utama halokarbon adalah zat pendingin. Gas rumah kaca bertahan di udara selama berbulan-bulan (ozon) hingga beberapa dekade (metana dan beberapa halokarbon) hingga abad (dinitrogen oksida dan beberapa halokarbon). Karbon dioksida adalah polutan iklim yang paling berbahaya karena memiliki banyak skala waktu, mulai dari dekade hingga abad hingga ribuan tahun. Misalnya, kita mungkin masih menghirup karbon dioksida yang dipancarkan pada abad kesembilan belas oleh mesin uap yang lebih baik yang ditemukan oleh insinyur Inggris terkenal James Watt. Dalam hal ini, karbon dioksida bersifat abadi jika dinilai dari skala waktu manusia. Karena umurnya yang panjang (lebih dari satu dekade), gas rumah kaca (kecuali ozon) yang diemisikan di sudut manapun di planet ini dapat berpindah ke bagian planet lainnya, memerangkap panas, dan memengaruhi iklim secara global. Itulah mengapa bagian planet lainnya, memerangkap panas, dan memengaruhi iklim secara global. Itulah mengapa fenomena tersebut dinamakan pemanasan global (Al-Delaimy, Ramanathan, Sánchez, & Editors, 2020)



Setiap kali manusia membakar energi fosil, baik minyak dan gas bumi maupun batu bara, karbon dioksida (CO₂) yang tersimpan dalam perut bumi selama jutaan tahun dilepaskan ke atmosfer. Dalam siklus alamiah, gas buang karbon tersebut kembali diserap oleh tumbuhan dan tanaman, yang terbanyak diantaranya berada di hutan dan rimba. Dengan demikian, ekosistem alam menampung berbagai residu yang dihasilkan dan menjalani proses pemulihan diri (*self recovery*) tanpa bantuan manusia. Namun, pesatnya aktivitas produksi dan industrialisasi, bertambahnya populasi, arus urbanisasi, intensifikasi pertanian, serta penggunaan transportasi massal membuat volume gas karbon yang dilepaskan meningkat sangat tajam sehingga tumbuhan dan tanaman pun tidak mampu lagi menyerapnya. Bagaimanapun juga, ekosistem akan memiliki keterbatasan. Keterbatasan daya dukung alam diperparah dengan maraknya pembakaran hutan dan penebangan pepohonan. Padahal, pohon dan hutan merupakan 'gudang penyimpanan karbon' terbesar, setelah lautan. Jika dirusak demi pembalakan liar dan konversi lahan untuk pertanian, perkebunan, dan permukiman penduduk, maka hutan-hutan tersebut melepaskan CO₂ dan gas-gas rumah kaca lainnya dalam jumlah besar ke atmosfer (Ismid Hadad, 2016). Food and Agriculture Organization (FAO) melaporkan bahwa dunia telah kehilangan 178 juta ha hutan sejak tahun 1990, yang kira-kira seluas negara Libya (FAO, 2020). Deforestasi hutan ini menyebabkan terjadinya sebuah proses atau gejala yang disebut "efek rumah kaca.". Adanya konsentrasi emisi karbon yang berada di atmosfer sekeliling bumi itu membuat sebagian radiasi panas matahari yang dipantulkan bumi menjadi terperangkap di bumi. Semakin tinggi intensitas pembakaran energi fosil yang terjadi, semakin tinggi pula konsentrasi gas-gas karbon tersebut. Semakin besar pula suhu panas yang terperangkap. Karena keadaan ini berlangsung terus-menerus selama ratusan tahun, maka suhu bumi mengalami kenaikan. Terjadilah proses pemanasan global. Fenomena pemanasan global tersebut menimbulkan berbagai dampak. Diantara dampak terbesar adalah perubahan iklim. Perubahan iklim mengakibatkan melelehnya ketebalan es di kutub utara, menaiknya permukaan air

laut, timbulnya bencana alam, berjangkitnya berbagai penyakit, hilangnya keanekaragaman hayati, dan bermacam kerugian ekonomi global akibat bencana alam tersebut. Di Indonesia, sebesar 80% bencana yang terjadi bahkan ditimbulkan akibat dari bencana iklim atau disebut bencana hydrometeorology (BNPB, 2016).

Gambar 1 : Perubahan suhu rata-rata permukaan bumi yang terekam (1986-2005) dan proyeksi tahun 20181-2100



Sumber (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2015)

Pada *Syntesis Report IPCC*, dinyatakan bahwa pemanasan global telah terekam melalui ukuran seperti pada gambar 1 diatas. Perubahan suhu permukaan rata-rata (a) dan perubahan curah hujan rata-rata (b) berdasarkan proyeksi rata-rata multi-model untuk periode 2081-2100, relatif terhadap era 1986-2005. Telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam pemahaman dan proyeksi perubahan permukaan laut dan rata-rata kenaikan permukaan laut global akan berlanjut selama abad ke-21. Namun kenaikan permukaan laut tidak akan seragam di seluruh wilayah. Di akhir abad ke-21, sangat mungkin permukaan laut akan naik di lebih dari 95% wilayah lautan. Sekitar 70% garis pantai di seluruh dunia diproyeksikan mengalami perubahan permukaan laut dalam $\pm 20\%$ dari rata-rata global. (Intergovernmental Panel on Climate Change,



2015). Pada laporan yang sama, IPCC menggarisbawahi bahwa terjadinya kenaikan suhu hampir di setiap permukaan bumi. Data suhu permukaan laut dan darat gabungan rata-rata global seperti yang dihitung dengan tren linier menunjukkan pemanasan 0,85 [0,65 hingga 1,06] ° C. Masing-masing dari tiga dekade terakhir, suhu permukaan bumi telah berturut-turut lebih hangat daripada dekade sebelumnya sejak 1850. Periode dari 1983 hingga 2012 kemungkinan besar merupakan periode 30 tahun terhangat dalam 800 tahun terakhir di Belahan Bumi Utara, di mana penilaian semacam itu- kemungkinan periode 30 tahun terhangat dalam 1400 tahun terakhir. Hal ini akan mengakibatkan hilangnya sebagian daratan dan sejumlah pulau. Menurut perkiraan, jika permukaan laut naik sekitar satu persen saja, beberapa pulau di Pasifik Selatan dan Samudera Hindia seluruhnya akan lenyap. Kenaikan temperatur bumi membuat iklim sulit diprediksi dan berisiko menyebabkan terjadinya cuaca ekstrem yang kerap membawa bencana terkait perubahan iklim. Kondisi bumi yang memanas dan mencemaskan tentu tak bisa dibiarkan terus menerus. Baik IPCC maupun seluruh negara di dunia bersepakat bahwa kenaikan rata-rata suhu global tidak boleh melebihi 2 (dua) derajat Celcius.

Pada kenyataannya, kebutuhan energi di seluruh negara di dunia ini semakin meningkat. Oleh karena itu, penggunaan bahan bakar fosil juga terus meningkat untuk memasok sekitar 80% penggunaan energi dunia hingga 2040. Padahal pembakaran energi fosil, minyak bumi, gas alam, batu bara, merupakan penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca dan sangat berperan dalam terjadinya pemanasan global. Hasil penelitian para ilmuwan menunjukkan pemanasan global ini terjadi karena aktivitas manusia yang dilakukan dalam bentuk pembakaran bahan bakar fosil untuk keperluan industri, transportasi, dan pelistrikan perkotaan serta ditambah lagi kegiatan deforestasi dan konversi lahan hutan untuk pertanian, perkebunan, dan pemukiman penduduk. Demikianlah proses pertumbuhan ekonomi yang dipacu oleh berbagai aktivitas manusia seperti pembakaran fosil secara massif selama ratusan tahun dan belakangan kegiatan perusakan hutan serta lahan

gambut telah menimbulkan terjadinya pemanasan global dengan beragam dampak negative berupa meningkatnya perubahan iklim dan cuaca ekstrem, termasuk meningkatnya intensitas bencana alam dan berjangkitnya berbagai jenis penyakit (Ismi Hadad, 2010). Tanpa adanya perubahan perilaku manusia yang signifikan serta perubahan pola konsumsi dan produksi yang menyertainya, maka keberlanjutan hidup di muka bumi akan berakhir karena tiada satupun yang dapat menghentikan pemanasan global, suhu bumi yang memanas, selain manusia itu sendiri.

Pemanasan Global dan Perubahan Iklim di Indonesia

Sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah pesisir dan kepulauan kecil yang ekstensif, Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Indonesia telah mengalami kejadian iklim ekstrim seperti banjir dan kekeringan, serta dampak jangka panjang dari kenaikan muka air laut. Sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, bencana alam yang dipengaruhi oleh perubahan iklim menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat dan aset yang dimiliki, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk keluar dari garis kemiskinan. Knowledge Center Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merangkum dampak perubahan iklim di Indonesia yang terjadi di beberapa sektor sebagai berikut, 1) *Air*. Menurunnya kualitas air karena terlalu tingginya curah hujan mengakibatkan kualitas sumber air menurun dan bertambah kadar klorin pada air bersih. Pemanasan global juga akan meningkatkan jumlah air pada atmosfer, yang kemudian meningkatkan curah hujan. Curah hujan yang terlalu tinggi mengakibatkan tingginya kemungkinan air untuk langsung kembali ke laut, tanpa sempat tersimpan dalam sumber air bersih untuk digunakan manusia, 2) *Habitat*. Berbagai spesies binatang, tanaman, dan berbagai organisme lain akan berkurang karena pemanasan suhu bumi. Spesies punah karena tidak sempat beradaptasi terhadap perubahan suhu dan perubahan alam yang terjadi terlalu cepat. Hal ini akan berdampak pada ekosistem dan rantai makanan, 3) *Hutan*. Kebakaran hutan merupakan salah satu dampak dari perubahan iklim, sebagai paru paru bumi hutan merupakan produsen Oksigen



(O2), selain itu, hutan juga membantu menyerap gas rumah kaca yang menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Pohon-pohon yang mati karena perubahan tata guna hutan, atau mengering dengan sendirinya akibat meningkatnya suhu dalam perubahan iklim, akan melepaskan karbondioksida sehingga menyebabkan berkurangnya penyerap karbondioksida itu sendiri sehingga karbondioksida dan gas rumah kaca lain akan meningkat drastis,. 4) **Kesehatan**. Kenaikan suhu curah hujan meningkatkan penyebaran wabah penyakit mematikan; malaria, kolera dan demam berdarah. Hal ini disebabkan nyamuk pembawa virus-virus tersebut hidup dan berkembang biak pada cuaca yang panas dan lembab, dimana kondisi tersebut secara umum disebabkan oleh perubahan iklim. Penipisan ozon menyebabkan peningkatan intensitas sinar ultra violet mencapai permukaan bumi dan menyebabkan kanker kulit, katarak, disertai penurunan daya tahan tubuh sehingga rentan terhadap asma, penyakit kardiovaskular, jantung dan stroke, 5) **Pertanian**. Suhu yang terlalu panas dan berkurangnya ketersediaan air akan menghambat produktivitas pertanian. Perubahan iklim juga akan menyebabkan perubahan masa tanam dan panen ataupun menyebabkan munculnya hama dan wabah penyakit pada tanaman yang sebelumnya tidak ada, serta 6) **Pesisir**. Peningkatan permukaan air laut menyebabkan bergesernya batas daratan di daerah pesisir yang kemudian menenggelamkan sebagian daerah pesisir ataupun pemukiman di daerah pesisir (Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, 2020). Terkait kebakaran hutan, terdapat 24 Provinsi rawan bencana kebakaran hutan dan lahan yang melingkupi seluruh provinsi di wilayah Kalimantan, hampir seluruh Pulau Sulawesi dan Maluku, sebagian Pulau Papua, sebagian provinsi di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, serta sebagian Pulau Sumatera (BNPB, 2020)

Perubahan iklim dan upaya penanganannya bukan hanya permasalahan lingkungan yang harus segera diselesaikan namun dibutuhkan 'kebijakan lingkungan hidup untuk mencapai tujuan pembangunan Tapi kebijakan perubahan iklim merupakan isu yang pelik. Dikarenakan lingkup permasalahan kebijakan yang kompleks, perubahan iklim disebut bukan hanya sebagai permasalahan

ilmiah namun juga masalah social atau *wicked problem*. Diperlukan serangkaian negosiasi untuk sebuah kesepakatan ilmiah dari para ilmuwan dan politisi (Grundmann, 2016).

Tantangan Utama : Nasionalisme

Sebagai topik utama penelitian lintas disiplin, perubahan iklim hampir tidak tersentuh dalam studi nasionalisme. Perubahan iklim adalah fenomena yang tak terbatas dan tidak dapat diabaikan karena batasan kelas, geografis, dan etnonasional. Nasionalisme merupakan suatu sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah. Hal ini karena tantangan tersebut membutuhkan kolaborasi dan multilateralisme, yang menghubungkan antara satu negara dengan negara lain. (Conversi, 2020). Nasionalisme memiliki tantangan tersendiri jika dihadapkan dengan fenomena global perubahan iklim dimana suhu bumi dan bencana iklim selalu mengintai.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nasionalisme adalah paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Sikap dan perilaku nasionalisme harus dimiliki warga negara. Di Indonesia, awal kebangkitan nasionalisme di Indonesia berawal dari lahirnya Budi Utomo yang didirikan oleh Wahidin Soedirohoesoedo dan Soetomo. Berawal dari embrio yang bersifat kultural, nasionalisme rakyat Indonesia perlahan mulai berkembang dan terwujud dalam pembantukan organisasi Budi Utomo. Budi Utomo menjadi pemicu kesadaran para tokoh pergerakan nasionalisme untuk mulai berjuang dengan cara berorganisasi. Presiden Soekarno dalam setiap pidatonya saat peringatan Hari Kebangkitan Nasional menegaskan bahwa Budi Utomo merupakan awal kesadaran bangsa Indonesia berjuang merebut kemerdekaan dengan jalan berorganisasi. Para pendiri Budi Utomo telah memberikan ide untuk memperjuangkan kemerdekaan dari Pemerintah Kolonial Belanda dengan cara baru, yakni melalui perserikatan, perhimpunan politik dan persatuan. Dalam konteks



melindungi tanah air tercinta, dan berkorban untuk keutuhan bangsa, nasionalisme dapat ditumbuhkan untuk merawat bumi Indonesia dari dampak negatif perubahan iklim. Perubahan iklim yang terjadi karena kenaikan emisi gas buang ke atmosfer, tidak dapat dihindari jika kita tidak dapat menjaga kenaikan suhu bumi. Keberlanjutan kehidupan umat manusia di negara kepulauan terbesar di dunia ini sejatinya dimulai dari upaya menjaga dan merawat bumi pertiwi dari kerusakan lingkungan.

Apa yang dapat memotivasi orang untuk mengambil tindakan serius terhadap iklim? Jika dikaitkan dengan rasa nasionalisme dan rela berkorban, tentu harus dimulai dengan rasa 'pengorbanan' yang dimulai dari diri sendiri. Umat manusia harus mulai memikirkan kepentingan dirinya sendiri dengan menggunakan transportasi publik, karena jika jumlah pengendara mobil semakin banyak, maka banyak emisi yang terbuang karena pembakaran bahan bakar fosil. Pada ruang lingkup keluarga, energi yang digunakan oleh masing-masing rumah tangga harus dihemat, karena listrik pun diproduksi dari bahan bakar batu bara yang tidak ramah lingkungan. Harus ada sesuatu yang dapat memotivasi orang untuk melakukan pengorbanan besar, demi sesuatu yang mereka cintai, yang mereka pertahankan untuk keberlangsungan kehidupannya. Jika ada sesuatu yang dapat mendorong umat manusia untuk melakukan pengorbanan besar, mengubah perilaku sehari-hari menjadi ramah lingkungan, maka kekuatan ini adalah nasionalisme. Tidak ada upaya lain selain membangun nasionalisme untuk menyelesaikan masalah iklim (Wear, 2020). Jenis nasionalisme yang diharapkan tumbuh dan berkembang pada manusia di dekade ini akan memotivasi orang untuk bekerja sama dan berkorban sehingga kecintaan akan bumi tempat tinggal kita, tradisi, aspirasi bersama umat manusia. Selanjutnya, dinyatakan bahwa bahwa pola 'melawan' musuh bersama di setiap negara, dan menjadi ancaman eksistensial bagi masing-masing bangsa, seharusnya harus segera merapatkan barisan dan bersama-sama menghadapi musuh tersebut. Inilah situasi umat manusia sekarang dengan perubahan iklim. Jenis nasionalisme seperti ini akan memotivasi orang untuk

bekerja sama dan berkorban adalah kecintaan setiap orang yang dalam pada tanah air , tradisi, dan aspirasi bersama (Lieven, 2020). Kekuatan inilah yang disebut “patriotisme”. Umat manusia tidak akan dapat bertindak sendiri dalam menyelesaikan masalah iklim kecuali bergandengan tangan untuk tujuan bersama. Semua keyakinan individu yang berbasis agama, keyakinan politik, dapat menjadi medium untuk tujuan bersama; menyelamatkan bumi, tempat manusia tinggal untuk keberlangsungan hidupnya, karena tidak ada tempat lain selain planet ini. *There’s no Planet B.*

Kesimpulan

Perubahan iklim mengancam keberadaan setiap negara bangsa dalam bentuknya yang sekarang: tradisi, budaya, dan lanskap sendiri. Saat ini, bumi yang suhunya lebih hangat tiga atau empat derajat, mungkin akan menjadi gurun dari kelompok pengungsi yang kelaparan karena pemanasan global, Itulah gambaran dunia yang akan didiami oleh anak-anak kita nanti. Ini akan menjadi berbeda jika setiap umat manusia bersama-sama melakukan perubahan mendasar, demi kelangsungan hidup yang ideal di masing-masing negaranya. Ada konsensus luar biasa di antara para ilmuwan bahwa dekade ini akan menjadi pintu terakhir bagi umat manusia untuk mengubah lintasan emisi karbon dioksida global sehingga dunia dapat mendekati *zero emission* atau nol emisi bersih pada sekitar tahun 2050. Dengan demikian, maka potensi bencana iklim akan dihindari. Namun, jika tidak ada upaya serius, mempertahankan keberlangsungan kehidupan dari ancaman perubahan iklim, maka umat manusia akan terdampak di seluruh aspek kehidupannya. Nasionalisme untuk merawat bumi, tempat berlindung setiap makhluk hidup, perlu dikembangkan agar rasa cinta pada tanah air sebagai tempat hidup satu-satunya yang didiami umat manusia, dapat dijaga dari suhu yang memanas dan merusak seluruh ekosistem di bumi. Nasionalisme dapat ditumbuhkan untuk menjaga kenaikan emisi dan merawat bumi. Namun, umat manusia tidak akan dapat bertindak sendiri dalam menyelesaikan masalah iklim kecuali bergandengan tangan untuk tujuan bersama. Semua keyakinan individu yang berbasis agama, keyakinan politik,



dapat menjadi medium untuk tujuan bersama; menurunkan emisi dan menyelamatkan bumi.

Daftar Pustaka

- Al-Delaimy, W. K., Ramanathan, V., Sánchez, M., & Editors, S. (2020). *Health of People, Health of Planet and Our Responsibility*. La Jolla CA USA: Springer Open. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-31125-4>
- BNPB. (2016, April). Ancaman Hidrometeorologi Semakin Meningkat. *Gema BNPB*.
- BNPB. (2020). *Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024*.
- Conversi, D. (2020). The Ultimate Challenge: Nationalism and Climate Change. *Nationalities Papers*, 48(4), 625–636. <https://doi.org/10.1017/nps.2020.18>
- Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK. (2020). Dirjen IGRK. Retrieved June 30, 2020, from <http://ditjenppi.menlhk.go.id/direktorat/direktorat-inventarisasi-gas-rumah-kaca-dan-monitoring-pelaporan-dan-verifikasi.html>
- FAO. (2020). *Global Forest Resources Assessment 2020_Key Findings*. FAO- UN. Rome. <https://doi.org/10.1163/157180808X353939>
- Grundmann, R. (2016). Climate change as a wicked social problem. *Nature Geoscience*, 9(8), 562–563. <https://doi.org/10.1038/ngeo2780>
- Hadad, Ismi. (2010). Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan ; Sebuah Pengantar. *Prisma*, 29(2).
- Hadad, Ismid. (2016). Menyelamatkan Bumi, Menggapai Tujuan Pembangunan Pasca 2015. *Prisma*, 35(2), 5–6.
- Intergovernmental Panel on Climate Change. (2015). *IPCC Synthesis report*. Geneva. Retrieved from <http://www.ipcc.ch>
- Lieven, A. (2020). *Climate Change and the Nation State*. New York: Oxford University Press.
- Wear, S. (2020). Can nationalism save us in addressing climate crisis? Retrieved March 1, 2021, from <https://yaleclimateconnections.org/2020/10/can-nationalism-save-us-in-addressing-climate-crisis/>

Bab 12

KEWIRAUSAHAAN DAN NASIONALISME

Ida Hindarsah

Universitas Pasundan

Pendahuluan

Sampai saat ini Covid-19 masih terjadi, tentunya kondisi ini berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Berbagai macam kebijakan telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus covid-19 ini Pemerintah harus memilih kebijakan dari jalur 2 arah dalam menangani pandemic ini. Pemerintah harus melihat kebijakan pencegahan (substantive) dan memfokuskan pada kebijakan yang mengatur perekonomian. Kedua kebijakan tersebut dilakukan secara bersamaan yang menyebabkan tidak efektifnya implementasi dari kebijakan tersebut. Selain tidak efektifnya implementasi kebijakan yang telah dibuat, kebijakan tersebut juga membuat koordinasi antar pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak terjalin dengan baik (Budi & Anshari, 2020). Tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut yaitu pemutusan mata rantai penyebaran virusnya dan perbaikan ekonomi pun belum bisa dicapai, bahkan cenderung semakin parah (Kurniawansyah et al, 2020). Pandemic covid 19 ini membuat pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi/kebijakan terkait penanganannya. Adapun regulasi/kebijakan yang dimaksud antara lain 4 Keputusan



Presiden, 2 Peraturan Presiden, 1 Peraturan Pemerintah, 1 instruksi Presiden dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Peraturan-peraturan yang telah dibuat tersebut merupakan alternative pemecahan masalah yang dapat dilihat dari sisi kesehatan, birokrasi, politik maupun keuangan Negara Indonesia yang diakibatkan dari pandemic covid-19 (Widianingrum & Mas'uid, 2020). Menurut Laporan dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Pandemi covid-19 ini mempengaruhi perekonomian dari sisi penawaran dan Permintaan. Di sisi penawaran, perusahaan mengurangi pasokan bahan baku dan tenaga kerja yang tidak sehat serta rantai pasokan yang juga mengalami kendala. Dari sisi permintaan, kurangnya permintaan dan menurunnya kepercayaan konsumen terhadap suatu produk. OECD juga menyebutkan UMKM memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi covid19 ini. UMKM sangat rentan terdampak dalam gangguan bisnis, karena seringnya berhubungan langsung dengan pariwisata, transportasi dan industri kuliner yang memerlukan supplier yang cepat yang semuanya terdampak secara signifikan oleh covid-19 (OECD, 2020 dalam Hardilawati, 2020).

Berdasarkan data dari kementerian koperasi yang memaparkan bahwa 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdampak pandemi virus corona (Antara, Mei 2020). Sektor UMKM yang paling terdampak yakni makanan dan minuman. Kementerian Koperasi dan UMKM mengatakan bahwa koperasi yang bergerak pada bidang jasa dan produksi juga paling terdampak pada pandemi COVID-19. Para pengusaha UMKM merasakan turunnya penjualan, kekurangan modal, dan terhambatnya distribusi. Sedikitnya 39,9 persen UMKM memutuskan mengurangi stok barang selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akibat covid-19. Sementara itu 16,1 persen UMKM memilih mengurangi karyawan akibat toko fisik ditutup. Sektor UMKM mengalami dampak yang cukup dalam akibat pandemi covid-19. Rosita (2020). Pemerintah Indonesia bertindak cepat untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 dan menahan kontraksi ekonomi melalui paket stimulus skala besar. Kegiatan

usaha telah berhenti di beberapa sektor ekonomi akibat turunnya permintaan dan gangguan pasokan yang disebabkan COVID-19. (Survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia Kuartal I-2020). Dua dari tiga perusahaan di Indonesia menghentikan sementara operasinya dan berisiko mengurangi pekerjaan. Kebanyakan perusahaan menghadapi penurunan drastis pendapatan dan masalah arus kas. (Survei Dunia Usaha ILO Mei 2020). Hal lainnya juga dapat dilihat dari Produk Domestik Bruto walaupun masih bertumbuh positif. Krisis kesehatan global yang terjadi pada triwulan pertama tahun 2020 berdampak pada kinerja perekonomian dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 2,97 persen (YoY). Hampir seluruh sektor tumbuh melambat. Hal ini disebabkan oleh turunnya permintaan global dan domestik serta diiringi dengan melemahnya harga komoditas internasional.

Kondisi ini masih lebih baik dibandingkan kinerja negara lainnya. Perekonomian Indonesia masih ditopang oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian meskipun pertumbuhannya melambat. Beberapa sektor yang tumbuh lebih cepat adalah jasa keuangan dan asuransi, informasi dan komunikasi, jasa pendidikan, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Industri pengolahan tumbuh 2,1 persen (YoY), lebih lambat dibandingkan periode sebelumnya terutama disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan industri pengolahan nonmigas. Perlambatan ini diindikasikan oleh terkontraksinya impor bahan baku sepanjang triwulan I tahun 2020 ,disertai dengan ekspor nonmigas yang melambat. Mayoritas industri nonmigas mengalami kontraksi. Industri makanan dan minuman yang berperan besar dalam industri nonmigas, tumbuh melambat dari 6,8 persen (YoY) pada triwulan I tahun 2019 menjadi 3,9 persen (YoY). Industri kimia dan industri alat angkutan juga masih tumbuh positif meski melambat. Sementara itu, industri batu bara dan pengilangan migas tumbuh 2,6 persen (YoY) setelah terkontraksi pada triwulan I tahun 2019. Kinerjanya didorong oleh peningkatan produksi bahan bakar minyak dan LPG. Shinozaki (2020)



Di Indonesia UMKM memiliki kontribusi maupun peranan yang cukup besar diantaranya yaitu perluasan kesempatan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga merupakan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk menjalani kegiatan ekonomi produktif. disamping itu usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) merupakan jenis usaha yang memiliki peran penting dalam peningkatan PDB (Pendapatan Domestik Bruto) suatu negara khususnya di Indonesia dengan menghadapi Era Industri 4.0. Rosita (2020). Salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam menangani UMKM yang terdampak covid-19 ini adalah dengan mengeluarkan beberapa kebijakan seperti yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM dengan delapan kebijakannya yaitu:

- a. Memberikan stimulus daya beli UMKM dan koperasi dengan angka yang dianggarkan sekitar 2 Triliun
- b. Mendukung dan mengefektifkan imbauan social distancing tapi dalam waktu bersamaan juga warung-warung dapat jalan bersama, program ini bekerjasama dengan 9 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kluster pangan dan kelompok masyarakat untuk mendorong gerakan sosial yaitu dengan melibatkan warung tetangga.
- c. Restrukturisasi dan subsidi suku bunga kredit usaha mikro
- d. Restrukturisasi kredit yang khusus bagi koperasi melalui LPDB KUMKM
- e. Mendorong penyediaan masker kain buat siapa saja yang terpaksa harus beraktivitas keluar rumah dan mengajak UMKM di berbagai daerah untuk memproduksi. Juga mempertemukan koperasi dan UMKM dengan offtaker masker, hand sanitaisir dan alat pelindung (APD) yang dibutuhkan tenaga kesehatan.
- f. Memasukan UMKM yang rentan terkena dampak Covid-19 sebagai cluster penerima Kartu Prakerja untuk pekerja harian

- g. Bantuan langsung tunai kepada pada UMKM yang terdampak covid-19
- h. Program yang terkait dengan pajak terutama pph 21, pajak penghasilan impor, pph 25 restitusi pertambahan nilai nisa direlaksasi bagi para UMKM. (<https://ekonomi.bisnis.com>)

Mengingat peran UMKM penting bagi kelangsungan dan penghidupan bangsa, maka kelangsungan hidup para UMKM harus kita jaga dan tumbuh kembangkan bersama, sehingga penguatan dan penciptaan wirausaha baru menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Zimmerer dkk (2005) mengatakan bahwa “Wirausahawan adalah orang yang menciptakan bisnis baru dengan mengambil resiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang dan menggabungkan sumber daya yang diperlukan untuk mendirikannya”. Oleh karena itu wirausaha perlu dikuatkan dengan sikap, integritas, filosofis usaha, fokus dan komitmen yang dikenal dengan The Owner Predisposing Factors, Hindarsah (2019). Adapun fungsi dan peran wirausaha dapat dilihat melalui dua pendekatan yaitu secara mikro dan makro. Secara mikro, wirausaha memiliki dua peran, yaitu sebagai penemu (*innovator*) dan perencana (*planner*). Sebagai penemu, wirausaha menemukan dan menciptakan sesuatu yang baru, seperti produk, teknologi, cara, ide, organisasi, dan sebagainya. Sebagai perencana, wirausaha berperan merancang tindakan dan usaha baru, merencanakan strategi usaha yang baru, merencanakan ide-ide dan peluang dalam meraih sukses, menciptakan organisasi perusahaan yang baru, dan lain-lain. Secara makro, peran wirausaha adalah menciptakan kemakmuran, pemerataan kekayaan, dan kesempatan kerja yang berfungsi sebagai mesin pertumbuhan perekonomian suatu negara. Suryana, 2008.

Mengingat peran wirausaha secara makro inilah yang menjadi semangat nasionalismeyang terus harus digali dan ditumbuhkan, karena nasionalisme itu seorang individu mengintegrasikan perasaan dan kecintaannya pada negara kebangsaan (Hans Kohn, 1961) dan



kunci utamanya adalah bagaimana mencapai tujuan dari bangsa ini yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Bentuk kecintaan bisa diimplementasikan dalam banyak hal dan salah satunya adalah sebagai pejuang ekonomi bangsa. Berlandaskan sila ke-3 Pancasila bahwa konsep Nasionalisme Staat yang bertujuan mewujudkan sila ke-5 yaitu keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

Hubungan Kewirausahaan Dengan Nasionalisme

Kewirausahaan saat ini telah menjadi salah satu pilihan dalam mempertahankan dan melangsungkan kehidupan yang menantang jiwa-jiwa kreatif para pelaku usahanya. Trend ini bisa kita lihat dari bertumbuhnya kewirausahaan saat ini, Menurut Alma, (2010) yang paling mendorong seseorang untuk memasuki karir wirausaha adalah adanya personal attributes dan personal environment. Keputusan individu untuk menjadi pengusaha terkadang diasumsikan demikian tergantung pada ciri-ciri kepribadian: "Jika Anda punya profil kepribadian yang tepat, anda akan melakukannya cepat atau lambat menjadi pengusaha". Linan&Leon (2007). Hasil-hasil penelitian menyebutkan bahwa minat berwirausaha dipengaruhi oleh potensi kepribadian wirausaha dan lingkungan. Proses memilih karir diawali dengan minat terhadap karir tersebut dan hal ini bisa diketahui melalui pendekatan ilmiah. Brown&Brooks (1990). bahkan tak jarang orang yang sudah memiliki pekerjaan formal beralih menjadi seorang wirausaha demi memerdekakan jiwa kreatifitasnya. Berdasarkan fenomena ini, maka kian bergairahnya dunia wirausaha di tanah air menjadi momentum untuk menjadikan hidup berwirausaha sebagai pilihan dan gaya hidup terutama generasi milenial, yaitu sebuah gaya hidup baru yang menyandarkan pada aspek kemandirian yang bertumpu ada kreativitas dan inovasi. Peran Pentahelix dalam menumbuhkan kewirausahaan khususnya para UMKM perlu dikaji dan dibantu oleh mitra-mitra atau yang kita kenal dengan model pentahelix. Model Penta Helix merupakan salah model kemitraan yang mengintegrasikan lima sektor yang saling berkordinasi satu sama lain. Model penta helix merupakan pengembangan dari konsep Quadro Helix dari Jann Jidajat

Tjakraatmadja. Lima sektor tersebut yaitu pemerintah, lembaga penelitian dan pendidikan, institusi pemerintah terkait, masyarakat, dan industri yang fokus dalam model ini (Amrial, Muhammad, & Muhamad, 2017).

Di Indonesia definisi UMKM merujuk pada UU No.20 Tahun 2008 yang membedakan usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan aset dan omset. Usaha Mikro adalah badan usaha dengan aset kurang dari lima puluh juta rupiah dengan omset penjualan tahunan kurang dari tiga ratus juta rupiah. Usaha kecil adalah badan usaha dengan aset lima puluh juta hingga lima ratus juta rupiah dengan omset tahunan dua ratus juta rupiah hingga dua milyar lima ratus juta rupiah. Terakhir usaha menengah adalah badan usaha yang memiliki aset lima ratus juta hingga sepuluh milyar rupiah, dengan omset tahunan antara dua milyar lima ratus juta hingga sepuluh milyar rupiah (*UU No.20 Tahun 2008*, 2008). Secara fungsi usahanya UMKM dibedakan menjadi empat macam. Pertama *livelihood activities*, yaitu UMKM yang berfungsi sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal contohnya pedagang kaki lima. Kedua *micro enterprise*, usaha yang sifatnya hanya pengrajin belum memiliki sifat kewirausahaan. Ketiga *Small Dynamic Enterprise*, yaitu usaha telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Keempat *Fast Moving Enterprise*, yaitu usaha yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

Berdasarkan fungsi-fungsi yang disebutkan tentunya pilihan keempat menjadi pilihan tepat untuk membantu mempercepat tujuan bangsa yaitu menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengoptimalkan fungsi kewirausahaan sebagai pilar yang kokoh dalam perekonomian Indonesia, diperlukan langkah-langkah untuk mengembangkan paradigma baru dalam pembangunan kewirausahaan. Pembudayaan kewirausahaan sebagai gerakan ekonomi rakyat harus didukung oleh politik hukum pemerintah, baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah, untuk menyusun rencana strategis dalam menggagas kewirausahaan



dan kemitraan berdasarkan manajemen integratif. Dalam pembangunan kewirausahaan, Indonesia memiliki modal dasar untuk mengembangkan kewirausahaan sebagai pondasi ekonomi, hal ini termaktub dalam UU Nomor 17 tahun 2005-2025 dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 yaitu: “Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”. Gilpin (1991) dalam Zaenal (2019) mengatakan bahwa Pemahaman Nasionalisme Ekonomi dalam ekonomi politik internasional, pendekatan ini berakar dari ide dasar bahwa aktivitas ekonomi merupakan subordinat dari tujuan dan kepentingan negara. Semua nasionalis mengasumsikan keutamaan negara (*the primacy of the states*), keamanan nasional, dan kekuatan militer. Dari sini, ada dua posisi dasar nasionalis yang dapat dibedakan oleh Gilpin (1987). Pertama, nasionalis yang mempertimbangkan bahwa pengamanan kepentingan ekonomi nasional sebagai minimum essential terhadap keamanan dan keberlangsungan negara. Kedua, nasionalis yang mengasumsikan bahwa ekonomi internasional merupakan arena bagi ekspansi imperialis dan perluasan kekuasaan negara. Selanjutnya menurut Gilpin, perspektif nasionalisme ini terdiri atas elemen analitis dan normatif (Gilpin, 2001). Elemen analitis mengasumsikan hakekat sistem internasional yang anarkis, keutamaan negara (*the primacy of state*), dan pentingnya power dalam hubungan antar negara. Sementara elemen normatif mengacu kepada komitmen terhadap negara-bangsa, pembangunan negara (*state building*), dan superioritas moral dari suatu negara terhadap negara lainnya. Dari sini, Gilpin kemudian mengembangkan pendekatan *state-centric realism* dalam melihat fenomena ekonomi politik internasional. Menurutnya, dalam ekonomi global yang semakin terintegrasi ini, negara terus menggunakan power mereka dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan untuk menghubungkan kepentingan-kepentingan ekonomi dalam cara-cara yang sesuai dengan kepentingan nasional negara. Perspektif ini pada dasarnya menekankan kerugian yang ditimbulkan oleh perdagangan terhadap kelompok atau negara tertentu, serta keberpihakannya terhadap proteksionisme ekonomi dan kontrol negara terhadap perdagangan

internasional (Gilpin, 1987). Dalam kaitannya dengan peran pemerintah terhadap UMKM dalam menumbuhkan kembangkan usaha dan membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Ini mengandung makna bahwa UMKM merupakan alat perjuangan nasional untuk menumbuhkan dan membangun perekonomian nasional dengan melibatkan sebanyak mungkin pelaku ekonomi berdasarkan potensi yang dimiliki atas dasar keadilan bagi semua pemangku kepentingan (Wilantara & Indrawan, 2016).

Peluang dan Tantangan UMKM di Masa Pandemi

Sejak diumumkannya pandemik di Indonesia, pemerintah menempatkan UMKM sebagai prioritas penerima manfaat dalam pemulihan ekonomi nasional. Hal ini dilakukan mengingat jumlah masyarakat yang terlibat dalam sektor ini sangat besar, dengan jumlah mencapai 62 juta atau 98% dari para pelaku usaha nasional. Pemerintah masih terus berupaya agar UMKM dapat menopang sendi ekonomi Indonesia memperkuat,memperkokoh dan mendominasi perekonomian Indonesia. Tentunya peran kolektif berbagai sektor sangat diperlukan untuk membantu pemulihan UMKM. Dalam situasi pandemik seperti ini UMKM diberikan tantangan dan peluang dalam mempertahankan, mengembangkan serta membuat bisnis baru untuk terus bertahan. Kembali pada peluang dan tantangan bagi pelaku bisnis UMKM tahun 2020 yang saat ini terkena dampak wabah Covid 19, Presiden RI Joko Widodo dalam rapat Kabinet Indonesia Maju melalui video conference di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu 15 April 2020 telah meminta pada jajarannya agar pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terus diberi peluang untuk berproduksi terutama di sektor pertanian, industri rumah tangga, warung tradisional dan sektor makanan dengan protokol kesehatan yang ketat, artinya peluang untuk menjalankan usaha bagi pelaku UMKM tetap diberikan perhatian penuh oleh pemerintah, Bapak presiden juga telah memerintahkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membantu pelaku UMKM dalam bentuk fasilitas keringanan yakni subsidi



bunga, penundaan pembayaran pokok, dan pemberian tambahan kredit modal kerja. Peluang lain untuk UMKM adalah berupa Penganjangan gerakan 100.000 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Go Online secara bersama-sama di 30 kota atau kabupaten di Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai Digital Energy of Asia, juga komitmen Kementerian Koperasi dan UMKM dan Kominfo untuk mengonlinkan 8 juta UMKM. Sementara itu untuk Tantangan UMKM yang harus dihadapi adalah bagaimana menciptakan strategi dalam mengisi kebutuhan pasar dalam negeri maupun pasar global, Selain itu strategi apa untuk entrepreneurship yang berbasis teknologi dan tetap menjunjung tinggi norma dan kearifan lokal. Dalam menghadapi tantangan lainnya para pelaku UMKM harus memiliki jiwa dan potensi entrepreneurship, pelaku UMKM hendaknya memahami demokrasi ekonomi yang terjadi,, juga termasuk mengikuti perkembangan update informasi teknologi dan tetap menjaga kearifan lokal. Marlinah (2020). Hal lainnya dalam ulasanya Suyatmin (2020) mengatakan bahwa diperlukan strategi untuk menjaga eksistensi UMKM, hal ini dipaparkan oleh OECD, beberapa solusi perlu dilakukan untuk menjaga eksistensi UMKM yakni protokol kesehatan ketat, penundaan pembayaran hutang atau kredit, bantuan keuangan, dan kebijakan struktural. Sementara strategi jangka panjang fokus pada pengenalan dan penggunaan teknologi digital bagi UMKM. Sekaligus persiapan memasuki era Industri 4.0. Pertama, tidak perlu panik dan terus waspada untuk menjaga kesehatan dan keamanan diri, karyawan, dan pelanggan. Kedua, think positive dan percaya bahwa dalam setiap krisis pasti ada opportunity yang bisa diambil. Ketiga, berkaitan dengan strategi adaptasi dan sesuai model bisnis dengan kondisi saat ini. Keempat, membuat rencana keuangan tiga bulanan (kuartal). Kelima, sebagai pelaku bisnis, kita juga harus aware dan memahami berbagai program yang ditawarkan pemerintah agar dapat dimanfaatkan dengan tepat guna.

Kewirausahaan Sebagai Solusi Pada Masa Pandemi Covid-19

Adanya Covid-19 di tahun 2020 menjadi perhatian yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Banyak kerugian yang ditimbulkan dari pandemic ini yang berdampak pada perekonomian Indonesia. Setelah mengalami peningkatan kasus yang melesat dengan kurun waktu sangat cepat, pemerintah membuat kebijakan dalam mengatasi pandemic covid-19, dengan berlakunya PSBB yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020. Dengan adanya PSBB tersebut semua kegiatan yang biasa dilakukan terpaksa terhenti. Seluruh kegiatan dibidang industri maupun perkantoran untuk sementara waktu terpaksa berhenti untuk beroperasi. Selain itu, sector pendidikan, layanan publik, seluruh tempat beribadah, pusat perbelanjaan, rumah makan maupun tempat pariwisata juga mengalami hal yang sama (Misno et al, 2020). Social atau physical distancing ini membawa pengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan (Iskandar et al, 2020). Dampak pada sector ekonomi pada masa pandemic covid-19 di Indonesia, antara lain :

- a. Terjadinya PHK besar-besaran. hasil data yang didapat yaitu $\geq 1,5$ juta pekerja di rumahkan dan terkena PHK yang mana 90% pekerja di rumahkan dan pekerja yang di PHK sebesar 10%.
- b. Terjadinya penurunan PMI Manufacturing Indonesia mencapai 45,3% pada Maret 2020.
- c. Terjadinya penurunan impor sebesar 3,7% pada triwulan I.
- d. Terjadinya inflasi yang telah mencapai pada angka 2,96% year-on-year(yoy) yang telah disumbangkan dari harga emas dan komoditas pangan pada Maret 2020.
- e. Terjadinya keterbatalan penerbangan yang mengakibatkan penurunan pendapatan di sektor tersebut. Kerugian yang dirasakan mencapai Rp. 207 miliar. Batalnya penerbangan tersebut sebanyak 12.703 pada 15 bandara pada bulan Januari - Maret 2020.
- f. Pada 6 ribu hotel telah terjadi penurunan penempatan (okupansi) hingga mencapai 50%. Hal tersebut bisa mengakibatkan kehilangan devisa pariwisata (Hanoatubun, 2020).

Oleh karena itu Entrepreneurship menjadi jalan yang paling efektif di tengah himpitan ekonomi yang semakin besar dan lapangan pekerjaan yang semakin sempit, untuk membangkitkan kembali kehidupan perekonomian masyarakat. Indonesia masih



perlu mempersiapkan lahirnya generasi entrepreneur karena para entrepreneurship inilah yang akan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di Indonesia. Selain itu, *entrepreneurship* mampu memberikan dampak yang baik bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Semakin banyak *entrepreneur* maka makin kuatlah daya tahan benturan terhadap krisis ekonomi. *Entrepreneur* mampu memberikan alternatif yang baik untuk mengurangi bahkan menghapus angka pengangguran yang membesar. Margahanai (2019). Salah satu yang perlu dibangun dalam entrepreneur itu adalah jiwa kewirausahaan. Berikut beberapa alasan penting memiliki jiwa *entrepreneurship* di Indonesia : Jumlah lapangan pekerjaan semakin bertambah, Jenis lapangan pekerjaan semakin beragam, Mengurangi tingkat pengangguran, Mengurangi penyakit sosial di masyarakat, Meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi, Meningkatkan taraf ekonomi suatu wilayah, Meningkatkan stabilitas ekonomi bangsa Indonesia. Oleh karena itu jiwa entrepreneurship harus menjadi landasan dalam membangun kemandirian. Jiwa kewirausahaan akan mengalami peningkatan secara signifikan terhadap kemandirian usaha secara tidak langsung dengan dimoderasi oleh perilaku kewirausahaan, hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Amelia (2009).

Jiwa kewirausahaan meliputi kepribadian yang memiliki tindakan kreatif sebagai nilai, gemar berusaha, tegar dalam berbagai tantangan, percaya diri, memiliki self determination atau *locus of control*, berkemampuan mengelola risiko, perubahan dipandang sebagai peluang, toleransi terhadap banyaknya pilihan, inisiatif dan memiliki *need for achievement*, perfeksionis, berpandangan luas, menganggap waktu sangat berharga serta memiliki motivasi yang kuat, dan karakter itu telah menginternalisasi sebagai nilai-nilai yang diyakini benar (Kuratko 2003). Jiwa kewirausahaan merupakan nyawa kehidupan dalam kewirausahaan yang pada prinsipnya merupakan sikap dan perilaku kewirausahaan dengan ditunjukkan melalui sifat, karakter, dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif kedalam dunia nyata secara kreatif. Hartanti (2008). Faktor-faktor yang mempengaruhi

jiwa kewirausahaan seseorang diantaranya adalah: percaya diri (keyakinan), optimisme, disiplin, komitmen, berinisiatif, motivasi, memiliki jiwa kepemimpinan, suka tantangan, memiliki tanggung jawab, dan *human relationship* (Nasution, 2007).

Kesimpulan

Nasib UMKM ditengah pandemik ini mengalami guncangan yang cukup besar dan berdampak pada aktivitas bisnis (produksi, distribusi dan konsumsi). Secara makro ekonomi kondisi ini dapat memicu inflasi dan secara mikro berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran produk. Mengingat UMKM memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian Indonesia juga telah berperan aktif dalam menciptakan lapangan kerja, penciptaan kondisi kerja yang layak inovasi bisnis dan kelayakan penghidupan maka dibutuhkan peran berbagai pihak untuk mendukung kebangkitan UMKM. Berkaitan dengan kondisi tersebut maka kewirausahaan menjadi salah satu pilihan dalam mempertahankan dan melangsungkan kehidupan yang lebih baik, apalagi kebutuhan semakin besar dan lapangan pekerjaan yang semakin sempit, sehingga perlu dipersiapkan generasi entrepreneur. Oleh karena itu untuk menciptakan para entrepreneur dibutuhkan kepribadian yang tangguh dan mandiri. Peran pemerintah sangat penting untuk turut serta dalam menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan ekonomi yaitu eningkatkan pendapatan per kapita negara, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi,meningkatkan dan menyetarakan taraf hidup penduduk,meningkatkan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran, mengurangi kesejangan sosial, meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan investasi negara, mengurangi kemiskinan, menciptakan keadilan dan kemakmuran dalam bermasyarakat serta meingkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan. Tentunya untuk mendorong tujuan ini perlu para nasionalis sejati yang siap membangun negaranya. Nasionalis sejati di era sekarang bukan hanya mereka yang siap memberikan jiwa dan raganya di medan pertempuran



atas nama negara namun sebutan itu juga pantas disematkan bagi mereka yang sanggup memaknai dengan cerdas tujuan terpenting kemerdekaan yakni mencapai tataran bangsa yang ideal yakni bangsa yang adil dan makmur, dan salah satunya melalui terciptanya para wirausaha-wirausaha yang sukses. Dengan kemandiriannya dapat membantu pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi dan cita-cita negara yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Pandemik ini telah mengajarkan banyak hal termasuk bagi para pelaku usaha karena dengan kondisi ini UMKM diberikan tantangan dan peluang dalam mempertahankan, mengembangkan serta membuat bisnis baru untuk terus bertahan. Berbagai peluang telah diberikan oleh pemerintah diantaranya adalah dengan diberi peluang di sektor pertanian, industri rumah tangga, warung tradisional dan sektor makanan dengan protokol kesehatan yang ketat, artinya peluang untuk menjalankan usaha bagi pelaku UMKM. Demikian juga dengan diberikannya dalam bentuk fasilitas keringanan yakni subsidi bunga, penundaan pembayaran pokok, dan pemberian tambahan kredit modal kerja serta peluang lainnya yaitu Pencanangan gerakan 100.000 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Go Online secara bersama sama di 30 kota atau kabupaten di Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai Digital Energy of Asia, juga komitmen Kementerian Koperasi dan UMKM dan Kominfo untuk mengonlinekan 8 juta UMKM. Adapun tantangan UMKM yang harus dihadapi adalah bagaimana menciptakan strategi dalam mengisi kebutuhan pasar dalam negeri maupun pasar global dan strategi untuk entrepreneurship berbasis teknologi dengan tetap menjunjung tinggi norma dan kearifan lokal. Dalam menghadapi tantangan lainnya para pelaku UMKM harus memiliki jiwa dan potensi entrepreneurship, pelaku UMKM hendaknya memahami demokrasi ekonomi yang terjadi juga termasuk mengikuti perkembangan update informasi teknologi dan tetap menjaga kearifan lokal.

Daftar Pustaka

- Alma, Buchari (2010).Kewirausahaan. Edisi Revisi. Bandung CV Alfabeta
- Amelia, (2009). Pengaruh pengetahuan kewirausahaan dan kemandirian pribadi terhadap kinerja usaha (Studi kasus pada pedagang pakaian pajak sore jalan jamin ginting). FE Universitas Sumatera Utara.
- Amrial, Muhammad, A., & Muhamad, E. (2017). Penta helix model: A sustainable development solution through the industrial secto. *Social and Human Sciences*. Indonesia.
- Brown, Duane & Brooks,Linda, (1990). Career Counseling Techniques. Boston: Allyn and Bacon
- Budi, Arya & Irham Nur Anshari, (2020), Administration Distancing?, Pemerintah Daerah Dalam Pandemi Covid-19. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM: UGM Press
- Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, (2020). Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia: Ancaman Reses Dunia Akibat Pandemi Triwulan I Tahun 2020 ISSN 2580-2518.
- Gilpin, R. (1987). The Political Economy of International Relations. New York: Harper Collins Publishers Inc.
- Gilpin, R. (1991). Three Ideologies of Political Economy. In International Political Economy
- Gilpin, R. (2001). Global Political Economy: Understanding The International Economic Order, New Jersey: Princeton University Press.
- Hans Kohn,(1961). Arti dan Sejarahnya, Djakarta. Pustaka Sardjana.
- Hartanti. (2008). Manajemen Pengembangan Kewirausahaan (Entrepreneurship) Siswa SMK 4 Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Hardilawati, Wan Laura, (2020), Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19 The Survival Strategy Of Smes During The Covid-19 Pandemic.Jurnal Akuntansi & Ekonomika, Vol. 10 No. 1, Juni 2020 Jurnal Akuntansi & Ekonomika



- Hanoatubun, S., (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1): 146-153.
- Helisia Margahana & Eko Triyanto, (2019). Membangun tradisi Entrepreneurship pada Masyarakat. Vol 03 No 02. *Edunomika*.
- Hindarsah, Ida, (2019). The Owner Factors: A Innovation Element of Business Canvas by SMEs Rattan Industry in Cirebon Indonesia. *International Journal of Advance Science and Technology* Vol 29 No 6
- Iskandar, A., Possumah, B.T., Aqbar, K., (2020). Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19, *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, 7(7): 625-638.
- Kuratko, D. F. (2003). *Entrepreneurship Education: Emerging trends and challenger for the 21st century.* Coleman Foundation White paper series for the US Association of small business and entrepreneurship.
- Marlinah, Lili, (2020). Peluang dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid 19. Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta.
- Misno, A.B.P., Junediyono., Nurhadi., et al, (2020). Covid-19, Pustaka Amma Alamiah, ISBN: 978-623-92323-5-1
- Nasution & Arman Hakim, (2007). *Entrepreneurship membangun spirit teknopreneurship*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Shinozaki, Shigehiro (2020). Dampak Covid-19 terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Economic Research and Regional Cooperation Departement. Asean Development Bank. Manila-Jakarta.
- Rosita, Rahmi, (2020). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*
- Suryana, (2008). *Kewirausahaan Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses*, Jakarta, Salemba Empat
- Suyatmin, Waskito & Adi, (2020). Peluang dan Tantangan UMKM di tengah tekanan pandemi Covid-19: <https://radarsolo.jawapos>.

com/read/2020/09/17/214411/pejuang-dan-tantangan-umkm-di-tengah-tekanan-pandemi-covid-19

- Kurniawansyah, H., Salahuddin, A.M., Nurhidayati, S., (2020), Konsep Kebijakan Strategis dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi dari Covid-19 Pada Masyarakat Rentan di Indonesia, *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(2): 130-139.
- Linan, Fransisca & Leon, J.A.M, (2007). *Entrepreneurial Intentions*. Departemen of Apply Economy. Universidad de Sevilla. Departemen of Social and Organization Psychology. UNED.
- Wilantara, R. F., & Indrawan, R. (2016). *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM*.
- Widianingrum, Ambar & Wawan Mas'uid. (2020). *Dinamika Respon Pemerintah Nasional: Krisis Kebijakan Penanganan Covid-19*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM: UGM Press.
- Zaelani, Iwan Ridwan, (2019). *Peningkatan Daya saing UMKM Indonesia: Tantangan dan peluang Pengembangan Ipteks*. *Jurnal Transborder* Vol 3 No 1.
- Zimmerer, Thomas W, & Norman, Scarborough, (2005). *Kewirausahaan dan Manajemen Bisnis Kecil*, Erlangga, Jakarta
- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4425111/gegara-pandemi-covid-19-562-juta-penduduk-indonesia-menganggur>
- Lampiran UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, hlm. 36.
- (<https://ekonomi.bisnis.com>)



Halaman ini bukan sengaja untuk dikosongkan

Bab 13

UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA: INVESTASI, NASIONALISME, DAN LINGKUNGAN

Suryanto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pendahuluan

Nasionalisme dalam ekonomi tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah dalam menetapkan strategi pembangunan. Bila pemerintah berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang cepat maka pilihan bagaimana mengundang investor akan menjadi prioritasnya. Investasi adalah salah satu pintu bagi daerah atau suatu negara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Investasi menyebabkan peningkatan belanja barang dan jasa baik untuk belanja barang modal maupun barang konsumsi. Bila terjadi peningkatan belanja modal dan atau belanja konsumsi tentu akan melahirkan turunan kegiatan-kegiatan baru. Dalam terminologi ekonomi sering disebut sebagai *multiplier effect* (angka pengganda investasi). Investasi dalam bidang properti misalnya akan melahirkan permintaan yang meningkat dalam hal bahan bangunan (semen, pasir, besi, dan lain-lain). Permintaan semen yang meningkat akan memungkinkan peningkatan permintaan bahan baku untuk semen, peningkatan jumlah tenaga kerja. Banyak sektor selain properti yang juga akan ikut merasakan dampak positif dari investasi dalam bidang properti.



Selain kesempatan kerja, ternyata sangat berpeluang untuk terbukanya peluang usaha. Meningkatnya pendapatan masyarakat meningkatkan permintaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat. Peluang dari peningkatan permintaan barang dan jasa ini dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha untuk mengembangkan usahanya. Sebagai contoh peluang usaha di bidang kuliner, fashion, atau jasa telekomunikasi. Investasi memang seperti pisau bermata dua, satu sisi dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi namun di sisi lain ternyata investasi tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Investasi dapat membuka lapangan kerja namun juga ada jenis investasi yang tidak berdampak pada sektor riil misalnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah pada sektor swasta.

Berdasarkan studi-studi yang dilakukan sebelumnya diketahui bahwa investasi berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Seperti yang disampaikan oleh tokoh ekonomi, Dornbusch & Fischer (2008) dan Samuelson & Nordhaus (2001) contoh dari investasi adalah bangunan, peralatan produksi, dan barang – barang investasi dalam waktu satu tahun. Lebih lanjut berdasarkan pendapat Mankiw (2007) disebutkan investasi akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Pandangan teori Neo Klasik juga setuju bahwa investasi dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tokoh Neo Klasik seperti Solow dan Swan berpendapat bahwa semakin tinggi rasio capital per tenaga kerja tinggi karena adanya penambahan modal maka akan semakin tinggi produktivitasnya. Pendapat yang berbeda mengenai dampak investasi ternyata juga tidak kalah kuat argumentasinya. Investasi publik dapat menimbulkan efek *crowding-out* terhadap investasi swasta. Efek *crowding-out* dari investasi publik pada investasi swasta diilustrasikan dalam teori IS-LM. Bila penerapan kebijakan moneter tidak berubah, peningkatan pengeluaran pemerintah dapat menyebabkan pergeseran paralel dalam kurva IS dan menciptakan fenomena kenaikan harga dan kenaikan suku bunga dalam jangka pendek, sehingga berdampak negatif terhadap investasi swasta (Buiters, 1977; Sundararajan dan Thakur, 1980; Ram, 1986). Lebih lanjut disampaikan oleh Atukeren (2004) disimpulkan bahwa investasi publik yang didanai dari

peningkatan pajak dapat kontraproduktif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kenaikan pajak juga menyebabkan penurunan investasi swasta setelah pajak, memberikan insentif kepada pelaku ekonomi untuk menyesuaikan keputusan investasi.

Faktor-Faktor Penghambat Investasi

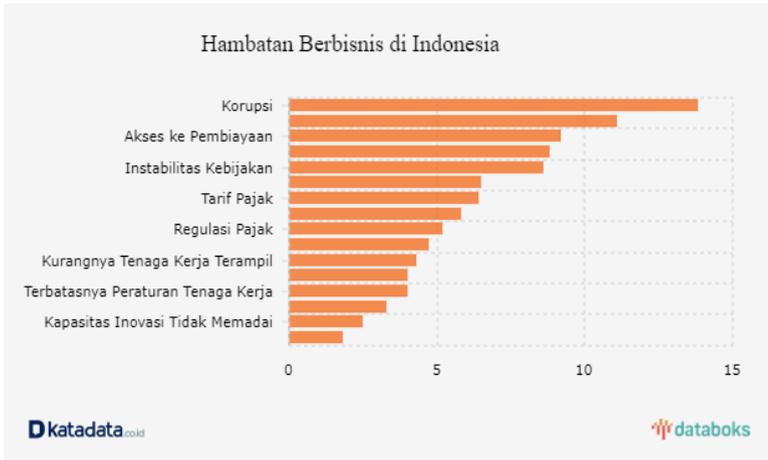
Faktor-faktor penghambat investasi dirilis oleh *World Economic Forum* (WEF) dalam *Global Competitiveness Report 2017-2018* menempatkan korupsi pada peringkat pertama. Korupsi dianggap sebagai faktor penghambat paling serius untuk berbisnis di Indonesia dengan skor 13,8. Faktor korupsi ini membuktikan bahwa pemberantasan korupsi masih jauh dari harapan. Korupsi menyebabkan ekonomi menjadi berbiaya tinggi. Tentu hal ini akan berdampak pada daya saing ekonomi nasional, sebagai contoh korupsi di bibit ikan lobster (benur). Benur ikan yang seharusnya bisa dibudidayakan di dalam negeri tetapi dijual ke luar negeri akan berdampak pada langkanya stok benur dalam negeri. Bila kemudian di pasar luar negeri harga lobster mahal maka petani atau nelayan kita tidak dapat menikmati kenaikan margin harga lobster.

Masih berdasarkan laporan dari WEF, penyebab bisnis di Indonesia kurang menarik adalah inefisiensi birokrasi pemerintah dengan skor 11,2. Kenyataan ini memang dapat dipahami karena birokrasi pemerintah banyak yang masih bermental priyayi dan bukan untuk melayani (republika.co.id). Namun di beberapa daerah reformasi birokrasi telah menunjukkan perbaikan sehingga banyak aparatur pemerintah telah berubah menjadi lebih baik. Faktor berikutnya adalah akses ke pembiayaan dengan skor 9,2. Keterbatasan pada akses pembiayaan ini sangat ditentukan oleh literasi terhadap lembaga keuangan yang masih rendah. Laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menguatkan demikian bahwa Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) ketiga menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 38,03% dan indeks inklusi keuangan 76,19% pada tahun 2019. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai dengan skor 8,8 berada peringkat keempat. Infrastruktur yang baik akan mengundang investasi dalam

negeri atau luar negeri. Infrastruktur saat ini telah diperbaiki untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Faktor penghambat kelima adalah tidak stabilnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan skor 8,6 kemudian disusul oleh instabilitas pemerintah dan rasio pajak menempati urutan selanjutnya dengan masing-masing sebesar 6,5 dan 6,4.

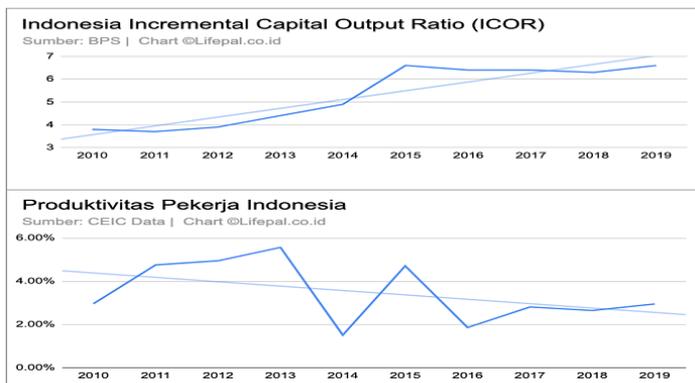
Gambar 1. Hambatan Berbisnis di Indonesia



Sumber: WEF 2019 oleh katadata.co.id

Pada Gambar 1 diketahui faktor-faktor penghambat bisnis di Indonesia ada delapan faktor. Selain korupsi, akses pembiayaan, dan instabilitas kebijakan masih terdapat tarif pajak, regulasi pajak, tenaga kerja yang terampil, peraturan tenaga kerja, dan kapasitas inovasi yang tidak memadai. Identifikasi faktor-faktor yang lain antara lain adalah etos kerja buruh, regulasi pajak, inflasi, pendidikan tenaga kerja rendah, kejahatan dan pencurian, peraturan tenaga kerja, kebijakan kurs asing, kapasitas inovasi yang minim, dan kesehatan masyarakat yang buruk.

Gambar 2 Indonesia Incremental Capital Output Ratio dan Produktivitas Tenaga Kerja



Sumber: lifepal.go.id, 2020

Berdasarkan Gambar 2 diketahui bahwa nilai ICOR Indonesia dari tahun 2010 sampai tahun 2019 cenderung meningkat. Konsep Capital Output Ratio (COR) dibagi dua yaitu Konsep COR ada 2 macam yaitu *average capital-output ratio* (ACOR) dan *incremental capital-output ratio* (ICOR). ACOR merupakan salah satu cara pengukuran hubungan antara stok modal yang ada diperbandingkan dengna *cash flow* yang dihasilkan. Berbeda dengan ICOR, rasio ini menghubungkan antara jumlah kenaikan output (pendapatan) ΔY yang disebabkan oleh kenaikan tertentu pada stok modal ΔK . ICOR dapat dirumuskan dengan sebagai $\Delta K/\Delta Y$.

ACOR menunjukkan hubungan antara segala sesuatu yang telah diinvestasikan pada masa lalu dengan keseluruhan pendapatan. Sedangkan ICOR menunjukkan segala sesuatu yang saat ini ditambahkan pada modal atau pendapatan. ACOR merupakan konsep statis, sementara ICOR merupakan konsep dinamis. Istilah COR sebagaimana sering digunakan dalam ilmu ekonomi biasanya berkaitan dengan ICOR. Konsep COR dapat diterapkan tidak hanya pada perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga di berbagai sektor perekonomian. Besarnya COR tergantung pada teknik produksi yang digunakan. Pada sektor produksi yang menggunakan teknik produksi bersifat padat modal memiliki



COR yang tinggi. Sebaliknya, pada sektor yang menggunakan teknik padat karya memiliki COR yang rendah. COR memberikan hasil yang lebih berarti dalam jangka panjang ketimbang dalam jangka pendek. Secara analitis COR berguna dalam menunjukkan arti penting modal di dalam pembangunan ekonomi (Arsyad, 1999).

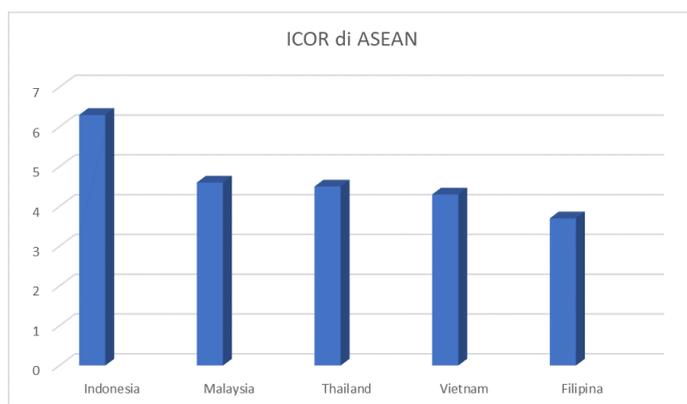
Menurut Arsyad (1999) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi COR yaitu: 1) Ketersediaan sumberdaya alam dan pertumbuhan penduduk. Semakin kaya daerah dan semakin tinggi pertumbuhan penduduk akan mendorong COR semakin rendah; 2) Tingkat dan sifat kemajuan teknologi, semakin maju teknologi mendorong nilai COR semakin tinggi; 3) Laju dan komposisi investasi, nilai COR akan semakin rendah bila investasi diperuntukkan pembangunan pada sektor pertanian dan perindustrian; 4) Efisiensi penggunaan faktor produksi, semakin tinggi efisien menggunakan faktor produksi menyebabkan COR ekan rendah; 5) Keterampilan Manajerial dan Organisasional, semakin tinggi kualitas keterampilan manajerial dan organisasionalnya tinggi, memiliki COR rendah. Semakin efisien penggunaan sumberdaya, terutama modal , maka akan menurunkan COR; 6) Kebijakan harga faktor produksi, Suatu perubahan harga (upah, suku bunga, sewa dan sebagainya) akan mempengaruhi besarnya COR. Penurunan suku bunga, dengan harga faktor produksi lainnya konstan, mungkin akan meningkatkan permintaan investasi akan modal sehingga menaikkan COR; 7) Kebijaksanaan Ketenagakerjaan, semakin tinggi penyerapan tenaga kerja industri besar khususnya industri manufaktur, maka COR akan lebih kecil. Hanya sedikit sekali modal dan tenaga kerja yang akan digunakan pada industri seperti itu bila dibandingkan dengan pekerjaan umum; 8) Kemajuan Industrialisasi, kemajuan industrialisasi cenderung menaikkan COR. Industrialisasi menyebabkan urbanisasi, akibatnya COR terdorong naik; 9) Penggunaan prasarana sosial dan ekonomi, investasi pada infrastruktur cenderung menyebabkan COR cenderung meningkat pada jangka pendek.

Pertumbuhan yang tinggi membutuhkan investasi yang efisien. Semakin tinggi tingkat efisiensi investasi yang terjadi semakin

bagus pengelolaan dana investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut teori Harrod-Domar menyatakan perlunya terpenuhinya syarat supaya terjadi pertumbuhan ekonomi yang *steady state*. Besaran ICOR di mana menunjukkan besarnya tambahan kapital dengan tambahan output. ICOR dapat merefleksikan besarnya produktivitas kapital yang pada akhirnya menyangkut besarnya pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai dan kebutuhan dana investasi yang diperlukan untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi.

Bila suatu negara atau suatu daerah menunjukkan tingkat ICOR yang rendah maka menunjukkan semakin efisienya negara atau daerah tersebut dalam menumbuhkan ekonominya. Kita perbandingkan nilai ICOR Indoneisa di antara negara ASEAN pada tahun 2018. Bila di Indonesia ICOR sebesar 6,3, Malaysia sebesar 4,6, Filipina 3,7, Thailand 4,5, dan Vietnam 5,2. Indonesia untuk menumbuhkan ekonomi sebesar satu persen membutuhkan tambahan modal lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga di ASEAN. Hasil ICOR menunjukkan bahwa kekurangefisienan dalam pengelolaan investasi.

Gambar 3 ICOR di ASEAN



Sumber: Abidin dalam Laporan Forbil Institute, 2019



Omnibus Law

Istilah omnibus law merupakan metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Jadi beberapa undang-undang akan dijadikan lebih ringkas dan menghindarkan dari tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan. Pemerintah memandang bahwa ketidakefisien investasi disebabkan oleh adanya masalah dalam reformasi regulasi dan debirokratisasi. Harapan pemerintah dengan digulirkan Undang-undang Cipta Kerja akan meningkatkan pelayanan pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan adanya penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan penggunaan sistem elektronik. Hal ini didasari oleh keyakinan pemerintah bahwa masalah penghambat bisnis di Indonesia termasuk peningkatan investasi adalah proses perizinan berusaha yang rumit dan lama, persyaratan investasi yang memberatkan, pengadaan lahan yang sulit, hingga pemberdayaan UMKM dan koperasi yang belum optimal. Proses administrasi dan birokrasi perizinan yang cenderung lamban juga dipandang sebagai penyebab juga yang menghambat investasi dan pembukaan lapangan kerja.

Pemerintah mengklaim bahwa UU Ciptaker tak hanya melindungi kepentingan pengusaha, namun juga pekerja. UU Ciptaker ini meliputi 11 kluster pembahasan yakni: (1) penyederhanaan perizinan, (2) persyaratan investasi, (3) ketenagakerjaan, (4) kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM, (5) kemudahan berusaha, (6) dukungan riset dan inovasi, (7) administrasi pemerintahan, (8) pengenaan sanksi, (9) pengadaan lahan, (10) investasi dan proyek pemerintah, (11) kawasan ekonomi.

UU Ciptaker terdapat sebelas kluster pembahasan. Kluster satu adalah penyederhanaan perizinan ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan perizinan yang lama. Kluster kedua adalah persyaratan investasi pembahasannya meliputi kegiatan usaha tertutup, bidang usaha terbuka dan pelaksanaan investasi. Kluster ketiga tentang ketenagakerjaan yang mengatur mengenai

upah minimum regional, pesangon, PHK, cuti, dan *outsourcing*. Kluster keempat membahas kemudahan UMKM untuk berusaha. Selain kemudahan perizinan berusaha, dibahas juga pembinaan dan pengembangan UMKM serta insentif fiskal dan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil. Dalam draft pemerintah disebutkan perizinan berusaha yang diajukan oleh usaha mikro dan kecil dapat diberikan insentif berupa tidak dikenakan biaya atau diberikan keringanan biaya.

Kluster kelima bermaterikan tentang kemudahan berusaha, kluster keenam bermaterikan dukungan inovasi dan riset, kluster tujuh adalah administrasi pemerintahan. Kluster lima sampai ketujuh bertujuan untuk mempercepat dunia usaha untuk memulai usaha dengan dukungan dari administrasi pemerintah.

Kluster kedelapan membahas mengenai penghapusan sanksi pidana, dalam UU ciptaker lebih ditekankan pada sanksi administrasi. Kluster kesembilan adalah pengadaan lahan, kluster sepuluh membahas investasi dan proyek pemerintah, dan kluster terakhir atau kluster kesebelas adalah kawasan ekonomi.

Dampak Omnibus Law terhadap Lingkungan

Pada bagian ini pembahasan dititikberatkan pada trade off antara peningkatan investasi dan degradasi lingkungan. Undang-undang Cipta kerja telah disahkan dengan nama UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan beberapa kluster yang dibahas membawa beberapa konsekuensi negatif terhadap lingkungan.

Dalam Tabel 1 disajikan perbandingan antara Undang-undang Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

**Tabel 1. Perbandingan Perubahan UU PPLH dan UU Cipta Kerja**

Hal	UU PPLH	UU Cipta Kerja
Tahapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses dokumen lingkungan (Amdal atau UKL-UPL) 2. Persetujuan lingkungan, 3. Izin Lingkungan, 4. Izin Usaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses dokumen lingkungan (Amdal atau UKL-UPL), 2. Persetujuan Lingkungan, 3. Perizinan Berusaha
Dasar proses perizinan	Kriteria Dampak: Dampak penting bagi lingkungan Tidak berdampak penting bagi lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Risiko tinggi - Risiko menengah - Risiko rendah
Penilai Amdal	Komisi Penilai Amdal (KPA)	Lembaga Uji Kelayakan (LUK)
Pembentuk Penilai Amdal	Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya	Pemerintah Pusat
Anggota Penilai Amdal	<ul style="list-style-type: none"> - Instansi lingkungan hidup dan teknis terkait; - Pakar bidang lingkungan dan pakar sesuai jenis kegiatan/ usaha -Wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak -Organisasi lingkungan hidup 	<p>LUK menunjuk Tim Uji Kelayakan yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah - Pakar bersertifikat yang kompeten di bidangnya - Masyarakat yang terkena dampak langsung
Unsur masyarakat yang dilibatkan dalam penilaian Amdal	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat yang terkena dampak kegiatan/usaha - Pemerhati lingkungan - Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal 	Masyarakat yang terkena dampak langsung

Bantuan dari pemerintah berupa fasilitasi, biaya, dan/ atau penyusunan Amdal	Bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.	Bagi usaha dan/atau kegiatan Usaha Mikro dan Kecil yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
Jika terjadi pelanggaran lingkungan	Konsekuensi terhadap Izin Lingkungan	Konsekuensi terhadap Perizinan Berusaha

Sumber: Suryani, 2020.

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui ada beberapa perbedaan signifikan mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu contohnya adalah bila dalam UU PPLH penentuan kriteria dampak penting dihapus dengan kriteria risiko. Sampai saat tulisan ini disusun, kriteria mengenai kriteria risiko belum ditetapkan dan disosialisasikan. Perbedaan yang cukup signifikan lain adalah bila dalam UU PPLH Komisi Penilai ditetapkan oleh daerah maka dengan UU Cipta Kerja komisi penilai di Lembaga Uji Kelayakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Apabila aturan ini tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah maka pengajuan perizinan lingkungan dapat menjadi terhambat.

Selain penilaian AMDAL, beberapa fakta-fakta dalam perundangan UU Cipta Kerja yang dikeluhkan oleh para penggiat lingkungan antara lain:

1. Syarat izin usaha, dengan UU Cipta Kerja yang baru maka pengajuan kegiatan atau usaha yang baru tidak perlu perizinan lingkungan tetapi cukup persetujuan lingkungan. Hal ini dikhawatirkan berdampak pada kajian-kajian mengenai dampak lingkungan menjadi kurang mendalam dan komprehensif.
2. Pembatalan izin lingkungan, dalam UU Cipta Kerja yang baru masyarakat tidak mendapat ruang untuk menuntut melalui PTUN. APabila kegiatan atau jenis usaha tersebut ternyata



- di kemudian hari berdampak negatif maka masyarakat tidak memiliki hak untuk melaukan gugatan.
3. Pelanggaran dalam UKL UPL, AMDAL, dan Limbah B3, dalam UU Cipta kerja pelanggaran hanya dapat dikenakan sanksi administrasi. Hal ini dikhawatirkan akan merugikan masyarakat karena dengan sanksi pidana saja banyak pelanggaran terhadap izin lingkungan sangat banyak apalagi hanya dengan sanksi administrasi.
 4. Tanggung jawab Perusakan Lingkungan, dalam UU Cipta Kerja tanggung jawab perusakan lingkungan dihilangkan frasa tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan beberapa perbedaan dalam pengelolaan lingkungan tersebut maka dikhawatirkan tujuan pemerintah mempermudah investasi akan berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat lokal. Pengintegrasian perizinan lingkungan ke Perizinan Berusaha menyebabkan pelaku usaha tidak perlu mengurus banyak perizinan yang kadang sangat kompleks dan menyulitkan. Namun juga berdampak pada potensi pelanggaran izin lingkungan.

Pelibatan masyarakat dan penentuan kriteria risiko juga akan sangat signifikan dalam pengelolaan lingkungan. Penyebutan masyarakat yang terkena dampak langsung seakan-akan membatasi peran masyarakat dari unsur lainnya misalnya pemerhati lingkungan, baik sebagai individu maupun organisasi. Jadi fungsi kontrol dari berbagai lapisan masyarakat akan kelestarian lingkungan dapat berkurang. Hal ini menimbulkan kekhawatiran publik atas terbatasnya akses untuk mendapatkan informasi dan partisipasinya dalam uji kelayakan lingkungan hidup.

Investasi yang tinggi tapi kerusakan lingkungan juga tinggi justru merugikan pada kesejahteraan masyarakat. Ekternalitas negatif dari adanya investasi sering kali tidak diperhitungkan oleh pengambil kebijakan. Hancurnya ekosistem atau keanekaragaman hayati sering dinolkan.

Oleh karena itu maka berhati-hatilah dalam memberikan kemudahan investasi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin masyarakat menjadi sejahtera, pengangguran menurun, kemiskinan berkurang, dan ketimpangan akan menurun. Bagaimana bila akhirnya investasi yang masuk dengan dalih efisiensi maka kemudian tenaga kerja lokal digantikan dengan tenaga kerja asing. Bagaimana bila akhirnya atas nama investasi maka sumber penghidupan masyarakat menjadi tergusur dan harus pergi entah ke mana. Nasionalisme dalam pengelolaan lingkungan yang baik akan menjamin pembangunan menjadi lebih adil untuk semua lapisan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abidin, Aldi. 2019. "Investasi di ASEAN: Siapa yang terbaik?". <http://forbil.id/investasi/investasi-di-asean-siapa-yang-terbaik/aldi-abidin/>
- Arsyad, L. (1999). Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah (Edisi Ketiga). Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM
- Atukeren, E. (2005), Interaction between Public and Private Investment Evidence from Developing Countries, *Kyklos*. <https://doi.org/10.1111/j.0023-5962.2005.00290.x>. diakses 14 April 2021.
- Buiter, W. (1977), "Crowding out and the effectiveness of fiscal policy", *Journal of Public Economics*, Vol. 7 No. 3, pp. 309-328.
- Barro, R.J. (1990), "Government spending in a simple model of endogenous growth", *The Journal of Political Economy*, Vol. 98 No. 5, pp. 103-125.
- Dornbusch, Rudiger, Stanley Fischer, Richard Startz, (2008), *Makroekonomi*, Edisi 10, PT.Media Global Edukasi, Jakarta. <https://investor.id/business/11-klaster-omnibus-law-ciptaker> diakses tanggal 6 Februari 2021.



- <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/318405/baleg-dpr-bahas-klaster-perlindungan-umkm-ruu-cipta-kerja> diakses 7 Februari 2021
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/24/korupsi-penghambat-utama-investasi-di-indonesia>. Diakses 14 April 2021
- <https://www.republika.co.id/berita/q24t2c382/bermental-priyayi-manajemen-asn-dinilai-perlu-diperbaiki>. Diakses 14 April 2021
- <https://lifepal.co.id/media/korupsi-bukan-satu-satunya-faktor-penyebab-tingginya-icor-indonesia/>. Diakses 14 April 2021
- Mankiw, N. Gregory. 2007. Makroekonomi. Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga.
- Ram (1986), *“Government size and economic growth: a new framework and some evidence from cross-section and time-series data”*, The American Economic Review, Vol. 76 No. 1, pp. 191-203.
- Samuelson, Paul A. Dan Nordhaus William D. (2001). Makro Ekonomi. Edisi ke17. Cetakan keempat. Jakarta: Erlangga.
- Sundararajan, V. and Thakur, S. (1980), *“Public investment, crowding out and growth: a dynamic model applied to India and Korea”*, staff papers, International Monetary Fund, Washington, DC.
- Suryani, Anih Sri. (2020). Perizinan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan. KAJIAN SINGKAT TERHADAP ISU AKTUAL DAN STRATEGIS. Vol. XlfiNo. 20/II/Puslit/Oktober/2020. DPR RI. Jakarta.

BIODATA SINGKAT PENULIS

Dr. Abu Huraerah adalah dosen tetap Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pasundan Bandung. Menyelesaikan program doktor Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia tahun 2016. Saat ini ia sebagai Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) FISIP Universitas Pasundan. Minat kajiannya pada kebijakan sosial, perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pelayanan kesehatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, serta perlindungan dan kesejahteraan anak. Ia telah menulis beberapa judul buku yaitu *Dinamika Kelompok: Konsep dan Aplikasi, Kekerasan terhadap Anak, Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan, serta Kebijakan Perlindungan Sosial: Teori dan Aplikasi Dynamic Governance* dan menulis beberapa *book chapter*, jurnal internasional dan nasional, serta artikel di media cetak. Sebagai Reviewer Penelitian tersertifikasi Kemenristekdikti RI (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia) dan sebagai Dewan Editor dan Reviewer Jurnal di beberapa Perguruan Tinggi, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Pasundan, Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Universitas Halu Oleo Kendari Sulawesi Tenggara, dan jurnal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Juga, sebagai Asesor Pekerja Sosial, Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial Kementerian Sosial RI (2014-sekarang). Selain itu, aktif sebagai Pengurus Asosiasi



Pendidikan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial Indonesia (ASPEKSI) di Komisi Pengembangan Kurikulum dan sebagai anggota *Asia Pacific Association for Social Work Education (APASWE)*.

Adi Fahrudin, PhD adalah Profesor Ilmu Pekerjaan Sosial (*Social Work*) pertama di Indonesia dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Negeri pada LL Dikti III Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang ditugaskan (*seconded*) pada Universitas Muhammadiyah Jakarta sejak tahun 2012. Beliau memperoleh pendidikan awal di Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Negeri di Palembang (1982-1986) sebagai lulusan terbaik, Sarjana Pekerjaan Sosial (Drs) dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung sebagai lulusan terbaik (1986-1991), Master of Social Science (Social Work) (1994-1996) and PhD in Social Work (1997-1999) di University of Science Malaysia, serta memperoleh Sarjana Psikologi dari Fakultas Psikologi Universitas Nasional Pasim (2005-2010). Pada tahun 2015, beliau dilantik sebagai *Visiting Professor* and *Associate Research Fellow* di Faculty of Psychology and Education, Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia (2015-2021), kemudian beliau juga dilantik menjadi *Visiting Professor* di *Institute of Social Work Research, Japan College of Social Work, Kyose City, Tokyo, Japan* (2018-2020, dilanjutkan 2020-2024). Selain itu beliau juga merupakan *Associate Research Fellow* pada *Asian Research Institute for International Social Work, Shukutoku University, Chiba, Japan* (2014-2021). Fokus penelitian terkini berkaitan isu lanjut usia dalam situasi bencana, imigran, *stateless child*, *Islamic social work*, *incest* dan *transnational marriage*. Beliau telah memublikasikan buku dan artikel ilmiah di jurnal terindex Scopus/Web of Science/ISI/ERA dan juga aktif dalam komunitas pekerjaan sosial internasional diantaranya menjadi Board Member of APASWE (2017-2021), dan APISWEA. Beliau juga merupakan Editor-in-Chief, *Asian Social Work Journal (ASWJ)*.

Dian Din Astuti Mulia, S.Psi., MA, Lahir pada 16 Maret 1990 ini menyelesaikan studi S1 di Fakultas Psikologi Universitas

Negeri Makassar, dan menyelesaikan studi S2 di Magister Psikologi Industri dan Organisasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dian saat ini aktif sebagai Assessor SDM Aparatur di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta mengabdikan sebagai Pengajar dan Peneliti bidang ilmu Psikologi Organisasi, Perilaku Konsumen, dan Assesment Talent di Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Jakarta

Husmiati Yusuf, Ph.D. merupakan seorang Peneliti Madya di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia. Menamatkan Sarjana Pekerjaan Sosial di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung tahun 1991. Menyelesaikan pendidikan Master of Social Science (Social Work) tahun 2004, kemudian Ph.D. in Social Work tahun 2010. Pengalaman bekerja pertama kali bekerja sebagai Pekerja Sosial di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Lembang Bandung dari tahun 1994 sampai tahun 2012, kemudian berpindah menjadi Peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial di Jakarta.

Dr. Ida Hindarsah merupakan dosen tetap dengan pangkat/jabatan Lektor Kepala pada Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pasundan Bandung sejak tahun 1997. Beliau menamatkan pendidikan S1 Administrasi Bisnis Universitas Pasundan pada tahun 1996, program S2 Magister Manajemen, IPWIJA Jakarta tahun 2001, program S2 Administrasi Bisnis di Universitas Pasundan tahun 2004, dan sedang menyelesaikan Doktor Manajemen di Universitas Pasundan Bandung. Beliau banyak terlibat dalam penelitian yang berkaitan dengan pengembangan bisnis, pemberdayaan perempuan, permodelan bisnis dan usaha kecil dan menengah

Dr. Istiana Hermawati, merupakan Peneliti Ahli Utama pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kementerian Sosial RI. Kepakaran penelitian



yang dipilih adalah Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Pengentasan Kemiskinan, Pemberdayaan masyarakat, Perempuan dan Anak. Pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Standardisasi dan Sosialisasi Sistem Pelayanan Kesejahteraan Sosial (2013 - 2017). Penulis juga menjadi dosen luar biasa untuk Mata Kuliah “Penelitian Kebijakan” dan “Metodologi Evaluasi Kebijakan” pada program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta prodi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (2011- 2019), dosen dengan status perjanjian kerja pada Program Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) Yogyakarta untuk mata kuliah “Kapita Selekta” dan “Perencanaan Penelitian” (sejak Januari 2021). Beliau juga banyak menulis beberapa buku dan artikel di jurnal penelitian terakreditasi. Di samping itu beliau juga memiliki aktifitas sebagai Editor Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial (2018 s.d sekarang); Mitra Bestari pada jurnal Nata Praja Universitas Negeri Yogyakarta (2020 s.d sekarang); Ketua Majelis Asesor Peneliti Instansi Kemensos RI (2020 s.d sekarang); Tim Penilai Jabatan Fungsional Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta (2017 s.d sekarang); dan Pengurus Himpunan Peneliti Daerah Istimewa Yogyakarta (2019 s.d sekarang). Pengabdian yang diberikan kepada masyarakat diimplementasikan sebagai pendiri dan ketua umum Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) Bina Insan Mandiri Yogyakarta sejak tahun 2002 hingga sekarang. Lembaga ini bergerak dalam pendampingan dan pemberdayaan: anak, perempuan dan komunitas, lanjut usia, difabel serta orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah dan Lampung Timur.

Laila Meiliyandrie Indah Wardani, Ph. D. Meenyelesaikan studi S1 di Fakultas Kedokteran, Program Studi Psikologi Universitas Diponegoro Semarang, dan menyelesaikan studi S2 & S3 Psikologi Industri dan Organisasi di Faculty Sains Social and Humanity, Universiti Kebangsaan Malaysia. Saat ini aktif sebagai pengajar dan peneliti bidang ilmu Psikologi organisasi, *cross-cultural*, dan metodologi di Fakultas Psikologi, Universitas Mercu Buana

Dr. Lusi Andriyani adalah dosen tetap Aparatur Sipil Negara LL Dikti Wilayah III DKI Jakarta yang ditugaskan pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta. Beliau menamatkan pendidikan S1 Ilmu Politik tahun 2000 dan S2 Ilmu Politik tahun 2008 dari Universitas Airlangga Surabaya. Pendidikan S3 Ilmu Politik diselesaikan di Universitas Indonesia tahun 2019. Pernah bekerja sebagai tenaga pengajar di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, sebelum mutasi ke Universitas Muhammadiyah Jakarta. Minat penelitian yang utama terkait dengan politik perkotaan, politik lingkungan, dan politik identitas.

Meiti Subardhini, Ph.D merupakan Dosen Tetap pada Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung sejak tahun 1986. Beliau menamatkan pendidikan S1 Pekerjaan Sosial pada Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung pada tahun 1985, program S2 diselesaikan pada tahun 2004 pada Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran Bandung, dan pada tahun 2013, menyelesaikan Doktor Kerja Sosial di Universiti Sains Malaysia (USM) di Penang Malaysia. Beliau banyak terlibat dalam penelitian yang berkaitan dengan Pekerjaan Sosial Klinis dengan konsentrasi pada masalah anak dan keluarga, gender serta disabilitas juga mengembangkan praktek pekerjaan sosial melalui pelayanan Konseling dan Terapi Psikososial.

Mohammad Reevany Bustami, PhD adalah Profesor Madya (Associate Professor) dan Ketua Nusantara Malay Archipelago Research pada Center for Policy Research and International Studies (CenPris), Universiti Sains Malaysia. Beliau memperoleh Bachelor of Arts (Sociology), Purdue University, U.S.A; Master of Arts (Sociology), University of Wisconsin Milwaukee, USA; Ph.D. (Sociology), London School of Economics and Political Science, United Kingdom. Minat kajian yang utama adalah *Nusantara & Ethnic studies, CSR, Future Organizational Transformation*.



Dr. Oktaviana Purnamasari, M.Si, merupakan dosen tetap dan Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Beliau mengawali pendidikan formal diploma tiga (D3) di Program Studi Ilmu Komunikasi Konsentrasi Periklanan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan lulus Tahun 1999. Studi sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Komunikasi Konsentrasi Periklanan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tahun 2006 melanjutkan studi strata dua (S2) pada Magister Ilmu Komunikasi Konsentrasi Komunikasi Bisnis di universitas yang sama. Tahun 2015 mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan jenjang Doktor (S3) pada Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor dengan bantuan beasiswa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan lulus pada awal tahun 2020. Bidang kajian yang diminati adalah Komunikasi Kesehatan, Komunikasi Pemasaran, Advertising dan New Media. Pengalaman bekerja sebagai praktisi periklanan diawali sebagai copywriter di beberapa biro iklan nasional, di antaranya Artek 'n Partner Communications, Princip Communications, Power Brand Communications, OneComm Innovate dan Stratos Communications. Berlanjut dengan pengalaman mengajar di Universitas Esa Unggul, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Inter Study, Universitas Al Azhar serta Universitas Bakrie. Saat ini penulis tercatat sebagai dosen tetap dan Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Rajih Arraki', S.Sos merupakan pelajar Master degree in Sociology/Anthropology at Centre for Policy Research and International Studies (CenPRIS), Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia. Beliau menamatkan Bachelor degree from Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, University

of Muhammadiyah Malang, Indonesia. Minat Kajian yang utama adalah *Sociology of Religion, Post-Modernism, Organization, and Health*

Dr. Sakroni merupakan Dosen Tetap pada Program Studi Pekerjaan Sosial, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Beliau menamatkan pendidikan Sarjana (S1) pada Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (sekarang Politeknik Kesejahteraan Sosial), pendidikan Pascasarjana S2 dan S3 dalam Ilmu Pendidikan Luar Sekolah di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Minat kajian utama adalah dalam bidang pekerjaan sosial sekolah, kenakalan remaja, perundungan siswa (*bullying*) dan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan sosial dan pendidikan.

Dr. Suryanto adalah dosen tetap pada program S1, S2, dan S3 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta sejak tahun 2008. Beliau menamatkan pendidikan S1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) UGM pada tahun 1999 dan S2 IESP UGM pada tahun 2004. Program doctor diselesaikan pada program Ilmu Lingkungan UGM pada 2011. Minat penelitian pada ekonomi lingkungan terutama pada pembangunan ekonomi berkelanjutan. Beliau juga sering terlibat dalam pelatihan pada penyusunan AMDAL dan KLHS.

Dr (Cand.) Tria Patrianti adalah Pengajar Tetap di Program Studi Ilmu Komunikasi, Konsentrasi *Public Relations*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta. Setelah menyelesaikan pendidikan S1 di FIKOM Universitas Padjadjaran pada tahun 1996, Tria malang melintang menjadi praktisi komunikasi di ASEAN Secretariat, Sinar Mas, Ellipse PR, dan terakhir di PT. Socio Komunikasi Indonesia sebagai *PR Senior Consultant* dan *Public Affairs Specialist* selama 11 tahun. Pengalaman mengajar Tria dimulai sejak 2011 di Universitas Al-Azhar Indonesia dan UPN-Veteran Jakarta sebelum memutuskan untuk menjadi dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2014. Kini, Tria sedang menyelesaikan studi S3 di Program Doktor Universitas



Padjadjaran dan mendalami kajian komunikasi lingkungan dengan isu *climate change communication*. Tria aktif menjadi anggota Jejaring Indonesia Rendah Emisi.

Drs. Warto, merupakan Peneliti Ahli Madya pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kementerian Sosial RI. Kepakaran penelitian yang dipilih adalah Kesejahteraan Sosial. Beberapa penelitian yang telah beliau lakukan berfokus pada kajian tentang kearifan lokal, keswadayaan masyarakat, kesetiakawanan sosial, dan nilai-nilai kepahlawanan.

Wanda Kiyah George Albert, PhD merupakan Pensyarah Kanan dan Ketua Program Kerja Sosial di Fakulti Psikologi dan Pendidikan, Universiti Malaysia Sabah. Beliau menamatkan Bachelor of Social Work dari Universiti Malaysia Sabah, dan Master of Medical Social Work dari Universiti Kebangsaan Malaysia, serta sedang menyelesaikan PhD in Social Work dari Universiti Sains Malaysia. Minat penelitian adalah dalam bidang kerja sosial perubatan, *oncology social work*, *paliative social work*, dan *hospice social work*.